



BADAN POM

BALAI BESAR POM di PADANG
Wilayah Bebas Korupsi
Menuju
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH [LAKIP] TW II 2021

www.bbpompadang.id



padang.pom.go.id



BPOM Mobile



@bbpom_padang



@bbpomdi Padang



bbpom_padang



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan anugerah-Nya sehingga Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAPKIN) Triwulan II Tahun 2021 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.



Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Triwulan II Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang disusun dalam bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sasaran dan target kinerja meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja *input*, *output*, dan *outcome* yang telah ditetapkan dan direalisasikan, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Triwulan II Tahun 2021.

Akhir kata, kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada Triwulan berikutnya.

Padang, 19 Juli 2021

**Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Padang**

Firdaus Umar, S.Si, Apt.

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
NOMOR HK.02.02.93.931.02.20.190 TANGGAL 11 DESEMBER 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PADANG

Penanggungjawab : Firdaus Umar, S.Si., Apt.
Ketua : Elyunaida, S.Si., Apt., M.Farm
Sekretaris : Vera Sribanon, S.Si., Apt.

Koordinator : Dra. Meilifa, Apt., M. Si
Dra. Hilda Murni, Apt., MM
Dra. Fifiyani
Dra. Patria Dehelen, Apt.
Drs. Asrianto, Apt., M.M.
Iswadi, S.Farm., Apt.

ANGGOTA :

1. Dra. Armawati Anwar, Apt
2. Dra. Ernanetti, Apt
3. Feri Jonius.S.Si.,M.Si
4. Ardoni, S. Sos
5. Aria Bogorianti Asgul, S. Si, Apt
6. Yelvina, S.Si, Apt
7. Linda Gusriani Fadri, S. Si, Apt, M. Farm
8. Sri Hartati, S. Farm, Apt
9. Nery Revisa, S.E.
10. Ahmad Ridha, SKM.
11. Fitria, S.Si., Apt.
12. Hidrah Lisa Putra, S.Farm., Apt.
13. Leli Oktavia, S.Farm., Apt
14. Novita Normasari, S.Si., Apt., M.P.H.
15. Nining Tridilla Swesty, S.Farm, Apt
16. Rio Mardion, SH
17. ThuDessy Cameryta, Apt., M.Farm
18. Mega Asriati Putri, S.Farm., Apt
19. Hilda Novita, S.H.
20. Nining, S.Farm., Apt
21. Elza Frasi Yuni, S.Farm., Apt.
22. Fikri Ikhsan, S.E.

EDITOR :

1. Yuni Tri Wahyuni, S.Kom.
2. Billy Tunarto, S. Kom
3. Ade Restu Pahlawan, S. Kom



Kata Pengantar	i
Tim Penyusun	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Lampiran	x
Ringkasan Eksekutif	xii
Highlight	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	4
1.4 ISU STRATEGIS	6
1.5 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	11
1.6 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024	18
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2021	32
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	32
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	35
2.5 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR	38

BAB III

3.1 Capaian Kinerja Organisasi	40
3.1.1 Pencapaian Sasaran Kegiatan I	44
3.1.2 Pencapaian Sasaran Kegiatan II	59
3.1.3 Pencapaian Sasaran Kegiatan III	60
3.1.4 Pencapaian Sasaran Kegiatan IV	62
3.1.5 Pencapaian Sasaran Kegiatan V	84
3.1.6 Pencapaian Sasaran Kegiatan VI	90
3.1.7 Pencapaian Sasaran Kegiatan VII	100
3.1.8 Pencapaian Sasaran Kegiatan VIII	103
3.1.9 Pencapaian Sasaran Kegiatan IX	103
3.1.10 Pencapaian Sasaran Kegiatan X	103
3.1.11 Pencapaian Sasaran Kegiatan XI	106
3.2 REALISASI ANGGARAN	109
3.3 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN	115

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN	119
4.2 RENCANA PERBAIKAN KINERJA	119



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	5
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan	6
Gambar 1.3	Peta Wilayah Sumatera Barat	15
Gambar 2.1	Peta Strategi Level 0 Kepala BPOM RI	18
Gambar 2.2	Peta Strategi Level 2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	19
Gambar 2.3	Peta Strategi Level 2 Loka POM	19
Gambar 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan II Tahun 2021	43
Gambar 3.2	Jumlah Sampel Obat Acak MS dan TMS Triwulan II Tahun 2021	45
Gambar 3.3	Jumlah Sampel Obat Tradisional Acak MS dan TMS Triwulan II Tahun 2021	46
Gambar 3.4	Jumlah Sampel Suplemen Kesehatan Acak MS dan TMS Triwulan II Tahun 2021	46
Gambar 3.5	Jumlah Sampel Kosmetik Acak MS dan TMS Triwulan II Tahun 2021	47
Gambar 3.6	Jumlah Sampel Obat Acak (Terapetik, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) MS dan TMS Triwulan II Tahun 2021	47
Gambar 3.7	Sampel Makanan Acak MS dan TMS Triwulan II Tahun 2021	49
Gambar 3.8	Jumlah Sampel Obat Targeted MS dan TMS Triwulan II Tahun 2021	50
Gambar 3.9	Jumlah Sampel Obat Tradisional Targeted MS dan TMS Triwulan II Tahun 2021	51
Gambar 3.10	Jumlah Sampel Suplemen Kesehatan Targeted MS dan TMS Triwulan II Tahun 2021	51
Gambar 3.11	Jumlah Sampel Kosmetik Targeted MS dan TMS Triwulan II Tahun 2021	52
Gambar 3.12	Jumlah Sampel Obat Targeted (Terapetik, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) MS dan TMS Triwulan II Tahun 2021	52
Gambar 3.13	Jumlah Sampel Makanan Targeted MS dan TMS Triwulan II Tahun 2021	54
Gambar 3.14	Persentase Keputusan Hasil Inspeksi yang Diterbitkan oleh Balai Besar POM di Padang yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang Triwulan II Tahun 2021	63
Gambar 3.15	Persentase Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Diterbitkan oleh Pusat yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang Triwulan II	64

Tahun 2021

Gambar 3.16	Persentase Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Diterbitkan oleh Balai Besar POM di Padang yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan oleh Pusat dan UPT Lain Triwulan II Tahun 2021	64
Gambar 3.17	Persentase Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan Terkait yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang Triwulan II Tahun 2021	65
Gambar 3.18	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha Triwulan II Tahun 2021	69
Gambar 3.19	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor Triwulan II Tahun 2021	69
Gambar 3.20	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I Tahun 2021	73
Gambar 3.21	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II Tahun 2021	77
Gambar 3.22	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II Tahun 2021	80
Gambar 3.23	Jumlah Sampel Obat Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2021	92
Gambar 3.24	Jumlah Sampel Makanan Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2021	96



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Umur	11
Tabel 1.2	Profil SDM Berdasarkan Golongan	12
Tabel 1.3	Profil SDM Berdasarkan Pendidikan	12
Tabel 1.4	Tabel Jumlah Sarana Distribusi dan Sarana Produksi Obat dan Makanan Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	16
Tabel 2.1	Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	31
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran. 2020	33
Tabel 2.3	Kriteria Pencapaian Indikator	39
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Kegiatan Triwulan II Tahun 2021	40
Tabel 3.2	Perbandingan target dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama TW II	41
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I	44
Tabel 3.4	Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Triwulan II tahun 2021	45
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2021	48
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2021	50
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan II Tahun 2021	53
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan II Tahun 2021	60
Tabel 3.9	Capaian Sasaran Kegiatan ke IV	62
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Triwulan II Tahun 2021	63
Tabel 3.11	Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan II Tahun 2021	68
Tabel 3.12	Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang	72

Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan II Tahun 2021

Tabel 3.13	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II Tahun 2021	76
Tabel 3.14	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II Tahun 2021	79
Tabel 3.15	Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021	83
Tabel 3.16	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan V	84
Tabel 3.17	Capaian Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan II Tahun 2021	84
Tabel 3.18	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan II Tahun 2021	87
Tabel 3.19	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Triwulan II Tahun 2021	88
Tabel 3.20	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VI	91
Tabel 3.21	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2021	91
Tabel 3.22	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2021	96
Tabel 3.23	Capaian Indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2021	100
Tabel 3.24	Capaian Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal Triwulan 2 Tahun 2021	104
Tabel 2.25	Rincian nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Padang	104
Tabel 3.26	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan XI	106
Tabel 3.27	Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Triwulan II Tahun 2021	106
Tabel 3.28	Rincian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Padang	107
Tabel 3.29	Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Triwulan II Tahun 2021	108
Tabel 3.30	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja sampai TW II Tahun 2021	110
Tabel 3.31	Realisasi Anggaran per Output triwulan II Tahun 2021	111
Tabel 3.32	Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis TW II Tahun 2021	111



DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan 2021
2. Perjanjian Kinerja 2021
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2021
4. Nilai Pencapaian Sasaran TW II Tahun 2021
5. Capaian RAPK Balai Besar POM di Padang TW II Tahun 2021
6. Pengukuran Efisiensi Kegiatan TW II Tahun 2021

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang telah melakukan tugas dan fungsi sebagai pengawas produk obat dan makanan untuk mewujudkan visi dan misi BPOM. Hasil kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 telah dituangkan dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan pada rencana strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang periode tahun 2020-2024.

Capaian Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2020 diwujudkan dalam 11 (sebelas) sasaran kegiatan dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tahun 2020. Kesebelas sasaran kegiatan tersebut adalah:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan capaian (NPS) 107,48% (baik).
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang (capaian dihitung pada akhir tahun).
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang (capaian dihitung pada akhir tahun).
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan capaian (NPS) 104,21% (baik)
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan capaian (NPS) 138,01% (Tidak dapat disimpulkan)
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan capaian (NPS) 138,96 (Tidak dapat disimpulkan).
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan capaian (NPS) 147,23 (Tidak dapat disimpulkan).

8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal, (capaian dihitung pada akhir tahun).
9. Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal, (capaian dihitung pada akhir tahun).
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan (capaian dihitung pada akhir tahun).
11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel dengan capaian (NPS) 123,84%(Tidak dapat disimpulkan).

Dari kesebelas sasaran kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 memiliki 2 (dua) sasaran dengan kriteria baik, 4 (empat) sasaran dengan kriteria tidak dapat disimpulkan dan, 5 sasaran belum dapat dihitung karena pencapaian dihitung pada akhir tahun. Pencapaian kesebelas sasaran kegiatan tersebut diukur dengan 28 indikator kinerja.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja 11 (sebelas) sasaran kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan telah menyerap anggaran DIPA Balai Besar POM di Padang sampai tanggal 31 Maret tahun 2021 sebesar Rp.15,376,315,465- (Lima belas milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) atau 34,02% dari total pagu anggaran sebesar Rp.45,198,746,000 (Empat puluh lima milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Dari perhitungan efisiensi penggunaan anggaran apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian target *output*, kegiatan yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang belum efisien dengan nilai efisiensi 84%.

BBPOM di Padang Hadir Di Nagari Tanjung Bungo, Kab Lima Puluh Kota Dalam Bimtek Korlap Dan KPPD

Balai Besar POM di Padang menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Koodinator Lapangan (Korlap) dan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) di Nagari Tanjung Bungo, Kec. Suliki, Kab Lima Puluh Kota yang merupakan target intervensi desa stunting

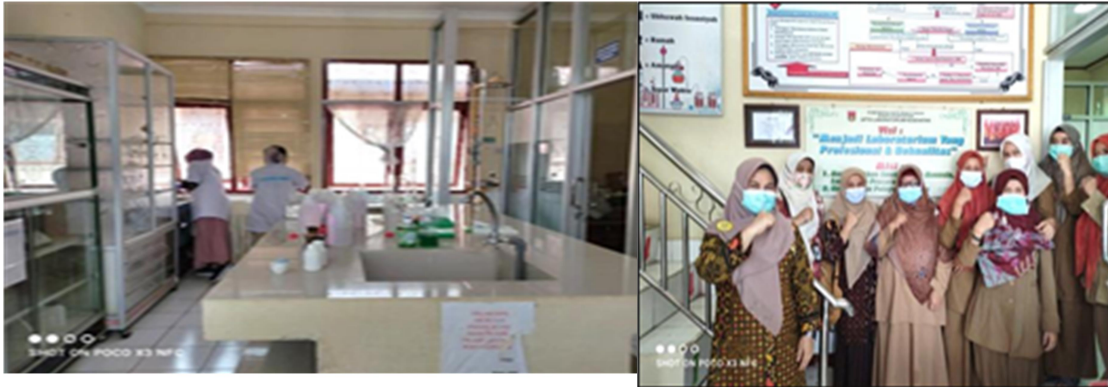
Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Walinagari Tanjung Bungo (31/03 - 01/04) yang dibuka oleh Walinagari, Yefriandi dan hadir oleh 24 orang peserta yang terdiri dari 4 orang Tim KPD & 20 orang KKPD (6 orang kader keluarga, 5 orang kader masyarakat, 5 orang kader sekolah dan 4 orang kader PKP) dengan Narasumber berasal dari BBPOM di Padang



Koordinasi Balai Besar POM di Padang dengan Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bukittinggi

Balai Besar POM di Padang melakukan koordinasi dengan Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bukittinggi. Kunjungan Tim Substansi Pengujian yang diketuai oleh Hilda Murni dan tim disambut oleh Kepala Labkesda, Ibu Sri Yus Angelia, SKM.,MM dan tim. Dalam kunjungan tersebut, Ibu Hilda Murni melakukan pembahasan bersama tentang perkembangan sarana dan prasarana labkesda Bukittinggi terkait peningkatan kapasitas dan kapabilitas Laboratorium kesehatan masyarakat (Labkesmas) terutama pengujian produk pangan, mengingat Kota Bukittinggi adalah icon wisata kuliner propinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan amanah UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pengawasan post market produk PIRT adalah tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.





BBPOM di Padang Lakukan Survey Pasar Di Kabupaten Tanah Datar

Senin, 5 April 2021, Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang melaksanakan kegiatan Survei Pasar dalam Rangka Intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Pasar Simabur, Kabupaten Tanah Datar. Tim BBPOM di Padang melakukan koordinasi dengan petugas Pasar Simabur, yang diwakili oleh Afriamon dan Indra Putra tentang tahapan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021 kepada petugas pasar.



Kegiatan dilanjutkan dengan mengunjungi pedagang di pasar yang berpotensi menjual bahan berbahaya dan pemberian informasi serta edukasi terkait pangan yang mengandung bahan berbahaya dan CEK KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa).

Advokasi Lintas Sektor Keamanan Pangan Terpadu Berbasis Komunitas Secara Terpadu Di Kota Pariaman

Balai Besar POM di Padang melaksanakan Advokasi Lintas Sektor Keamanan Pangan Terpadu Berbasis Komunitas Secara Terpadu tanggal 7 april 2021 bertempat di Hotel Shafari Inn kota Pariaman dalam rangka memperkuat koordinasi & membangun kembali komitmen Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah serta dilakukan penandatanganan komitmen keamanan pangan terpadu oleh Pemerintah Kota Pariaman dan rencana target desa, pasar dan sekolah yang disepakati untuk dilakukan intervensi Tahun 2021 dengan Desa Pangan Aman dengan Desa terpilih.



Dengan terlaksananya kegiatan Advokasi Keamanan Pangan Terpadu ini menjadi momentum awal pelaksanaan intervensi keamanan pangan terpadu untuk menciptakan Kota Pangan Aman di Kota Pariaman.

Pelatihan Analisis Instrumen Dalam Rangka Menjamin Mutu Hasil Pengujian

Suatu laboratorium dinyatakan sebagai laboratorium yang handal adalah apabila laboratorium mampu menjamin mutu hasil pengujian. Hal ini harus didukung oleh SDM yang kompeten dan peralatan yang terpelihara, terawat dan terverifikasi. Untuk meningkatkan kompetensi SDM maka tgl 19 April-23 April diadakan Pelatihan Analisis Instrumen yang materinya telah dilaksanakan secara daring oleh P3OMN dengan judul



"Implementasi Pelatihan Analisis Instrumen Identifikasi Logam OT dan SK secara ICP MS dan Pelatihan Perawatan Alat ICP MS "



Desk Registrasi Pangan Olahan di Padang

Balai Besar POM di Padang bersama Direktorat Registrasi Pangan Olahan telah melaksanakan Kegiatan Desk Registrasi Pangan Olahan Dalam Rangka Percepatan Sertifikasi Mendukung Usaha Kreatif Indonesia Tutorial E-Registrasi. Para pelaku usaha dibantu melakukan pendaftaran e-regnya oleh Petugas Evaluator dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan.





Pelaku usaha berkesempatan untuk melakukan konsultasi secara khusus sampai mendapatkan izin edarnya. Diakhir kegiatan Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan BBPOM di Padang telah berhasil diterbitkan 32 izin edar MD, 31 finalisasi NIE dan 5 pendaftaran akun perusahaan.

Bimtek Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Di Kota Sawahlunto

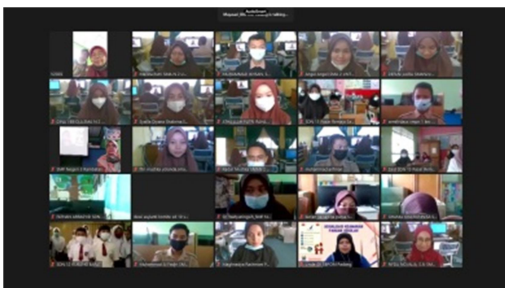


Kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dilaksanakan pada hari Selasa tanggal (20/4/2021) secara Luring di UPT Pasar Kota Sawahlunto, Bimtek dihadiri oleh Kepala UPT Pasar, Petugas Pengelola pasar dan Dinas kesehatan Kota Sawahlunto dengan paparan materi terkait pengawasan bahan berbahaya di Pasar Tradisional dan simulasi Pengujian cepat Identifikasi Bahan Berbahaya dan Pangan yang mengandung Bahan Berbahaya yang ditujukan untuk membekali Petugas Pasar agar mampu melakukan pengujian secara sederhana untuk dapat digunakan sebagai petunjuk awal adanya bahan berbahaya di dalam pangan

Melalui kegiatan Bimtek ini dapat meningkatkan pemahaman dan kepedulian pengelola pasar, lintas sektor, maupun stakeholder terkait untuk mewujudkan Pasar Aman bebas dari Bahan Berbahaya.

Bangkitkan Semangat Menjaga Keamanan Pangan Guru Dan Siswa, Balai Besar POM di Padang Melaksanakan Sosialisasi Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah Tahun 2021

Sosialisasi Keamanan Pangan di Sekolah dilakukan secara daring pada hari Sabtu, 24 April 2021 yang diikuti oleh Guru dan siswa dari sekolah yang menjadi target intervensi keamanan pangan pada tahun 2021 yaitu Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, Kab. 50 Kota dan Kab. Tanah Datar dengan membagi menjadi 2 shift sebanyak 486 orang.



Pada kegiatan ini dilaksanakan pengisian kuisioner pengetahuan, sikap & perilaku tentang keamanan pangan oleh siswa, pemberian materi tentang keamanan pangan, Produk Informasi Keamanan Pangan yang diserahkan melalui Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota masing-masing peserta. Mengakhiri kegiatan dilakukan permainan kahoot untuk peserta.

Bimtek Program Keamanan Pangan Sekolah di Kabupaten Tanah Datar

Pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 BBPOM di Padang melaksanakan kegiatan bimbingan teknis



keamanan pangan sekolah di Kab Tanah Datar. Kegiatan diikuti oleh 20 orang peserta terdiri dari guru, komite sekolah, perwakilan Dinas Kesehatan dan perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar.

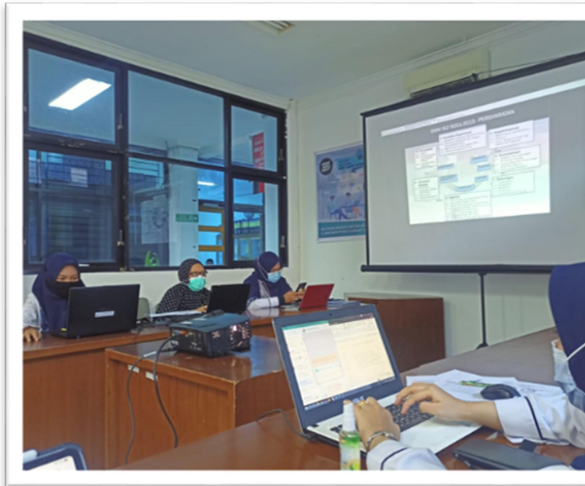
Bimtek yang menyampaikan materi terkait keamanan pangan di sekolah ini juga dilengkapi dengan pemberian bahan edukasi yang dapat menunjang sosialisasi keamanan pangan di sekolah nantinya dan Semoga melalui bimbingan teknis ini yang akan mejadi kader keamanan pangan sekolah, pangan yang dikonsumsi

oleh anak – anak kita dapat terjaga keamanannya

Balai Besar POM di Padang Kaji Ulang Dokumen dan Awareness QMS ISO 9001:2015



Balai Besar POM di Padang melaksanakan Kaji ulang dokumen QMS pada tanggal 28 sd 29 April 2021. Kaji ulang dokumen QMS dibuka oleh Kepala Bagian Tata dan dihadiri oleh seluruh anggota tim penjaminan mutu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang. Kaji Ulang Dokumen QMS dilaksanakan untuk dapat melakukan penyesuaian dengan dokumen QMS BPOM terbaru dalam rangka konsistensi penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.



Wujudkan Pasar Pangan Aman Dari Bahan Berbahaya Di Kota Pariaman

Dalam rangka mewujudkan Pasar Pangan Aman di kota Pariaman, BBPOM di Padang menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas Pengelola Pasar yang nantinya akan



bertugas sebagai pengawas bahan berbahaya pada Kamis, 29 April 2021, bertempat di gedung Pasar Tradisional Kota Pariaman. Kegiatan yang merupakan tahapan dari intervensi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2021 ini diselenggarakan dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Pemaparan materi Pengetahuan Bahan Berbahaya, Sampling dan Pengujian Cepat dan Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian oleh petugas BBPOM di Padang serta dilakukan demo Rapid Test Kit oleh Tim BBPOM di Padang.

Pangan Aman, Ibadah Lancar



Kegiatan Intensifikasi Pangan dan Parcel dilaksanakan selama bulan Ramadhan sampai seminggu setelah hari Raya Idul Fitri tahun 2021 bersama dengan berbagai instansi terkait Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Pangan.

Pengawasan Pangan makanan pabukoan yang dijual di pasar dan difokuskan pada makanan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya (formalin, boraks, rhodamin B, methanil yellow). Pengawasan Parcel dilakukan pada sarana distribusi dan difokuskan pada makanan yang dicurigai tanpa izin edar (TIE), makanan yang kemasannya rusak atau penyok dan makanan yang labelnya tidak sesuai.



INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN MENJELANG BULAN RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H DI WILAYAH LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA PAYAKUMBUH



Dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari peredaran produk pangan olahan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), khususnya selama Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H, maka Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kota Payakumbuh melakukan Kegiatan Intensifikasi pengawasan pangan. Kegiatan ini dilakukan dari Tanggal 5 April 2021 sampai 21 Mei



2021 di 4 Kabupaten / Kota wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh (Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota). Kegiatan ini mencakup pengawasan sarana distribusi pangan dan pengawasan pangan buka puasa atau takjil. Selain itu juga diberikan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada pelaku usaha agar menerapkan Cara Ritel Pangan yang baik.

Loka POM di Kabupaten Dharmasraya Intesifikasi Pangan Selama Ramadhan aan Menjelang Idul Fitri 1442 H

Loka POM di Kabupaten Dharmasraya melaksanakan intensifikasi khusus pengawasan pangan selama ramadhan dan menjelang idul fitri 1442 H/tahun 2021, fungsi pemeriksaan melakukan pengawasan ke beberapa sarana ritel pangan di kabupaten Dharmasraya.

Prioritas pengawasan yang dilakukan yaitu pada sarana distribusi pangan yang memiliki track record pelanggaran/temuan pangan tanpa izin edar, produk pangan olahan yang merupakan bahan pokok, produk pangan tanpa izin edar, rusak dan kedaluarsa serta



Pembangunan Lab BSL 2

Kunjungan ke Laboratorium Balai Veteriner Bukittinggi. Kepala Balai Besar POM di Padang bersama Kabag TU dan Koordinator Substansi Pengujian beserta tim melakukan kunjungan koordinasi dalam rangka pembangunan Lab BSL 2 Covid-19 pada tanggal 17 Mei 2021. Laboratorium Veteriner



Selain kegiatan pengawasan terhadap pangan olahan, juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan jajanan untuk berbuka puasa/pabukoan/takjil selama bulan ramadhan. Pada tanggal 26 April 2021, Loka POM di Kabupaten Dharmasraya bersama Bupati Kabupaten Dharmasraya dan ODP terkait melakukan kunjungan ke salah satu pasar pabukoan di Nagari Sungai Duo, Kec. Sitiung. Tim Loka POM di Kabupaten Dharmasraya melakukan sampling Pabukoan dan uji cepat di mobil laboratorium keliling.

Kunjungan ke Laboratorium Balai Veteriner Bukittinggi dalam Rangka



yang sudah terlebih dulu melakukan pengujian Covid-19. KasubBag TU menyampaikan bahwa pengujian sudah dilakukan sejak tahun 2020. Dan Balai Besar POM di Padang akan membuat Laboratorium BSL 2 untuk melakukan pengujian Biologi Molekuler (Uji Covid 19, Uji DNA Porcine)



Pelatihan Fasilitator Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya

Balai Besar POM di Padang melakukan upaya untuk dapat memperluas jaringan pengawasan melalui pembentukan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan. Pelatihan yang diadakan selama 3 hari pada tanggal 20 s/d 22 Mei 2021 dan diikuti



oleh 25 orang peserta terdiri dari petugas pasar, kepala UPTD Pasar dari beberapa Kabupaten Kota di Sumatera Barat serta petugas dari Balai Besar POM di Padang. Melalui pelatihan ini diharapkan fasilitator dapat melakukan inisiasi penerapan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di daerahnya masing – masing secara mandiri.



AUDIT INTERNAL ISO 9001:2015



Demi mewujudkan komitmen dan meningkatkan efektifitas penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, Loka POM di Kota Payakumbuh melaksanakan audit internal selama 2 (dua) hari sejak tanggal 10 – 11 Mei 2021. Pelaksanaan audit internal diawali dengan *entry meeting* di Ruang Pertemuan Loka POM Payakumbuh pada Senin, 10 Mei 2021 yang dibuka oleh Kepala Loka POM di Kota Payakumbuh, Iswadi, S.Farm., Apt. Pelaksanaan audit internal melibatkan 2 (dua) orang auditor dari Loka POM di Kota Payakumbuh dan 1 (satu) orang lead auditor internal dari BBPOM di Padang. Kepala Loka POM di Kota Payakumbuh mengharapkan audit internal ini akan memicu perbaikan yang berkelanjutan dalam pelaksanaan proses bisnis yang dijalankan di Loka POM di Kota Payakumbuh

BBPOM di Padang Laksanakan Penyuluhan Komunitas Pasar di Kab. 50 Kota



Dalam rangka pelaksanaan program Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang melaksanakan kegiatan Penyuluhan kepada Komunitas Pasar di Kab Lima Puluh Kota (22/06) yang dibuka oleh Plt.Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DisdagkopUKM) Kab. 50 Kota Ayu Mitria Fadri. Pelaksanaan kegiatan bertempat di Aula Shago Bungsu II dengan mengundang 35 orang komunitas Pasar Taram yang menjadi pasar intervensi BBPOM di Padang tahun 2021. Dalam kegiatan

penyuluhan ini disampaikan materi terkait pengelolaan pasar aman,& Keamanan Pangan di Pasar Tradisional dan

hasil pengawasan yang telah dilakukan di Pasar Taram oleh BBPOM di Padang melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tahap 1 yang telah dilaksanakan sebelumnya.

AUDIT INTERNAL SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015 BALAI BESAR POM DI PADANG

Balai Besar POM di Padang melaksanakan audit internal sistem manajemen mutu dalam rangka konsistensi penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang berintegrasi dengan ISO 17025:2017, SPIP, dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 3 sd 4 Juni 2021. Kegiatan audit internal dimulai dengan *open meeting* (03/06) yang dibuka oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. Hilda Murni, Apt., MM, dihadiri oleh Koordinator, Subkoordinator, Tim QMS, Tim SPIP dan RB serta Tim Auditor Internal di Aula Balai Besar POM di Padang.

Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 diaudit oleh lima auditor internal. Tiga auditor dari Balai Besar POM di Medan dan dua auditor dari Balai Besar POM di Padang. Proses audit berlangsung dengan lancar selama dua hari mulai dari *open meeting* sampai *exit meeting*.

Pada *exit meeting* (04/06), Tim Auditor Internal Badan POM menyampaikan hasil audit yang serta hal-hal yang perlu menjadi perhatian kepada Ketua Tim Penjaminan Mutu Balai Besar POM di Padang untuk segera ditindaklanjuti sebagai bentuk perbaikan dalam rangka peningkatan pelaksanaan sistem manajemen mutu di Balai Besar POM di Padang. Diharapkan dengan hasil audit internal penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dapat diimplementasikan dengan lebih baik dan konsisten serta berkesinambungan.

Penyebaran Informasi “Yuk Jaga Keamanan Pangan Anak Sekolah (PJAS)”



Kegiatan Penyebaran Informasi ini dilaksanakan dalam menyambut Hari Keamanan Pangan Sedunia yang jatuh pada tanggal 7 Juni. Tema yang diusung pada kegiatan penyebaran informasi ini adalah “Yuk Jaga Keamanan Pangan Anak Sekolah (PJAS)” dimana pengetahuan akan pangan jajanan anak sekolah ini perlu ditingkatkan. Pengetahuan tentang Kesehatan dan keamanan makanan sangat penting diberikan, pengetahuan tentang memilih makanan yang sehat, terbebas dari bahaya fisik, kimia dan biologi, proses pengolahan pangan yang benar dan sehat, serta penggunaan bahan tambahan pangan yang sesuai dengan aturan. Penyebaran berlangsung di UPTD SDN 01 Pangkalan pada tanggal 3 Juni 2021 dan dihadiri oleh lebih kurang 40 peserta, dibuka langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Lima Puluh Kota Ibu Nevi Zulviani dan dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Indrawati.

Bimtek Komunitas Desa dan Usaha Pangan Desa di Kota Sawahlunto

Rangkaian Kegiatan Desa Pangan Aman dilanjutkan dengan melakukan Bimtek Komunitas Desa dan Usaha Pangan Desa di Kota Sawahlunto pada hari Selasa, 8 Juni 2021 sebanyak 50 orang yang telah didaftarkan oleh kader keamanan pangan desa di masing-masing daerah intervensi di kota Sawahlunto yaitu Desa Sikalang, Kelurahan Saringan dan Desa Silungkang Duo yang terdiri dari Komunitas. Bimtek Komunitas Desa dibuka oleh masing-masing kepala desa kemudian dilanjutkan dengan



pemaparan materi-materi tentang keamanan pangan oleh kader keamanan pangan desa yaitu 5 kunci keamanan pangan, perbedaan keracunan dengan alergi dan intoleransi, juga pemahaman tentang stunting.

Intensifikasi Pengawasan Pangan di Kota Pariaman dalam Rangkaian Program Desa Pangan Aman

Balai Besar POM di Padang melakukan intensifikasi pengawasan pangan di Kota Pariaman, Jum'at, 11 Juni 2021. Kegiatan ini dilakukan sebelum intervensi

keamanan pangan secara intensif kepada komunitas desa dengan cara melakukan sampling terhadap produk makanan yang ada di masing-masing desa intervensi Kota

Pariaman yaitu Desa Sungai Pasak & Kelurahan Kampung Perak untuk dilakukan Pengujian kandungan bahan berbahaya yang terdiri dari Borax, Formalin, Rhodamin B, dan Metahnil Yellow

dengan menggunakan rapid test kit. didapatkan 18 sampel dicurigai mengandung borax, sehingga harus diuji lanjut di Laboratorium Balai Besar POM di Padang



Peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia Tahun 2021



Peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia Tahun 2021 dimaknai oleh Badan POM untuk mendukung UMKM Pangan menuju “Indonesia Spice Up The World”. Program ini untuk mendorong kuliner Indonesia, mencakup produk bumbu dan rempah, agar dapat masuk pasar mancanegara.



Pelaku Usaha UMKM Pangan Dan Bersama Kepala Balai Besar POM Di Padang Secara Daring Mengikuti Peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia Tahun 2021 Yang Diselenggarakan Oleh Badan POM. Pelaku Usaha Yang Didampingi Petugas Balai Mengikuti Desk Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB).

Operasi Penindakan Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Padang



BBPOM di Padang melakukan operasi penindakan pada bulan Juni 2021 bersama tim Polda Sumbar dan berhasil menghentikan produksi dan peredaran kosmetik Tanpa Izin Edar yang beredar di kota Padang



Diketahui bahwa produk kosmetik tanpa izin edar tersebut dikemas kembali menggunakan kemasan dan label sendiri. Produk kosmetik Tanpa Izin edar ini telah beredar hingga keluar provinsi Sumatera Barat. Produk kosmetik tanpa Izin edar telah diamankan oleh petugas di kantor BBPOM di Padang sehingga produk tersebut tidak beredar lagi.

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Padang Triwulan II Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Triwulan II Tahun 2021 yang merupakan tahun kedua Renstra Balai Besar POM di Padang 2020-2024 dan dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Laporan Kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana strategis dan Perjanjian Kinerja termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam rnencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Analisis/ Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja performance (GAP) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Oleh karena itu, pada penyusunan Laporan kinerja, harus mengikuti prinsip- prinsip yang lazim, yaitu laporan harus disusun jujur, obyektif, akurat, dan transparan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP

diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan stakeholder.

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja pada level instansi/ Unit Kerja Eselon I/ Satuan Kerja harus melaporkan kinerjanya. Hal ini mengingat tujuan Pelaporan Kinerja adalah .

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

Manfaat dari Laporan Kinerja adalah untuk :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menjelaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia, BPOM dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Sehubungan dengan hal tersebut, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BPOM diatur sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM yang telah mengalami perubahan dari peraturan Nomor 29 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Untuk membantu pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Barat selain Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang terdapat 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis yaitu Loka Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh dan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Dharmasraya.

Wilayah pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 19 (Sembilan belas) Kabupaten/Kota dengan pembagian wilayah kerja pengawasan obat dan makanan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang meliputi 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota yang terdiri dari Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Sawah Lunto, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok.

Untuk 6 (enam) Kabupaten/Kota lainnya menjadi wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan yaitu:

1. **Loka Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh**, dengan wilayah kerja Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. **Loka Pengawas Obat dan Makanan di Dharmasraya**, dengan wilayah kerja Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang merupakan Unit Pelaksana Teknis dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas: Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing – masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan *sampling* Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan obat dan makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;

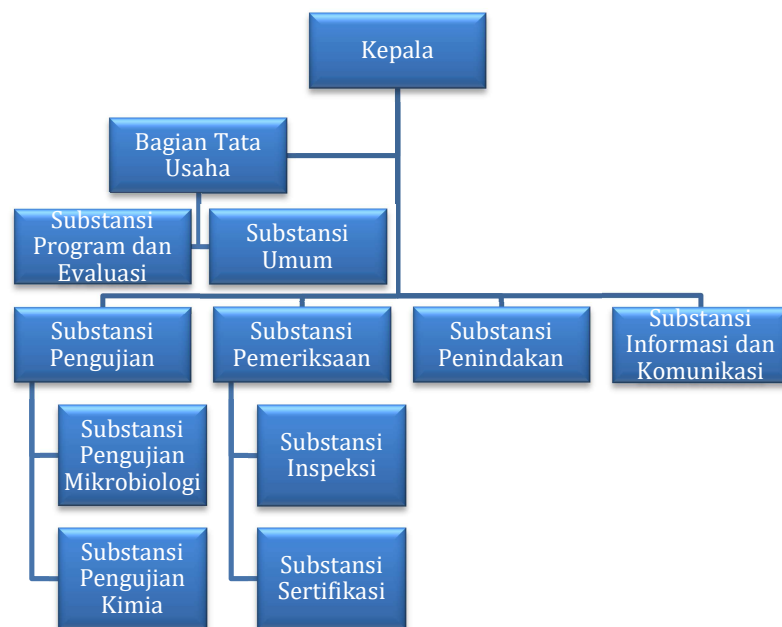
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, struktur organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang adalah sebagai berikut :

Susunan organisasi Balai Besar POM terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional





Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Sesuai dengan struktur organisasi, kegiatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan, kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- e. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional

sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan tinggi Pratama, jabatan Administrator dan jabatan pengawas masing-masing. Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing

STRUKTUR ORGANISASI LOKA POM



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan

Tugas Loka Pengawas Obat dan Makanan adalah Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.4 ISU STRATEGIS

1. Pandemic Covid-19

Belum banyak pengetahuan valid tentang pandemic virus corona yang menjadi penyebab salah satu dampak kematian ekstrim di berbagai negara. Penyebaran virus corona menjadi ancaman serius bagi dunia sejak pertama dilaporkan akhir 2019 yang telah menginfeksi lebih dari satu per empat juta orang. Perlu diketahui bahwa virus corona bukanlah flu biasa. Virus corona menyebabkan penyakit dengan gejala yang berbeda, menyebar dan membunuh lebih mudah serta berasal dari virus yang sangat berbeda dengan penyebab flu biasa.

Pandemi virus Corona (COVID-19) dengan penyebaran yang masif, membuat sebagian besar masyarakat di dunia tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Itu membuat banyak orang bertanya-tanya kapan pandemi ini akan berakhir. Dalam menyikapi pandemic ini Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis dalam rangka

mempercepat penanggulangan wabah Covid-19 dimulai dari Pembentukan gugus tugas Covid-19 secara Nasional dan berjenjang sampai dengan kebijakan *refocusing* anggaran dan kegiatan di tingkat kementerian lembaga sampai pada tingkat pemerintahan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia melakukan tindakan cepat dengan mengeluarkan Surat Edaran Percepatan Perubahan anggaran melalui *refocusing* kegiatan terhadap penanganan pandemic covid-19 ini, begitu juga halnya dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang dalam menyikapi kebijakan pemerintah tersebut melakukan *refocusing* kegiatan untuk penanggulangan pandemic covid-19 ini khususnya di Sumatera Barat. Adapun bentuk *refocusing* kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang seperti pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi Pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, pembuatan Hand Sanitizer serta peningkatan imunitas pegawai.

2. Desktop inspection sarana produksi dan distribusi

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Pandemi Covid-19, Balai Besar POM di Padang menyelenggarakan Sertifikasi *online* Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) pada sejumlah Pedagang Besar Farmasi di wilayah Sumatera Barat, dengan menggunakan aplikasi *zoom meeting* atau *whatsapp*. *Desktop inspection* tersebut diikuti oleh petugas inspeksi dan sertifikasi Balai Besar POM di Padang dengan pelaku usaha. Kegiatan ini juga dilaksanakan pada audit sarana dalam rangka sertifikasi pangan olahan dan audit sarana dalam rangka sertifikasi CPOTB. Kegiatan desk inspection dapat diikuti oleh pelaku usaha dengan lancar karena komunikasi yang baik antara pelaku usaha dan petugas balai serta tersedianya sarana dan prasarana online di wilayah kerja balai Besar POM di Padang.

3. Pengawasan Keamanan dan Mutu Vaksin COVID-19 Sebelum dan Selama Peredaran

Sejak kedatangan vaksin Covid-19 di Indonesia pada 6 Desember 2020 (tahap I) dan 31 Desember 2020 (tahap II), Balai Besar POM di Padang ikut mengawal pendistribusian vaksin Covid-19 sampai ke kabupaten/Kota. Dimulai dari rapat persiapan penerimaan vaksin Covid-19 di Provinsi bersama Dinas terkait, pengecekan sarana distribusi di Provinsi hingga pengecekan sarana distribusi di masing-masing IFK Kabupaten/Kota. Pada proses penerimaan vaksin di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang dikirim melewati jalan darat, Balai Besar POM di Padang melakukan pengecekan kesesuaian dokumen serta

kesesuaian suhu tempat penyimpanan vaksin CoronaVac. Vaksin CoronaVac yang diproduksi oleh Sinovac Life Science CO., Ltd, Beijing, China. bekerja sama dengan PT. Bio Farma mendapatkan izin penggunaan dalam kondisi darurat (*Emergency Use Authorization/EUA*) dari Badan POM. Makna dari pemberian *EUA* oleh Badan POM adalah bahwa vaksin tersebut telah melalui serangkaian proses evaluasi yang dilakukan oleh Badan POM bersama dengan para ahli di bidang vaksin terhadap keamanan, khasiat dan mutu vaksin sebelum digunakan oleh masyarakat.

Proses pendistribusian vaksin Covid-19 dilakukan oleh PT Bio Farma ke IFP Provinsi yang selanjutnya akan didistribusikan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan melalui IFK Kabupaten/Kota. Balai Besar POM di Padang secara proaktif memperkuat proses pengawasan distribusi vaksin dengan cara melakukan pengawasan di sarana distribusi IFK masing-masing Kabupaten/Kota guna memastikan mutu vaksin tetap terjaga baik hingga digunakan untuk masyarakat. Hal ini penting karena vaksin merupakan produk yang rentan mengalami kerusakan jika suhu penyaluran dan penyimpanan tidak sesuai persyaratan, yaitu pada suhu 2°C-8°C. Dalam rangka mengawal keamanan vaksin tersebut Balai Besar POM di Padang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan masing-masing Kabupaten/Kota serta Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas dan Komda PP KIPi) untuk melakukan KIPi. Pemantauan dilakukan terhadap pelaporan yang diterima dari tenaga kesehatan atau industri farmasi pemilik vaksin atau masyarakat untuk memastikan keamanan vaksin setelah beredar.

4. Klaim Produk Herbal yang Dapat Menyembuhkan Pasien COVID-19

Sehubungan dengan makin maraknya pemanfaatan produk herbal, khususnya produk yang disetujui klaim khasiat/manfaatnya untuk membantu memelihara daya tahan tubuh yang kemudian dikaitkan dengan upaya pencegahan dan pengobatan penyakit COVID-19, Badan POM RI memberikan penjelasan bahwa untuk Obat herbal yang telah memiliki Nomor Izin Edar (NIE) Badan POM maka produk tersebut telah dilakukan evaluasi terhadap aspek keamanan, khasiat dan mutunya. Klaim khasiat suatu obat herbal harus dibuktikan, baik berdasarkan data empiris atau secara ilmiah melalui uji pra klinik dan uji klinik. Apabila suatu produk herbal terbukti berkhasiat untuk mengobati suatu penyakit, maka klaim khasiat tersebut akan tertera pada label/desain kemasan produk. Balai Besar POM di Padang telah melakukan pengawasan terhadap produk herbal yang diklaim dapat membantu memelihara daya tahan tubuh yang kemudian dikaitkan dengan upaya pencegahan dan pengobatan penyakit Covid-19. pengawasan dilakukan dengan memantau

produk herbal yang beredar di sarana distribusi di wilayah Sumatera Barat dan memastikan produk herbal yang beredar memiliki Nomor Izin Edar (NIE) sehingga aman dikonsumsi.

5. Balai Besar POM di Padang Terus Dukung Peran Strategis UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Nasional

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peran strategis dalam menyediakan kebutuhan untuk masyarakat Indonesia. Peran UMKM ketika ekonomi merosot, kembali terlihat saat Indonesia terkena dampak pandemi Covid-19. UMKM mampu menjadi *bumper* ekonomi dan merupakan pilihan pengalihan sumber daya ekonomi ketika sektor lain cenderung menurun. Peran UMKM yang sangat strategis ini perlu didukung dengan penguatan kapasitas UMKM untuk menghasilkan produk berkualitas secara konsisten serta aman dikonsumsi oleh masyarakat sehingga dapat bersaing di dunia Internasional.

Pendampingan kepada pelaku usaha di Provinsi Sumatera Barat telah berhasil dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan Loka Pengawas Obat dan Makanan dengan cara pembinaan langsung ke sarana produksi, bimtek dan pelatihan terhadap pelaku usaha. Juga dilakukan pengawasan terhadap sarana produksi dan proses produksi serta bimbingan langsung, e-registrasi pada sistem hingga terbitnya izin edar.

Kemitraan Balai Besar POM di Padang dan Loka Pengawas Obat dan Makanan dengan lintas sektor terkait telah ditingkatkan serta pembinaan dan pendampingan terkait dengan proses izin edar dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga pelaku usaha pada akhirnya menghasilkan produk memiliki izin edar yang dapat menjamin mutu, keamanan dan manfaat serta memiliki daya saing yang tinggi.

6. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik bidang kesehatan.

Pemerintah pusat dan daerah memiliki fungsi dan tugas masing-masing dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Kebijakan DAK Non Fisik Badan POM merupakan bentuk pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Dengan luasnya cakupan wilayah pengawasan pangan, jenis pangan yang sangat beragam, terbatasnya kemampuan industri pangan dalam menghasilkan produk pangan yang aman, terutama industri rumah tangga (IRTP) dan rendahnya tingkat kepatuhan fasilitas pelayanan kefarmasian yang sesuai

dengan standar maka diperlukan pengawasan bersama pusat dan daerah untuk meningkatkan efektifitas pengawasan dan cakupan pemeriksaan.

BPOM sebagai koordinator sesuai dengan Inpres No.3 Tahun 2017 dan Permendagri No.41 Tahun 2018 telah melaksanakan program ini. Arah Kebijakan DAK Nonfisik Dana BOK Pengawasan Obat dan Makanan adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat), Industri Rumah Tangga Pangan serta pengawasan makanan minuman Industri Rumah Tangga (IRT) sesuai standar dan persyaratan. Badan POM telah menyalurkan kepada 12 kabupaten/Kota di Sumatera Barat Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dikawal oleh Balai Besar POM di Padang. Dan berdasarkan hasil evaluasi DAK Non Fisik Bidang Pengawasan Obat dan Makanan TA. 2020 dan hasil self assessment yang dilakukan terhadap 319 Kabupaten/Kota maka terpilih 3 Dinkes yang merupakan 10 Dinkes terbaik Kabupaten/Kota yaitu Kota Pariaman, Pasaman Barat dan Pesisir Selatan. Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan fasyanfar sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, meningkatkan validitas fasyanfar dan meningkatkan pemahaman tenaga kefarmasian di fasyanfar terhadap standar, persyaratan dan ketentuan terkait pemngelolaan obat. Pada pengawasan pangan akan dapat meningkatkan keamanan dan produk IRT yang beredar sehingga dapat bersaing di pasar modern baik pasar domestic maupun internasional.

7. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai Besar POM di Padang melaksanakan reformasi birokrasi (RB) berpedoman pada SK Menpan RB nomor 25 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Sasaran RB 2020-2024 yaitu adalah Birokrasi yang bersih, akuntabel, capable dan pelayanan publik. Pada tahun 2019 BBPOM di Padang meraih penghargaan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Implementasi RB yang dilakukan Balai Besar POM dalam rangka mempertahankan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Padang terhadap 6 faktor pengungkit yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, sebagai wujud pembangunan Zona Integritas pada Balai Besar POM di Padang telah berhasil mempertahankan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

1.5 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang telah menyusun rencana strategis Tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, program, dan kegiatan berikut target *output* yang akan dicapai.

Seiring dengan kebutuhan organisasi, Rencana strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2020-2024 telah mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya yang diselaraskan dengan penguatan kelembagaan BPOM melalui restrukturisasi organisasi. Penguatan kelembagaan BPOM diawali dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang dilanjutkan dengan Peraturan BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BPOM.

Dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja UPT BPOM, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di provinsi Sumatera Barat.

1.6 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1.6.1 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang di dukung dengan sarana prasarana dan sumber daya yaitu :

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang per 31 Maret 2021 adalah 111 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Umur

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Umur

Umur	Jumlah
20 - 24 Th	1
25 - 29 Th	13
30 - 34 Th	20
35 - 39 Th	20
40 - 44 Th	11
45- 49 Th	13
50 - 60 Th	33
Total	111

b. Golongan

Tabel 1.2. Profil SDM Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1.	1	1
2.	2	2
3.	4	4
4.	1	1
5.	4	4
6.	19	20
7.	14	14
8.	16	16
9.	26	25
10.	15	16
11.	9	10
Total		111

Tabel 1.3. Profil SDM Berdasarkan Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	13
2.	Apoteker	32
3.	S1 Biologi	2
4.	S1 lain	29
5.	D3	16
6.	SMF	8
7.	SMAK	3
8.	SLTA Umum	7
9.	SLTA Kejuruan	0
10	SLTP	1
Total		111

Untuk mencapai target kinerja dalam melakukan pengawasan obat dan makanan Trwulan I tahun 2021, terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan beban kerja. Kekurangan tersebut dibantu dengan tenaga PPNPN Sebanyak 39 Orang. Terdiri atas Kelompok Substansi Pengujian 9 (Sembilan) Orang , Kelompok Substansi Pemeriksaan 2 (dua) Orang , Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi 3 (Tiga) Orang, Bagian Tata Usaha terdiri dari 24 (dua puluh empat) Orang dan Kelompok Substansi Penindakan 1 (satu) Orang , Tega PPNPN untuk Loka POM di Kota Payakumbuh 8 (delapan) Orang , dan Loka POM diKab. Dharmasraya 5 (Lima) Orang.

2. Sarana Gedung

Sarana dan Prasarana tanah dan bangunan gedung Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang seluas 3167 m2 sejak tahun 2018 sudah memiliki sertifikat hak milik atas nama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang. Untuk pengembangan gedung kantor, luas tanah sudah tidak memungkinkan lagi karena masing-masing sisi sudah berbatasan langsung dengan jalan raya dan kantor Pemerintahan Kota Padang. Salah satu solusi pengembangan bangunan Balai Besar POM di Padang adalah dengan renovasi bangunan menjadi bertingkat atau pindah lokasi. Saat ini bangunan kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang digunakan seluas 3186 m2.

Rumah dinas Kepala Balai Besar POM di Padang terletak tidak jauh dari lokasi kantor dengan luas 147,1 m2. Tanah yang digunakan untuk membangun rumah dinas tersebut sejak tahun 2018 juga telah bersertifikat atas nama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang.

Untuk 2 (dua) UPT yaitu Loka Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh dan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Dharmasraya yang sejak dibentuk pada bulan September tahun 2018 yang lalu masih menggunakan sarana bangunan dengan status sewa. Sarana dan prasarana Loka POM di Payakumbuh menggunakan gedung kantor pinjaman dari Pemda setempat. Sejak tanggal 4 November 2019 Loka POM di Payakumbuh telah pindah ke lokasi kantor lebih luas yaitu menggunakan bangunan Universitas Andalas dengan status pinjam pakai selama 2 tahun, sedangkan Loka POM di Dharmasraya menggunakan gedung kantor rumah toko dengan status sewa pakai.

3. Sarana Komunikasi dan Informasi

Pada tahun 2011 Balai Besar POM di Padang mendapatkan bantuan infrastruktur TIK dari Pusdatin BPOM salah satunya adalah seperangkat alat *Video Conference* yang digunakan untuk

melakukan *Video Call* dengan BPOM dan Balai Besar POM/Balai POM di seluruh Indonesia sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar.

Setiap tahunnya dilakukan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur TIK di Balai Besar POM di Padang. Peningkatan *e-government* setiap tahun menuntut pekerjaan berbasis teknologi informasi menggunakan beberapa aplikasi/sistem informasi yang dibangun baik oleh internal Balai Besar POM di Padang sendiri ataupun dari eksternal, dan terus di *update*. Hal ini menyebabkan kebutuhan internet pun makin tinggi. Oleh karena itu pada tahun 2017, Balai Besar POM di Padang menambah jaringan internet menggunakan ISP (*Internet Service Provider*) *Speedy Indihome* 100 Mbps.

Pada Tahun 2019, Pusdatin memutus langganan VPN untuk semua BB/BPOM, dan menyerahkan kepada masing-masing BB/BPOM untuk berlangganan internet ke ISP yang tersedia di daerah masing-masing. BBPOM di Padang sendiri memutuskan berlangganan dengan ASTINET (telkom) berkapasitas 10 Mbps dan 1 IP publik. Selain itu Balai Besar POM di Padang juga memiliki beberapa server diantaranya *Proxy Server*, *Storage Server*, *Network Management Sistem (NMS) Server* dan *MRTG Web Server* yang berada di ruang server dan dikelola oleh tim TI Balai Besar POM di Padang.

Selama pandemi, BBPOM di Padang lebih banyak menggunakan aplikasi *zoom meeting* untuk berkomunikasi atau pertemuan dengan BPOM pusat, ataupun stakeholder terkait. Selain itu BBPOM di Padang juga mempunyai media sosial seperti Instagram, twitter, Facebook dan Youtube untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dan pada Triwulan I Tahun 2021 BBPOM di Padang membangun aplikasi Galamai (Galeri Layanan Masyarakat dan Informasi) untuk kebutuhan layanan publik agar bisa diakses oleh customer BBPOM di Padang dimana saja dan kapan saja.

4. Sumber Daya Energi

Untuk penerangan digunakan listrik PLN dengan daya 54,7 KVA. Pada tahun 2011 dilakukan penambahan daya listrik menjadi 105 KVA dengan penambahan alat-alat laboratorium dan pada tahun 2012 dinaikkan lagi menjadi 147 KVA. Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dilengkapi dengan generator dengan kapasitas 100 KVA dan pada tahun 2017 telah ditambah lagi 1 generator dengan kapasitas 150 KVA.

5. Sarana Laboratorium

Balai Besar POM di Padang senantiasa berkomitmen untuk memberikan hasil pengujian laboratorium yang absah, didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana

laboratorium yang memadai, terutama peralatan laboratorium yang merupakan salah satu unsur penunjang utama pengujian selain personil yang kompeten dan metode analisa yang valid. Pada tahun 2021 untuk pemenuhan standar laboratorium direncanakan pengadaan peralatan laboratorium di Balai Besar POM di Padang sebanyak 1 (satu) unit alat pendukung dan 8 (delapan) unit alat utama melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa.

6. Pagu Anggaran Tahun 2021

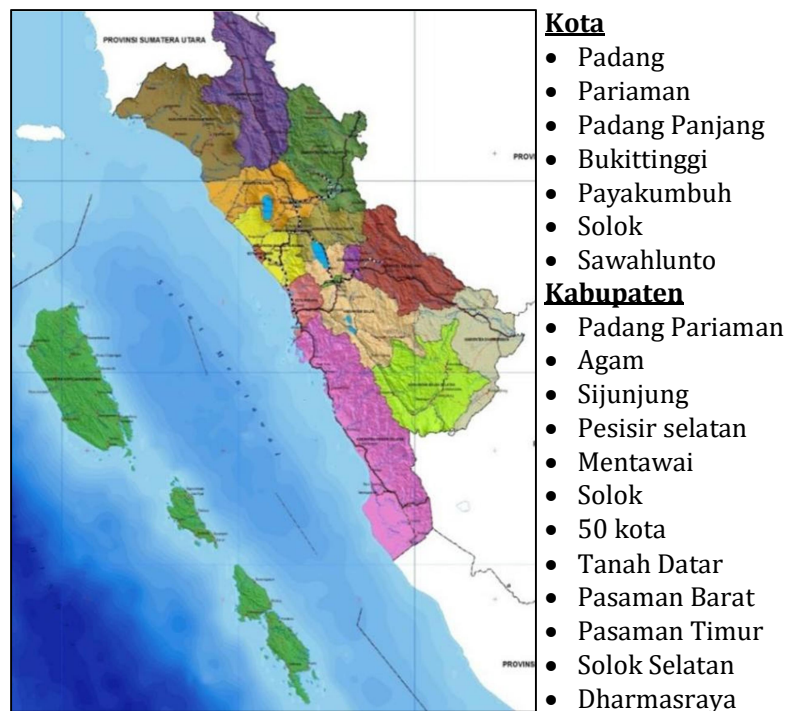
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 yaitu sebesar Rp.45,920,455,000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Rp.17,874,800,000,- Belanja Barang Rp.22,820,905,000,- dan Belanja Modal Rp.5,224,750,000,- dengan realisasi anggaran Rp.5,505,199,640,- atau 11,99%.

1.6.2 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS EKSTERNAL

1. Data Umum Provinsi Sumatera Barat

A. Wilayah Kerja

Luas Wilayah Sumatera Barat : 42.252,24 km², yang merupakan *catchment area* dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh, dan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Dharmasraya.



Gambar 1.3. Peta Wilayah Sumatera Barat

Sebelah barat pulau Sumatera, berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Utara. Daerah Sumatera Barat dilewati garis Khatulistiwa sehingga Provinsi Sumatera Barat tergolong beriklim tropis dengan suhu udara dan kelembaban yang tinggi, ketinggian permukaan Sumatera Barat bervariasi, sebagian daerahnya pada dataran tinggi kecuali Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, Pasaman dan Kota Padang.

B. Pola Transportasi

Pada umumnya transportasi yang digunakan untuk menjangkau seluruh wilayah kerja adalah melalui jalan darat dengan menggunakan kendaraan umum yang cukup tersedia, sedangkan untuk Kepulauan Mentawai menggunakan transportasi laut berupa kapal penumpang umum dengan jadwal keberangkatan minimal 2 kali dalam seminggu atau dengan pesawat udara.

2. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kab / Kota

Pengawasan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Loka POM di Payakumbuh serta Loka POM di Dharmasraya meliputi pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan pada 19 (Sembilan belas) Kabupaten/Kota.

Tabel 1.4. Tabel Jumlah Sarana Distribusi dan Sarana Produksi Obat dan Makanan Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

NO	JENIS SARANA	JUMLAH SARANA	
Sarana Distribusi			
1.	PBF	41	Sarana
2.	Apotek	597	Sarana
3.	Toko Obat	323	Sarana
4.	Klinik	142	Sarana
5.	Rumah Sakit	76	Sarana
6.	Puskesmas	278	Sarana
7.	GFK	20	Sarana
8.	BKKBN	18	Sarana
9.	Distribusi Makanan	1002	Sarana
10.	Distribusi Kosmetik dan Salon	860	Sarana
11.	Distribusi OT dan Suplemen Kesehatan	440	Sarana
12.	Distribusi Bahan Berbahaya	135	Sarana

TOTAL SARANA DISTRIBUSI		3932	Sarana
Sarana Produksi			
1.	Industri Farmasi	1	Sarana
2.	Industri Obat Tradisional	1	Sarana
3.	UMOT	3	Sarana
4.	UKOT	1	Sarana
5	Industri Kosmetik	7	Sarana
6.	Industri Makanan (MD)	51	Sarana
7.	PIRT	5207	Sarana
TOTAL SARANA PRODUKSI		5271	Sarana

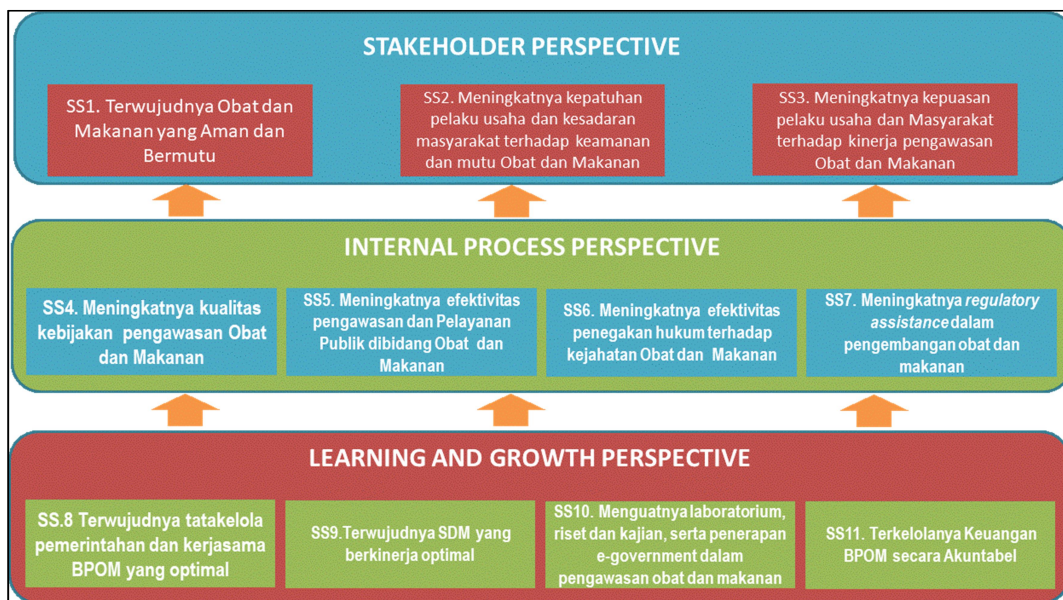
BAB II PERENCANAAN KINERJA



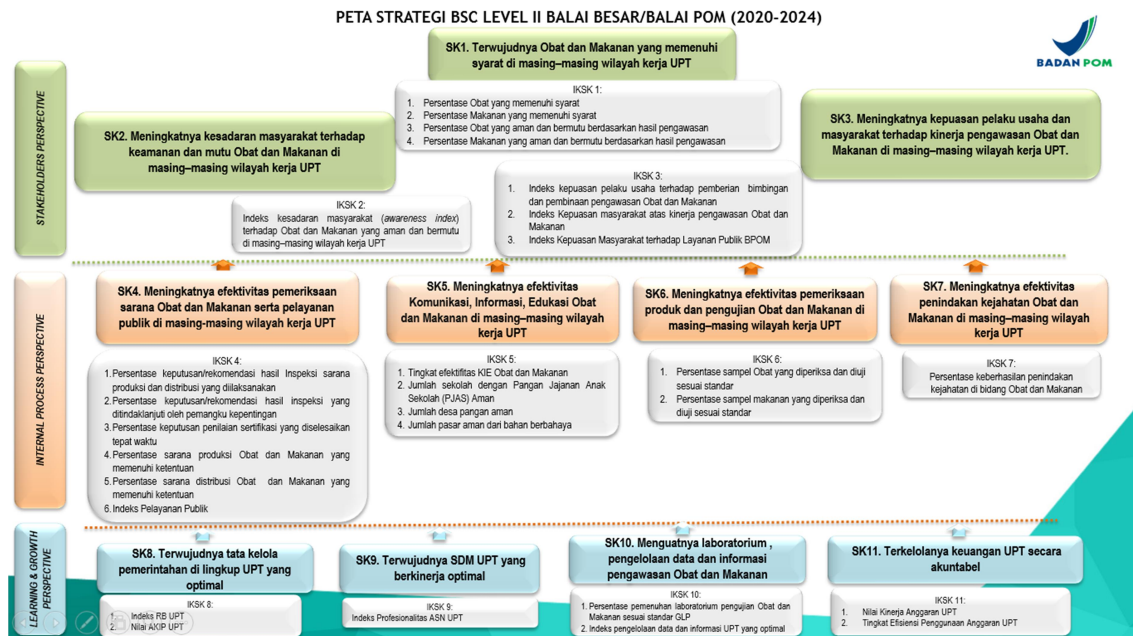
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas Pembangunan Jangka menengah, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya telah menyusun Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan sasaran strategi yang mengacu kepada Rencana Strategis BPOM Tahun 2020 -2024.

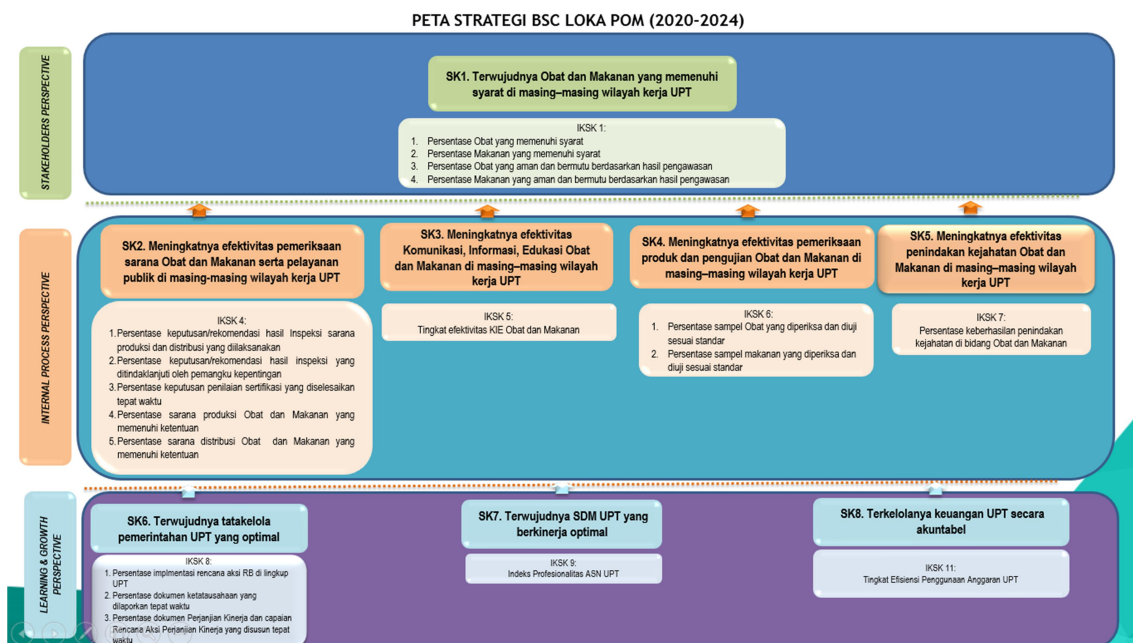
Renstra Balai Besar POM di Padang Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan penjabaran Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 yang telah selaras dengan dokumen RPJMN dan disesuaikan dengan tugas pokok Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sebagai salah satu unit pelaksana teknis di wilayah Sumatera Barat. Penyusunan sasaran dan indikator kinerja pada rencana strategis dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang serta melihat latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis yang diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.1. Peta Strategi Level 0 Kepala BPOM RI



Gambar 2.2. Peta Strategi Level 2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang



Gambar 2.3. Peta Strategi Level 2 Loka POM

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024, maka kedudukan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan **Visi BPOM 2020-2024** yaitu:

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:

- 1) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
- 4) Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
- 7) Penguatan pengujian, riset, kajian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.

- 8) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Rincian Sasaran Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Peta Strategi Balai Besar POM di Padang sebagai berikut :

A. Stakeholder Perspective:

Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Padang tergolong produk berisiko tinggi sehingga tidak ada toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standarisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Ke-dua, penilaian (pre-market evaluation) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Ke-tiga, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan.

Pengawasan post-market dilakukan oleh Balai Besar POM di Padang secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Ke-empat, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk

menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke-lima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

1. Persentase obat yang memenuhi syarat dengan target sebesar 92,3% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan target 86% pada akhir tahun 2024.
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pengawasan dengan target 92% pada akhir tahun 2024.
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 77% pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis Ke-2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dengan target sebesar 83 pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis Ke-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Balai Besar POM di Padang berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik Balai Besar POM di Padang bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan dengan target sebesar 90 pada akhir tahun 2024.
2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 84 pada akhir tahun 2024.
3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM dengan target sebesar 92 pada akhir tahun 2024.

B. Internal Process Perspective

Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Padang mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Padang, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila Balai Besar POM di Padang mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Padang perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target sebesar 91% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target sebesar 85 % pada akhir tahun 2024.
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target sebesar 91% pada akhir tahun 2024.
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 58% pada akhir tahun 2024.
5. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 68% pada akhir tahun 2024.
6. Indeks Pelayanan Publik dengan target sebesar 4,51 pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis ke-5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Pengawasan Obat dan Makanan ke depannya lebih preventif dan proaktif, di antaranya melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu melindungi diri dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Komunikasi, informasi dan edukasi tentang obat dan makanan diharapkan dapat membekali pengetahuan kepada masyarakat tentang produk obat, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, dan pangan yang aman untuk dikonsumsi.

Dengan peningkatan efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dapat mengunggah komunitas desa, pasar dan komunitas sekolah supaya berdaya, berpartisipasi dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di komunitasnya masing-masing.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU) adalah :

1. Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan dengan target sebesar 96,19 % pada akhir tahun 2024.
2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dengan target sebanyak 102 sekolah pada akhir tahun 2024.
3. Jumlah desa pangan aman dengan target sebanyak 46 desa pada akhir tahun 2024.
4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya sebanyak 15 pasar pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis ke-6 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pemeriksaan yang meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan dan penandaan label yang dilanjutkan dengan pengujian laboratorium secara kimia, biologi, dan mikrobiologi terhadap produk yang disampling oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang. Pengujian produk secara laboratorium dilakukan menggunakan metode analisis terkini mengacu pada standar nasional dan internasional. Jenis produk berkembang sangat pesat, sehingga tidak semua metode analisis yang dibutuhkan telah tersedia pada buku standar tersebut atau tidak semua metode analisis pada buku standar dapat digunakan dalam pengujian produk.

Dalam mengawal mutu dan keamanan produk perlu dikembangkan metode analisis yang disesuaikan dengan profil dan matriks sampel. Dalam validasi metode analisis dan pengujian diperlukan baku pembanding sebagai penentu validitas metode dan hasil pengujian, sedangkan di pasaran tidak selalu tersedia baku pembanding yang dibutuhkan. Semua sampel yang berasal dari sampel prioritas sampling dan sampel dari pihak ke-3 juga dituntut untuk diselesaikan tepat waktu.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah :

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 94% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 90% pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis ke-7 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Padang menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Padang melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang profesional, akuntabilitas, efektif dan efisien sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU)nya :

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dengan target sebesar 95% pada akhir tahun 2024.

C. Learning and Growth Perspective

Sasaran Strategis Ke-8: Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Balai Besar POM di Padang berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai Besar POM di Padang akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Besar POM di Padang. Pada tahun 2020-2024, Balai Besar POM di Padang berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Balai Besar POM di Padang agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai Besar POM di Padang untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Balai Besar POM di Padang diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM.

Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1. Indeks RB di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan target sebesar 95 pada akhir tahun 2024.
2. Nilai AKIP di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan target sebesar 92 pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis Ke-9: Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Padang dengan target sebesar 85 di akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis Ke-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Pemenuhan standar GLP adalah sebagai upaya Laboratorium pengujian Balai Besar POM di Padang untuk memenuhi Standar Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter standar ruang lingkup, standar alat laboratorium dan standar kompetensi personal laboratorium, alat laboratorium yang digunakan harus terkalibrasi dan dipelihara dengan baik,

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang

memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Balai Besar POM di Padang di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Balai Besar POM di Padang

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah :

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP sebesar 85% pada akhir tahun 2024.
2. Indeks pengelolaan data dan informasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal dengan target sebesar 3 pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis ke-11: Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Balai Besar POM di Padang dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah :

1. Nilai kinerja anggaran di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan target sebesar 97% pada akhir tahun anggaran 2024.
2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan target efisien sebesar 96% pada akhir tahun 2024.

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang periode 2020-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Visi	Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
Misi	1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.
Tujuan	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. 2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan. 3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM. 4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu. 5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan. 6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.
Sasaran Strategis	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di

	Padang
	3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang
	4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang
	5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang
	6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang
	7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang
Sasaran Strategis	8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal
	9. Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal
	10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan
	11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Balai Besar POM di Padang untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan melalui pelaksanaan operasional kegiatan tahunan. RKT meliputi sasaran strategis, indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun 2021.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Padang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Padang No. PR.04.01.93.931.12.20.189 Tahun 2020 tentang Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Padang. RKT disusun dengan tujuan sebagai pedoman/acuan pelaksanaan bagi Balai Besar POM di Padang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi

kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan, antara lain:

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2021 ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI BESAR POM DI PADANG

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	73
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	di Padang	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	49
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62
		Indeks Pelayanan Publik	3,76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,54
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	18
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	87
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	89
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	92
		Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	85
9	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	93

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Untuk memantau pencapaian Perjanjian Kinerja secara berkala maka telah ditetapkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Besar POM di Padang. RAPK memuat target kinerja per triwulan dan anggaran per indikator kinerja.

Tabel.2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Balai Besar POM Di Padang

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN
			B03	B06	B09	B12	(RUPIAH)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	83,6	83,6	Rp 179.172.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	Rp 35.865.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	87	87	87	Rp 421.199.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68	68	68	68	Rp 197.217.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu				73	Rp 503.630.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				87	Rp 101.461.500
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan				75	Rp 1.950.000.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN
			B03	B06	B09	B12	(RUPIAH)
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang				90,5	Rp 450.000.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	87	87	87	Rp 107.876.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	70	70	70	Rp 992.236.500
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85	85	85	Rp 101.461.500
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	49	49	49	49	Rp 107.876.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62	62	62	62	Rp 992.236.500
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang				3,76	Rp.222.000.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,64	90,64	90,64	90,64	Rp 1.950.000.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	10%	40%	70%	40	Rp 688.161.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN
			B03	B06	B09	B12	(RUPIAH)
	Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Jumlah desa pangan aman	10%	40%	75%	18	Rp 528.788.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10%	40%	70%	6	Rp 256.802.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	40	75	91	Rp 2.254.161.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	35	70	87	Rp 2.151.699.000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	30	50	89	Rp. 1.010.575.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang				92	Rp. 265.220.000
		Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang				85	Rp. 1.538.216.000
9	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang				77	Rp. 277.880.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP				82	Rp. 4.029.750.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	2	2	2	2	Rp. 1.195.000.000
11	Terkelolanya Keuangan	Nilai Kinerja Anggaran	45	50	60	94	Rp. 17.874.800.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN
			B03	B06	B09	B12	(RUPIAH)
	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang					
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Efisien (93 %)	Efisien (93 %)	Efisien (93 %)	Efisien (93 %)	. 5.537.172.000

2.5 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Penetapan kriteria pencapaian indikator bertujuan untuk:

- 1) Sebagai *review* dan evaluasi untuk penetapan target kinerja tahunan.
- 2) Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kriteria keberhasilan suatu sasaran strategis harus disepakati dan ditetapkan dahulu pada saat perencanaan. Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut sebagai indikator kinerja.

Penilaian suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau indikator kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator kinerja utama (IKU) dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik.

Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

PERHITUNGAN NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) sebagai berikut :

- a. NPS per Sasaran = $\{ \% \text{capaian indikator}_1 + \% \text{capaian indikator}_2 + \dots \% \text{capaian indikator}_n \} / n$

1. Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran maka NPS ditentukan dengan menghitung persentase capaian indikator.
 2. Sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator NPS ditentukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian seluruh indikator.
 3. Indikator dengan capaian >120%, penghitungan NPS menggunakan nilai maks 120%
- b. $NPS \text{ per Perspektif} = \{\% \text{capaian sasaran}_1 + \% \text{capaian sasaran}_2 + \dots \% \text{capaian sasaran}_n\} / n$
 Perspektif yang memiliki lebih dari 1 (satu) sasaran NPS ditentukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian seluruh sasaran dalam 1 (satu) perspektif.
- c. $NPS \text{ Total} = \{NPS \text{ Perspektif}_1 + NPS \text{ Perspektif}_2 + NPS \text{ Perspektif}_3\} / 3$

NPS total ditentukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian seluruh perspektif.
 Kriteria capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kriteria Pencapaian Indikator

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2021 No PR.04.01.93.931.12.20.189 tanggal 14 Desember 2020, Penetapan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tahun 2021 memuat 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Pencapaian sebelas sasaran kegiatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada Triwulan II tahun 2021 yang merupakan tahun kedua dari periode Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Triwulan II Tahun 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN SASARAN (%)	NILAI CAPAIAN PENYESUAIAN (%)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	107,48	107,48	Baik
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Capaian dihitung pada akhir tahun	-	-
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Capaian dihitung pada akhir tahun	-	-
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	104,21	104,21	Baik
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	138,01	115,51	Tidak dapat disimpulkan
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	138,96	120	Tidak dapat disimpulkan
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	147,23	120	Tidak dapat disimpulkan
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	Capaian dihitung pada akhir tahun	-	-
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal	Capaian dihitung pada akhir tahun	-	-

10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Capaian di hitung pada akhir tahun	-	-
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel	123,84	120	Tidak dapat disimpulkan

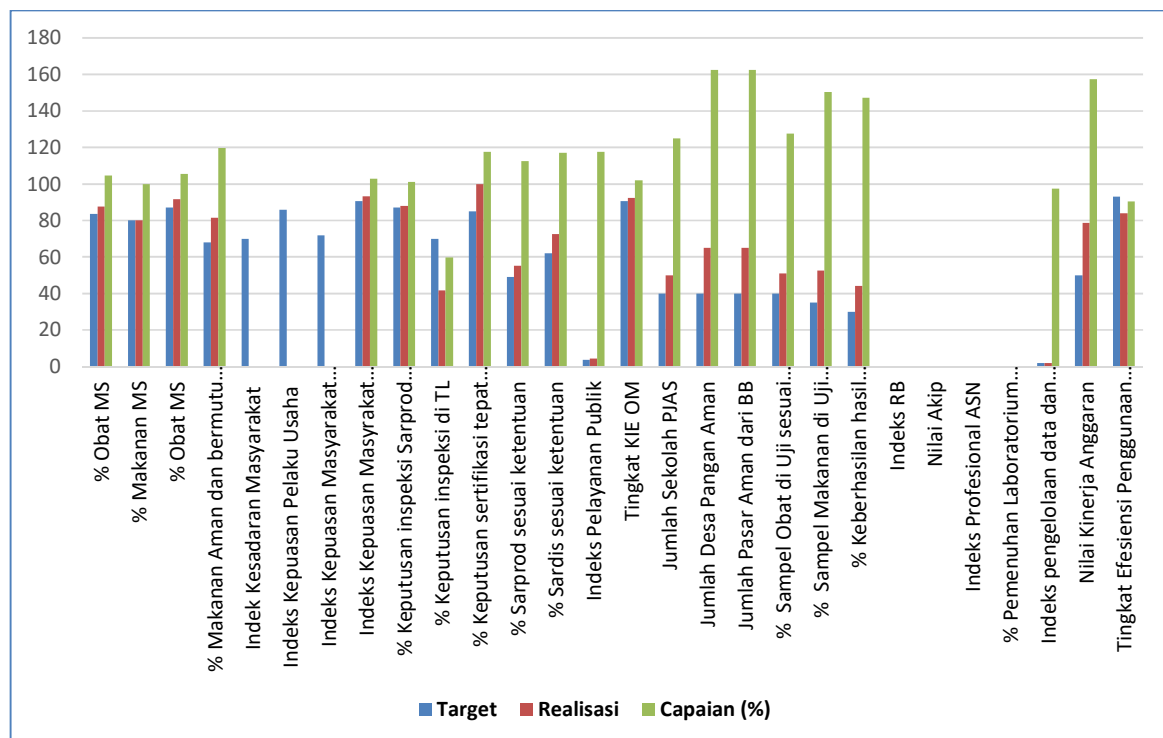
Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 28 indikator kinerja utama. Secara lengkap perbandingan target, realisasi dan capaian setiap indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel 3.2. di bawah ini:

Tabel 3.2. Perbandingan target dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama Triwulan II Tahun 2021

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	87,55	104,73
		2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80,00	100,00
		3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	91,74	105,45
		4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68	81,42	119,73
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	5.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	73	Dihitung pada akhir tahun	-
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	6.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87	Dihitung pada akhir tahun	-
		7.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75	Dihitung pada akhir tahun	-
		8.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90,5	93,13	102,91
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di	9.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	87,87	101,00

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)
	wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	41,87	59,81
		11.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	99,86	117,48
		12.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	49	55,07	112,39
		13.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62	72,56	117,03
		14.	Indeks Pelayanan Publik	3,76	4,42	117,55
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	15.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,54	92,38	102,03
		16.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40%	50,00	125,00
		17.	Jumlah desa pangan aman	40%	65,00	162,50
		18.	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	40%	65,00	162,50
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	19.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	51,04	127,60
		20.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	52,61	150,31
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	21.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	44,17	147,23
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	22.	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	92	Dihitung pada akhir tahun	-
		23.	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	85	Dihitung pada akhir tahun	-

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal	24.	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	77	Dihitung pada akhir tahun	-
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	25.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	Dihitung pada akhir tahun	-
		26.	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	2	1,95	97,50
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel	27.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	45	78,68	157,36
		28.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	93	84,00	90,32



Gambar 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan II Tahun 2021

Dari 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja utama (IKU) terdapat 5 indikator yang mencapai target dengan kriteria sangat baik, 8 indikator dengan kriteria baik, 7 indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan, serta 1 indikator dengan kriteria kurang. Sebanyak 7 indikator belum dihitung karena diukur pada akhir tahun, sehingga belum diketahui kriteria capaian untuk indikator tersebut. Analisa tentang capaian ini akan dibahas secara rinci dalam uraian pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja berikut.

**TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG**

3.1.1 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN I

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 4 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 107,48% dengan kriteria baik. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60	87,55	104,73	Baik
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00	80,00	100,00	Baik
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,00	91,74	105,45	Baik
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68,00	81,42	119,73	Sangat Baik

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-I sebagai berikut :

A. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat menggunakan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak obat MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}}$$

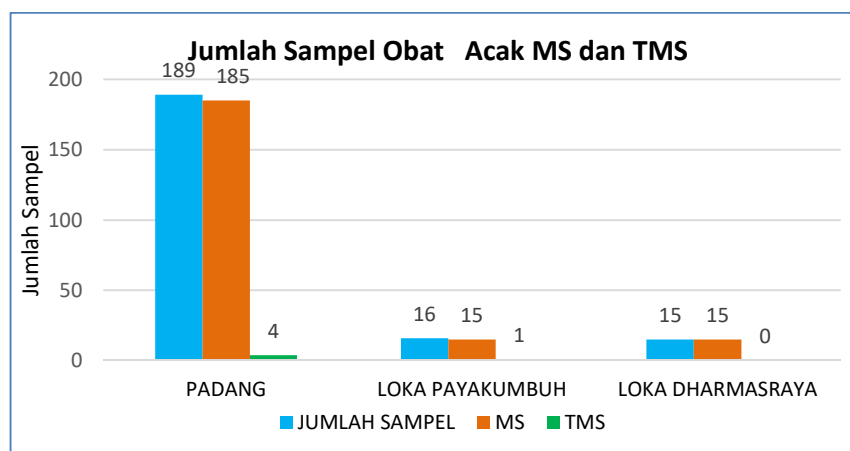
- Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai persentase jumlah sampel obat acak yang memenuhi syarat terhadap total sampel obat acak yang diperiksa dan diuji.
- Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
- Sampel acak adalah Sampling yang dilakukan terhadap Produk (Obat / Makanan) beredar berdasarkan data survei produk beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.
- Kriteria tidak memenuhi syarat meliputi tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kadaluarsa, produk rusak, tidak memenuhi ketentuan penandaan, dan tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Tabel 3.4 Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Triwulan II tahun 2021

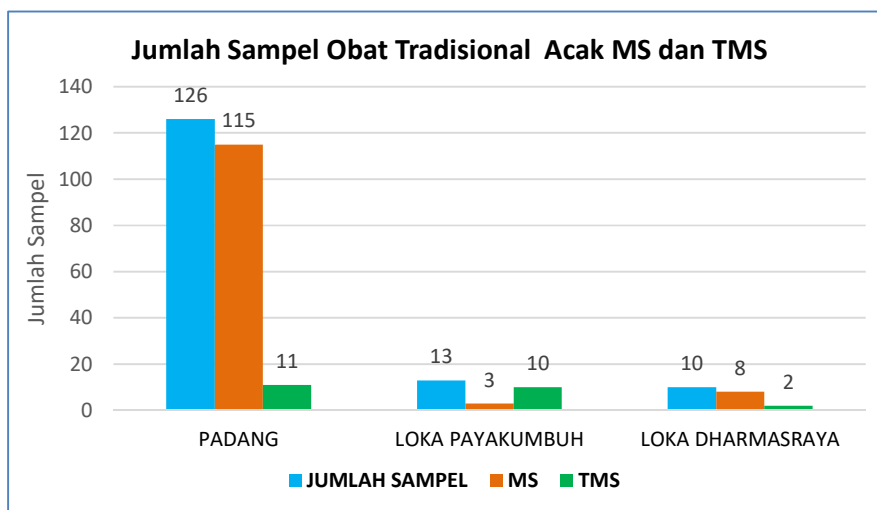
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	83,60	87,55	104,73	Baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2021

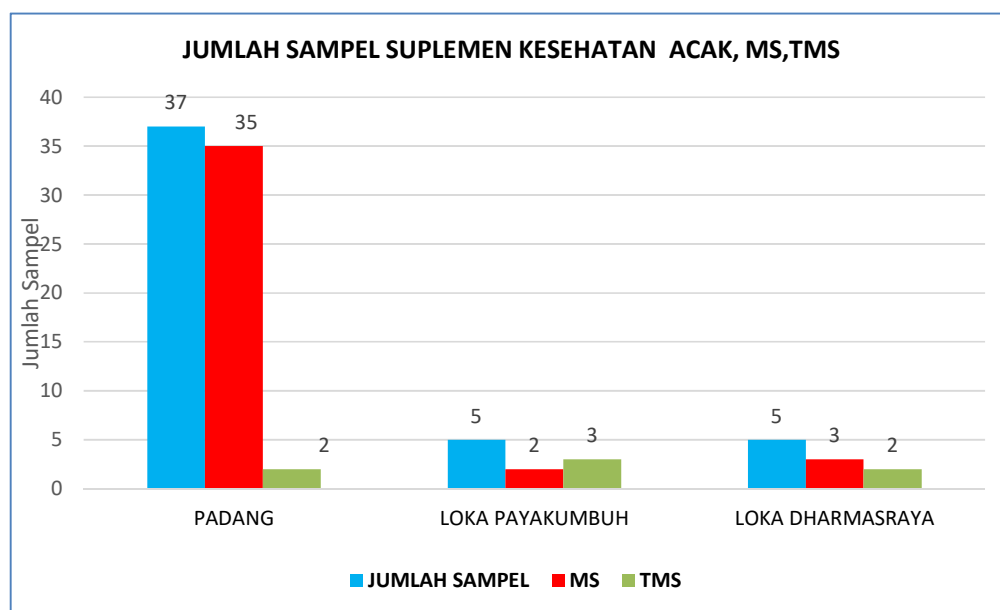
Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan II tahun 2021 adalah 87,55% bila dibandingkan dengan target 83,60%, maka capaian yang diperoleh adalah 104,73% dan mendapatkan kriteria baik dengan rincian 89 sampel tidak memenuhi syarat (12,45%) dari 715 sampel yang selesai diuji pada Triwulan II tahun 2021



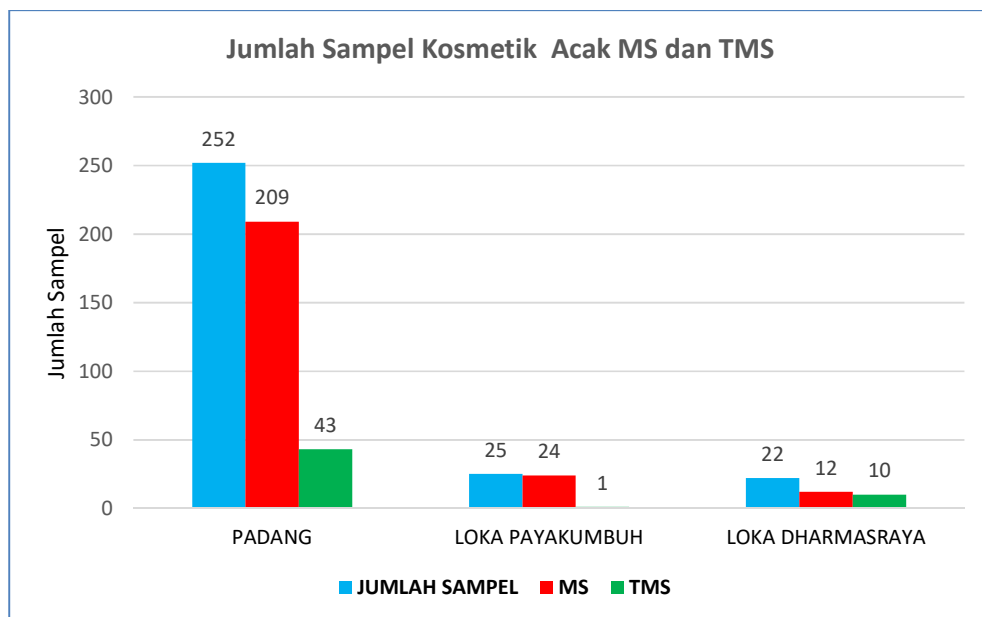
Gambar 3.2 Jumlah Sampel Obat Acak MS dan TMS Triwulan II Tahun 2021



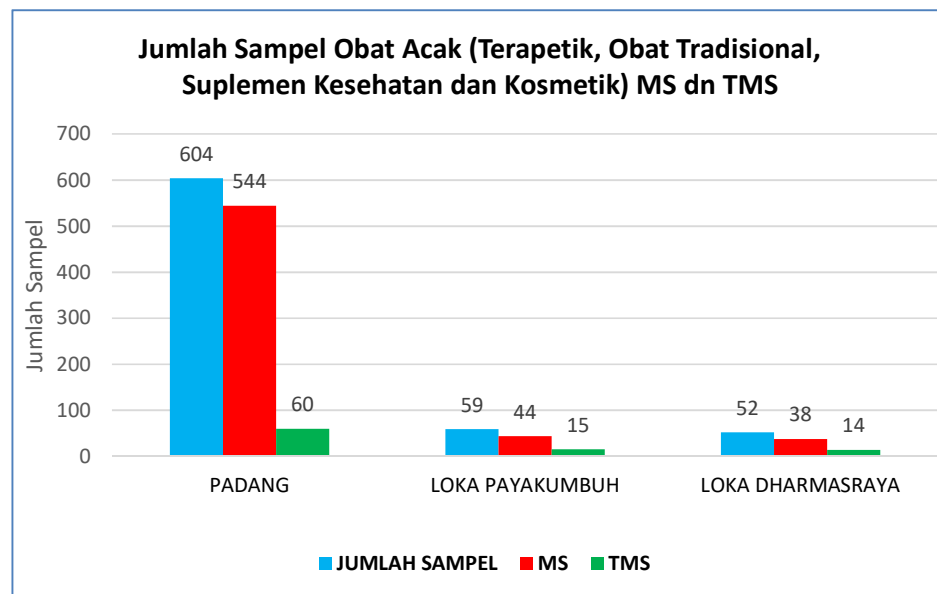
Gambar 3.3 Jumlah Sampel Obat Tradisional Acak MS dan TMS Triwulan II Tahun 2021



Gambar 3.4 Jumlah Sampel Suplemen Kesehatan Acak MS dan TMS Triwulan II Tahun 2021



Gambar 3.5 Jumlah Sampel Kosmetik Acak MS dan TMS Triwulan II Tahun 2021



Gambar 3.6 Jumlah Sampel Obat Acak (Terapetik, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) MS dan TMS Triwulan II Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan II tahun 2021 adalah 87,55% bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 83,6%, maka capaian yang diperoleh sama yaitu sebesar 104,73%.

B. Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak makanan MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}}$$

- Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai persentase jumlah sampel Makanan acak yang memenuhi syarat terhadap total sampel makanan acak yang diperiksa dan diuji.
- Sampel acak adalah Sampling yang dilakukan terhadap Produk Makanan beredar berdasarkan data survei produk beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.
- Kriteria tidak memenuhi syarat meliputi tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu, produk kadaluarsa, produk rusak, tidak memenuhi ketentuan penandaan, dan tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

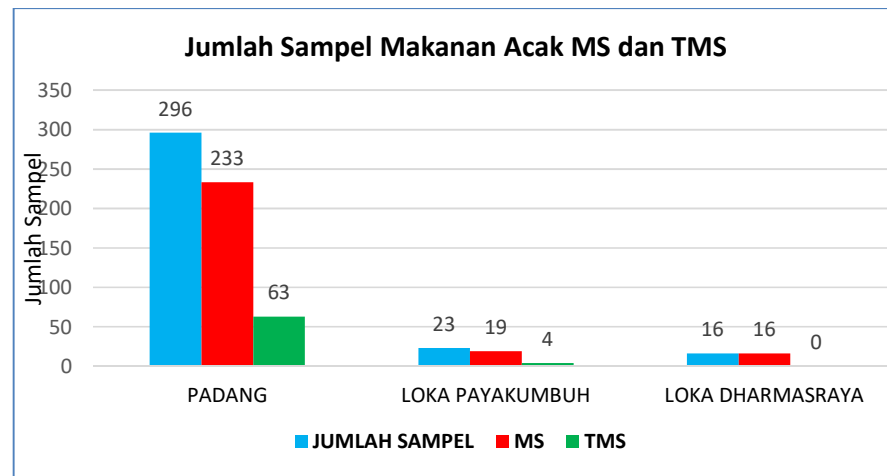
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	80	80,00	100%	Baik

Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2021

Realisasi makanan yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan II tahun 2021 adalah 80,00%. Sedangkan target persentase makanan yang memenuhi syarat adalah 80%, maka capaian Balai Besar POM di Padang adalah 100% dengan kriteria baik. Rincian jumlah yang memenuhi syarat adalah 268

sampel dan tidak memenuhi syarat sebanyak 67 sampel dari 335 sampel yang selesai uji pada Triwulan II tahun 2021



Gambar 3.7 Sampel Makanan Acak MS dan TMS Triwulan II Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan II tahun 2021 adalah 80,00% bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 80%, maka capaian sama yaitu sebesar 100%.

C. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan menggunakan rumus sbb:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted obat MS}}{\text{Total sampel targeted obat yang diperiksa dan diuji}}$$

- Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai persentase jumlah sampel obat targeted yang memenuhi syarat terhadap total sampel obat targeted yang diperiksa dan diuji.
- Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
- Sampel targeted adalah Sampling yang dilakukan terhadap Produk Obat beredar berdasarkan data survey produk beredar berdasarkan kerangka sampling targeted/purpose di tahun berjalan

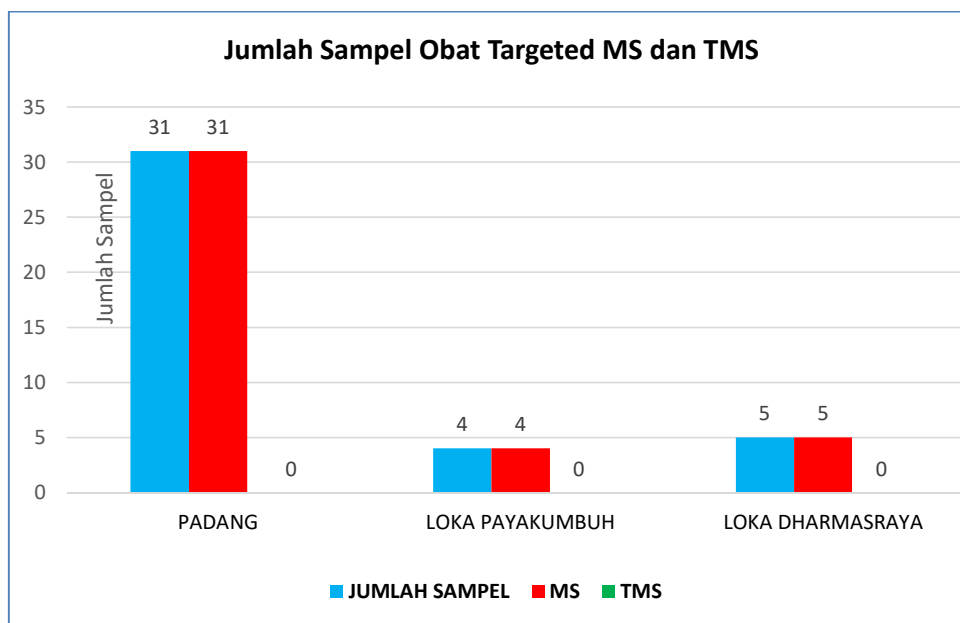
- Kriteria tidak memenuhi syarat meliputi tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kadaluarsa, produk rusak, tidak memenuhi ketentuan penandaan, dan tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KET
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	91,74	105,45	Baik

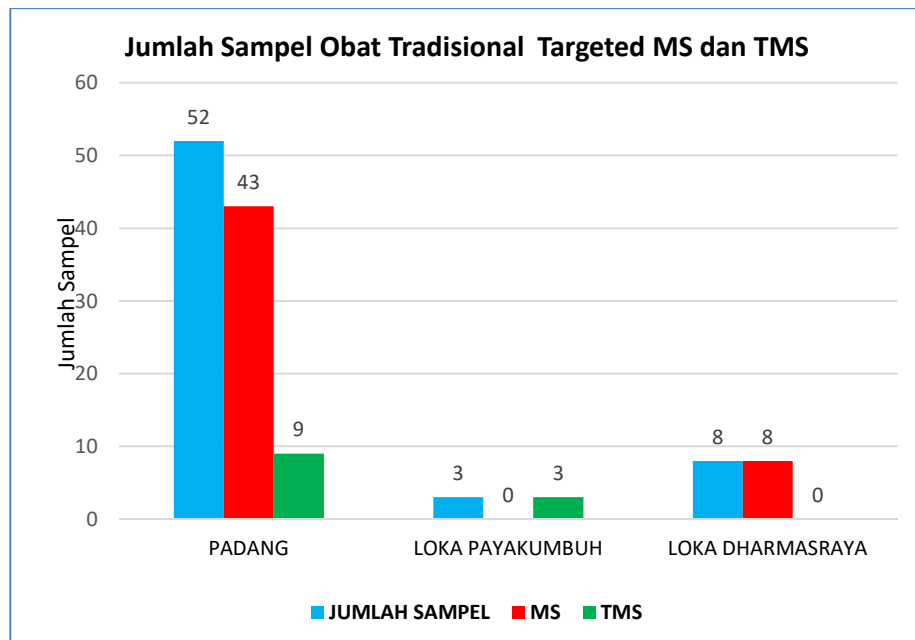
Tabel 3.6. Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2021

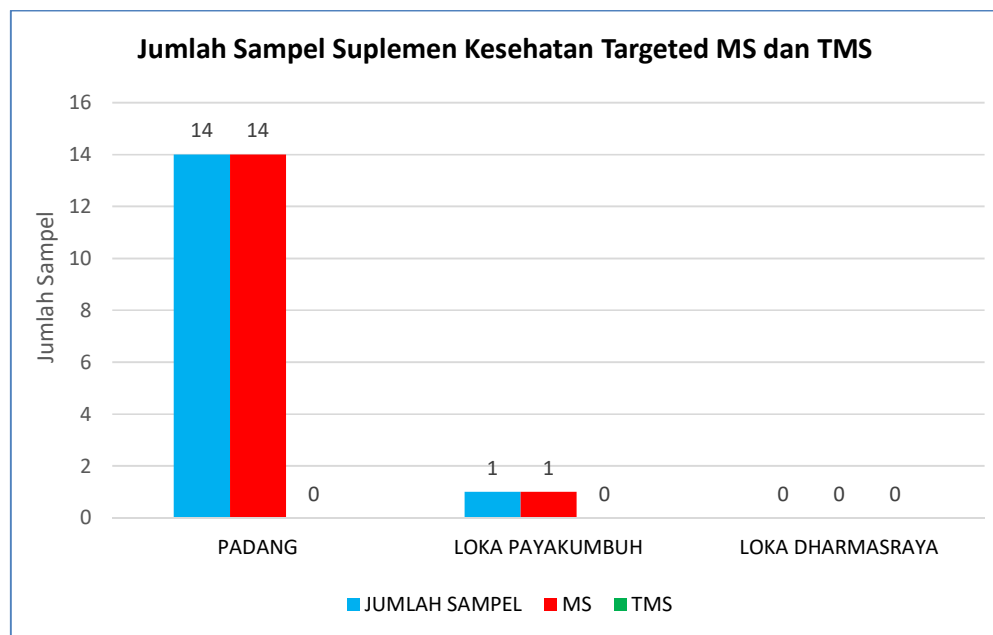
Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan II tahun 2021 adalah 91,74 % , bila dibandingkan dengan target 87%, maka capaian tahun 2021 adalah 105,45% dengan kriteria baik. Dari sebanyak 218 sampel yang diuji pada Triwulan II tahun 2021 sebanyak 200 sampel memenuhi syarat dan 18 sampel tidak memenuhi syarat.



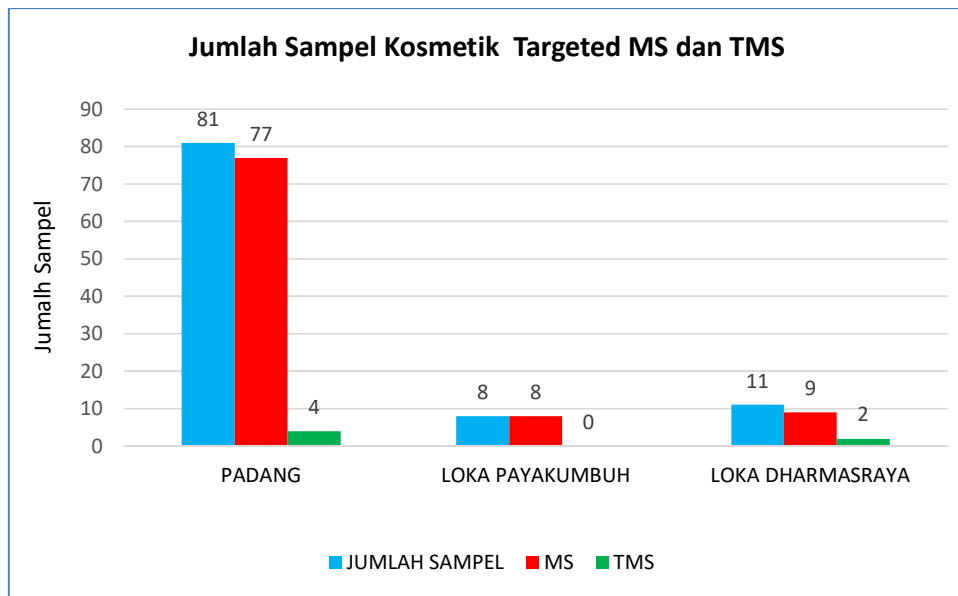
Gambar 3.8 Jumlah Sampel Obat Targeted MS dan TMS Triwulan II Tahun 2021



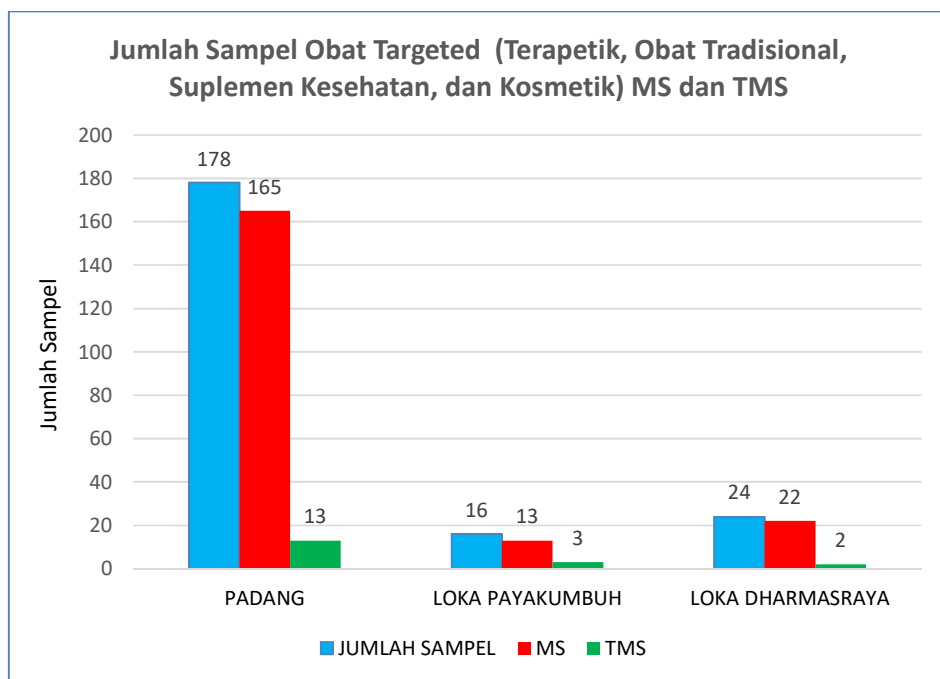
Gambar 3.9 Jumlah Sampel Obat Tradisional Targeted MS dan TMS Triwulan II Tahun 2021



Gambar 3.10 Jumlah Sampel Suplemen Kesehatan Targeted MS dan TMS Triwulan II Tahun 2021



Gambar 3.11 Jumlah Sampel Kosmetik Targeted MS dan TMS Triwulan II Tahun 2021



Gambar 3.12 Jumlah Sampel Obat Targeted (Terapetik, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) MS dan TMS Triwulan II Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan di Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan II tahun 2021 adalah 91,74% bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 87%, maka capaian sama yaitu sebesar 105,45%

D. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan menggunakan rumus sbb :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted makanan MS}}{\text{Total sampel targeted makanan yang diperiksa dan diuji}}$$

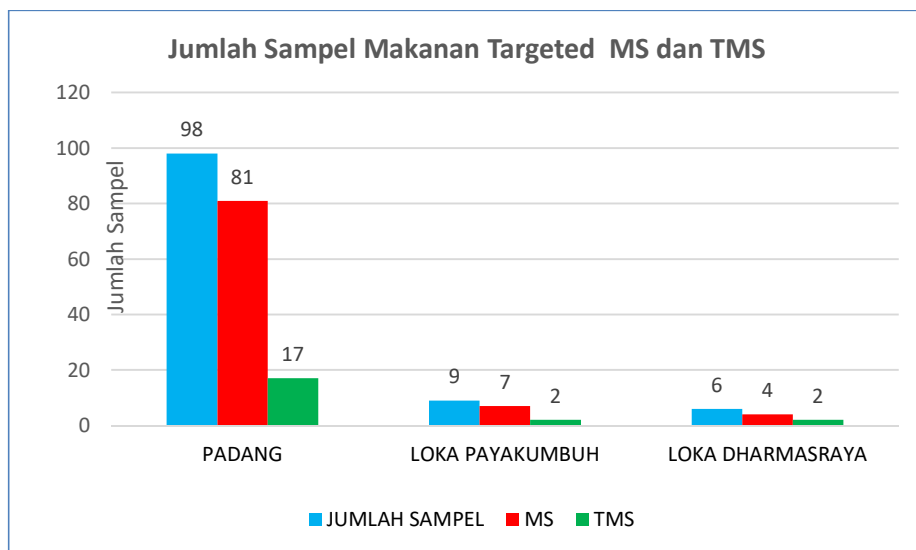
- Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai persentase jumlah sampel makanan targeted yang memenuhi syarat terhadap total sampel makanan targeted yang diperiksa dan diuji.
- Sampel targeted adalah Sampling yang dilakukan terhadap Produk Makanan beredar berdasarkan data survey produk beredar berdasarkan kerangka sampling targeted/purpose di tahun berjalan.
- Kriteria Makanan tidak memenuhi syarat adalah jika pangan atau kemasan pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68	81,42	119,73	Sangat Baik

Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan II Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2021

Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan II tahun 2021 adalah 81,42%. Apabila dibandingkan dengan target 68% maka persentase capaian Triwulan II tahun 2021 adalah sebesar 119,73% dengan kriteria sangat baik. Rincian hasil uji adalah 21 sampel tidak memenuhi syarat dan 92 sampel memenuhi syarat dari total 113 sampel yang selesai diuji pada Triwulan II tahun 2021.



Gambar 3.13 Jumlah Sampel Makanan Targeted MS dan TMS Triwulan II Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Realisasi Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan II tahun 2021 adalah 81,42% bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 68%, maka capaian sama yaitu sebesar 119,73%

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN, ANALISIS PROGRAM,DAN EVALUASI DANA ANALISIS TERKAIT TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERBAIKAN TERHADAP CAPAIAN SASARAN I

I. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Tingginya angka capaian terhadap target yang telah ditetapkan untuk produk obat ini menunjukkan semakin banyaknya produk obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang beredar khususnya di wilayah Sumatera Barat, dengan kualitas/mutu yang memenuhi persyaratan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Semakin meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha untuk menerapkan Cara Produksi dan/atau Cara Distribusi yang Baik
2. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM secara Nasional, serta Balai Besar POM di Padang, Loka POM Payakumbuh dan Loka POM Dharmasraya sebagai unit kerja di wilayah Sumatera Barat terhadap pelaku usaha semakin efektif
3. Tindak lanjut terhadap hasil pengawasan terhadap produk yang beredar dan sarana produksi dan distribusi, yang dilakukan oleh Badan POM secara Nasional, serta Balai Besar POM di Padang, Loka POM Payakumbuh dan Loka POM Dharmasraya, telah direspon dengan baik oleh pelaku usaha
4. Semakin meningkatnya kecerdasan masyarakat dalam memilih produk yang baik atau memenuhi persyaratan untuk dikonsumsi. Hal ini menyebabkan semakin meningkatnya permintaan pasar akan produk – produk yang aman dan bermutu. Sehingga secara tidak langsung mendorong pelaku usaha untuk senantiasa menjaga mutu produk yang akan mereka edarkan
5. Semakin meningkatnya kapasitas/ kemampuan dari Balai Besar POM di Padang, Loka POM Payakumbuh dan Loka POM Dharmasraya dalam melakukan pengawasan terhadap mutu produk yang beredar.

Peningkatan yang telah dilakukan sebagai berikut :

Balai Besar POM di Padang :

- a. Kegiatan sampling obat dan makanan serta pengujian telah dilakukan sesuai pedoman sampling tahun 2021
- b. Peningkatan kompetensi penguji sudah dilakukan dengan baik
- c. Koordinasi antara Bidang Pemeriksaan, Bidang Pengujian dan Bagian Tata Usaha
- d. Penyediaan baku pembanding, reagensia dan alat laboratorium
- e. Koordinasi dengan pusat apabila terkendala dengan metoda analisa dan baku pembanding.
- f. Peningkatan pemeliharaan alat laboratorium

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Sampling Obat dan Makanan dilakukan sesuai dengan pedoman sampling tahun 2021 baik secara acak /random dan targeted.
- b. Penilaian atau evaluasi terhadap penandaan /label Obat dan Makanan telah dilakukan sesuai dengan juknis penilaian label untuk masing-masing komoditi.

- c. Penanganan sampel dilakukan dengan baik terutama untuk sampel yang memerlukan penyimpanan khusus seperti penyimpanan dingin / beku agar tidak mempengaruhi terhadap hasil pengujian terutama mikrobiologi.

Loka POM di Dhamasraya :

- a. Sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan dilakukan sesuai dengan prioritas pedoman sampling tahun 2021.
- b. Koordinasi dengan fungsi pengujian di Balai koordinator Balai Besar POM di Padang
- c. Koordinasi dengan pusat/kedeputan mengenai kendala dalam pemenuhan kategori sampel dilapangan.

II. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja terhadap indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat ini ditunjang oleh berbagai kegiatan dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Padang, LOKA POM Payakumbuh dan LOKA POM Dharmasraya sebagai berikut :

1. Kegiatan pendampingan terhadap pelaku usaha yang berkeinginan mendaftarkan produk untuk diedarkan. Pendampingan yang dilakukan dapat berupa pendampingan terhadap pembuatan denah sarana produksi, penyusunan alur produksi, cara produksi yang baik serta desain kemasan yang sesuai. Pendampingan ini bertujuan agar pelaku usaha mampu memproduksi produk-produk yang Memenuhi Persyaratan untuk diedarkan dan dikonsumsi masyarakat
2. Kegiatan pengawasan pada tahap *premarket*. Pengawasan dilakukan terhadap sarana produksi dan produk yang akan diedarkan. Terhadap sarana dilakukan melalui kegiatan sertifikasi. Terhadap produk dilakukan melalui kegiatan pengujian mutu produk. Pengawasan premarket ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan mutu produk yang akan diedarkan serta untuk memastikan komitmen pelaku usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip cara produksi yang baik.
3. Kegiatan pengawasan pada tahap *postmarket*. Pengawasan postmarket dilakukan terhadap sarana, produk yang dihasilkan serta pengawasan iklan dan penadaan produk yang beredar di masyarakat. Pengawasan sarana dilakukan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi. Pengawasan terhadap produk dilakukan

dengan cara melakukan pengujian terhadap produk-produk yang beredar dengan menggunakan metoda sampling secara random. Pengawasan iklan dilakukan dengan memantau iklan terhadap produk yang ada diberbagai media. Pengawasan penandaan dilakukan terhadap kesesuaian penandaan produk yang beredar di pasaran dengan penandaan produk yang didaftarkan oleh pelaku usaha. Pengawasan pada tahap Post Market ini bertujuan untuk melihat kepatuhan dan konsistensi pelaku usaha dalam menerapkan peraturan yang berlaku serta prinsip cara produksi dan/atau cara distribusi yang baik. Disamping itu juga bertujuan untuk memastikan keamanan dan kualitas produk yang beredar agar layak dikonsumsi masyarakat serta kesesuaian iklan dan penandaan produk yang beredar.

4. Kegiatan KIE kepada seluruh lapisan masyarakat, kegiatan ini bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam memilih produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi. Kegiatan ini untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan Makanan.
5. Kegiatan peningkatan kompetensi, monitoring dan evaluasi, pengadaan sumberdaya pendukung, serta kegiatan yang terkait dengan mutu dan kualitas pelayanan di lingkungan Balai Besar POM di Padang, LOKA POM Payakumbuh dan LOKA POM Dharmasraya, sebagai berikut :

Kegiatan dan program yang menunjang sebagai berikut :

Balai Besar POM di Padang :

- a. Peningkatan kemampuan ruang lingkup pengujian
- b. Peningkatan kompetensi penguji sesuai ruang lingkup pedoman sampling dan pengujian
- c. Rapat evaluasi bulanan atau triwulan bersama antara bidang pemeriksaan, dan bidang pengujian
- d. Pengadaan baku pembandingan secara mandiri
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sampel yang diuji di laboratorium
- f. Melakukan pengujian, pemeliharaan alat sesuai SOP Mikro
- g. Melakukan Jaminan Mutu Hasil Pengujian Yaitu : Uji Propisiensi, Uji baku pembandingan dan Uji Metoda analisa yang telah dilakukan pada laboratorium Obat dan Nafza sebanyak 3 bh, Laboratorium Kosmetik sebanyak 1 buah dan, Laboratorium Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 1 bh
- h. Melakukan Audit QMS ISO 9001 : 2015
- i. Melakukan Audit Surveilans KAN 17025: 2017

- j. Pemantauan kemampuan pengujian Laboratorium Obat tradisional dan SK oleh P3OMN
- k. Melakukan Verifikasi Metoda analisa pada laboratorium Obat Tradisional dan SK dan laboratorium Obat
- l. Melakukan Verifikasi Alat
- m. Pelatihan Analisa Intrumen secara daring pada Laboratoium Obat Tradisional dan SK dan Laboratorium Obat dan Nafza.
- n. Melakukan Jaminan Mutu Hasil Pengujian Yaitu :
 - Uji Kolaborasi Lab Kosmetik dari P3OMN , Uji Banding Lab Kosmetik dengan BBPOM Serang (2) dan BBPOM Pontianak (1)
 - Uji Profisiensi laboratorium obat tradisional dari P3OMN dengan judul “Identifikasi Bahan Kimia Obat dalam Obat Tradisional Sediaan Padat Klaim Anti Gatal Akibat Jamur
 - Uji Banding Laboratorium Obat dengan 2 parameter uji
 - Uji Profisiensi dengan 2 parametr uji, Uji kolaborasi dengan 1 parametr uji, dan Uji Banding dengan 1 parameter uji Laboratorium Pangan
 - Uji Profisiensi Laboratorium Mikrobiologi dengan 2 parameter uju, dan Uji Banding sebagai penyelenggara Uji banding dengan 4 parameter uji
- o. Melakukan Audit Internal QMS ISO 9001 : 2015 dan ISO 17025:2017
- p. Monitoring dan Evaluasi SKL Laboratorium TW 1 dan TW 2 oleh P3OMN
- q. Melakukan peningkatan Standar Kemampuan Laboratorium obat tradisional & dan suplemen kesehatan, Obat, Kosmetik, Pangan dan Mikrobiologi dengan pengembangan standar ruang lingkup sesuai dengan perencanaan setiap triwulan
- r. Melaksanakan Optimasi pada metoda yang telah ditentukan oleh P3OMN
- s. Mengadakan Pelatihan Internal “Implementasi PAI Laboratorium Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan serta Perawatan Alat ICP-MS”
- t. PELATIHAN ANALISIS SENYAWA POLAR SECARA KROMATOGRAFI CAIR KINERJA TINGGI Penetapan Kadar AHA dalam sediaan kosmetik secara daring.
- u. Sosialisasi Pedoman Teknis Laboratorium ISO 17025:2017 yang terntegrasi dengan ISO 9001:2015 kepada semua staf laboratorium
- v. Dan melakukan evaluasi kinerja Substansi Pengujian pada TW2

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Pelaksanaan sampling dilakukan sesuai dengan SOP sampling yang telah ditetapkan serta petugas sampling diberikan pemahaman terhadap pelaksanaan sampling pada pedoman prioritas sampling yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kegiatan sampling yang telah dilakukan.
- c. Memberikan pendampingan terhadap sarana produksi terutama yang dalam proses pendaftaran produk.

Loka POM di Dhamasraya :

- a. Peningkatan kompetensi petugas dalam melaksanakan sampling.
- b. Pelaksanaan sampling yang dilakukan sesuai dengan pedoman prioritas sampling.

III. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.

- b. Perencanaan sampling acak dengan mengatur sebaran yang merata untuk masing masing Kabupaten/Kota untuk meningkatkan keterwakilan uji mutu sampel yang ada diperedaraan.
- c. Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha agar bisa memproduksi makanan yang aman dan bermutu
- d. Meningkatkan koordinasi antara Bidang Pengujian dan Pemeriksaan Balai Besar POM di Padang terkait pelaksanaan sampling yang akan dilakukan sehingga tidak ada kendala terhadap pengujian yang akan dilakukan di Laboratorium.
- e. Dilakukan kesepakatan dan koordinasi antara Balai Besar POM di Padang dengan Loka POM untuk meningkatkan pemahaman dan persamaan persepsi, serta membahas kendala yang mungkin timbul selama pelaksanaan sampling.

3.1.2 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN II

**MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN
MUTU OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG**

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu :

**Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan
Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang**

Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang ini diukur pada akhir tahun 2021 sehingga tidak dapat disimpulkan hasil capaian pada Triwulan II Tahun 2021.

3.1.3 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN III

MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 3 indikator kinerja utama yaitu :

- a. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan dan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan diukur pada akhir tahun 2021 sehingga tidak dapat disimpulkan hasil capaian pada Triwulan II Tahun 2021.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Tabel 3.8. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan II Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM	90,50	93,13	102,91	Baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2021

Target indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2021 adalah 90,50 dengan realisasi 93,13% sehingga persentase capaian atas indikator kinerja ini adalah 102,91 % dengan kriteria Baik.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 terhadap Target Akhir Tahun 2021

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM adalah 93,13 bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 90,50%, maka capaian sama yaitu sebesar 102,91%

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

- a. Media layanan informasi dan pengaduan dapat diakses oleh masyarakat tidak hanya melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar POM di Padang namun juga dapat diakses melalui fitur *message* yang ada di media sosial dan *live chat* di Aplikasi GALAMAI
- b. Kompetensi petugas pelayanan publik yang semakin meningkat dengan bertambahnya pengalaman dan pengetahuan
- c. Layanan petugas yang informatif dan komunikatif
- d. Koordinasi dengan lintas sektor semakin baik
- e. Mempermudah akses komunikasi dengan konsumen dengan menerapkan budaya organisasi PIKKIR secara maksimal
- f. Khusus layanan informasi dan konsultasi DAK Non Fisik telah disediakan Whatsapp Business Khusus

4. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Sistem pelayanan sampel pihak ketiga sudah sesuai dengan SOP
- b. SKI/SKE telah dilaksanakan secara online sehingga waktu yang digunakan dapat lebih efisien
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan publik secara berkala

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

- a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder tentang adanya layanan informasi dan pengaduan BBPOM di Padang serta standar biaya pengujian sesuai PP 32 tahun 2017 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada BPOM

- b. Meningkatkan kompetensi petugas BBPOM di Padang dalam memberikan informasi dan melayani pengaduan masyarakat dan stakeholder.

3.1.4 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IV

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 6 indikator kinerja utama. Dari hasil capaian terhadap 6 indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 104,21 dengan kriteria baik. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	87,87	101,00	Baik
2.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	41,87	59,81	Kurang
3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	99,86	117,48	Sangat baik
4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	49	55,07	112,39	Sangat baik
5.	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	62	72,56	117,03	Sangat baik
6.	Indeks Pelayanan Publik	3,76	4,42	117,55	Sangat baik

Tabel 3.9. Capaian Sasaran Kegiatan ke IV

A. Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Keputusan/Rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari 4 komponen :

- ❖ Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Padang yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang
- ❖ Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang

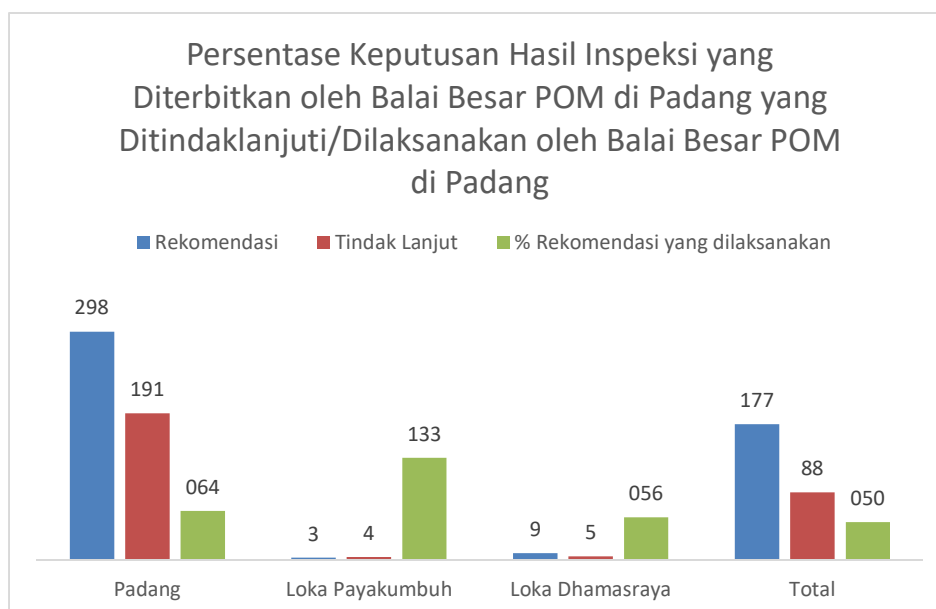
- ❖ Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Padang yang ditindak lanjuti/dilaksanakan oleh pusat dan UPT lain
- ❖ Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	87	87,87	101,00	Baik

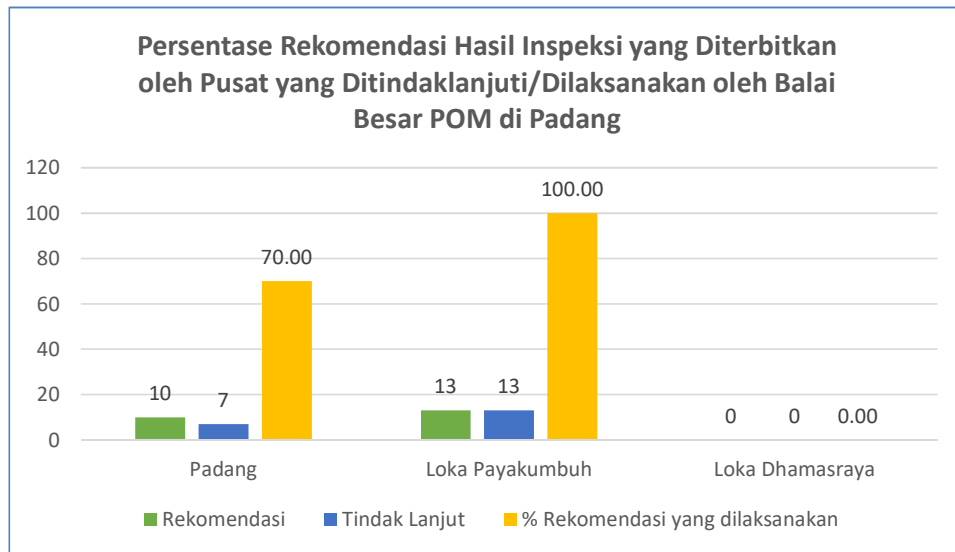
Tabel 3.10.Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Triwulan II Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II tahun 2021

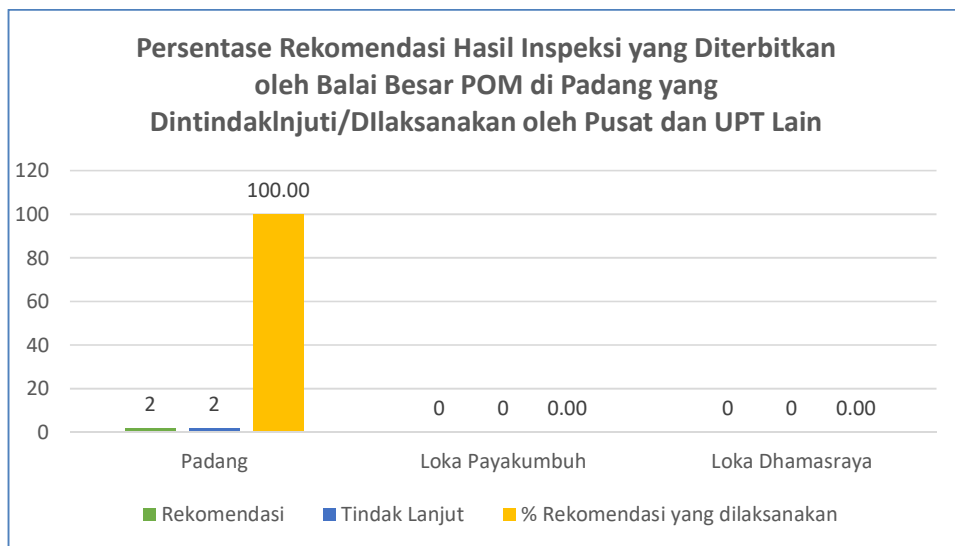
Pada Triwulan II tahun 2021 target indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang adalah 87%. Sedangkan realisasi adalah 87,87% sehingga persentase capaian atas indikator kinerja ini adalah 101,00% dengan kriteria Baik



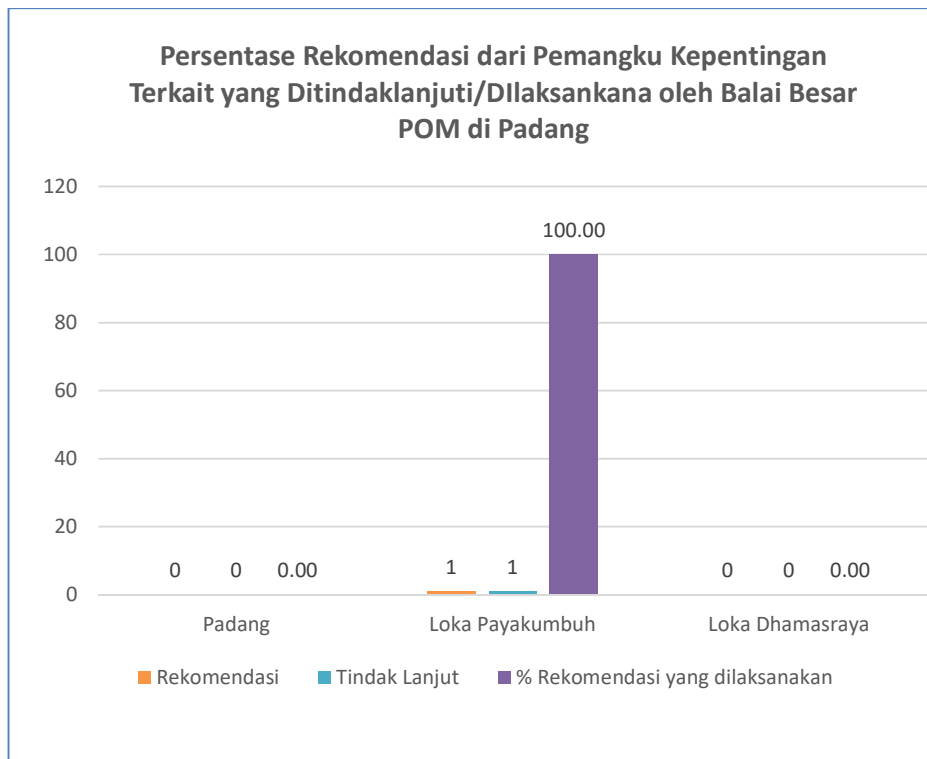
Gambar 3.14 Persentase Keputusan Hasil Inspeksi yang Diterbitkan oleh Balai Besar POM di Padang yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang Triwulan II Tahun 2021



Gambar 3.15 Persentase Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Diterbitkan oleh Pusat yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang Triwulan II Tahun 2021



Gambar 3.16 Persentase Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Diterbitkan oleh Balai Besar POM di Padang yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan oleh Pusat dan UPT Lain Triwulan II Tahun 2021



Gambar 3.17 Persentase Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan Terkait yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang Triwulan II Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang sampai dengan Triwulan II adalah 87,87%. bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 87%, maka capaian sama yaitu sebesar 101,00%

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Balai Besar POM di Padang :

Realisasi Balai Besar POM di Padang terhadap pemenuhan Indikator Kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II adalah 78,03%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada TW I sebesar 38.89 % (capaian sebesar 44,70%), telah terdapat peningkatan angka capaian. Namun jika dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 87 %, maka capaian yang di peroleh sebesar

89, 69 %, capaian ini masih berada di bawah target yang ditetapkan hal ini disebabkan karena :

- a. Petugas kesulitan dalam membagi waktu untuk membuat surat Tindak lanjut karena Padatnya kegiatan pada TW II,
- b. Monitoring yang dilakukan terhadap pembuatan surat Tindak lanjut belum Optimal
- c. Kondisi pandemi Covid-19, menyebabkan beberapa personil terpapar covid-19, sehingga jumlah personil yang dapat diberdayakan untuk kegiatan pemeriksaan berkurang, dan terjadi penumpukan beban kerja pada personil yang berada dalam kondisi sehat.

Loka POM Payakumbuh:

- a. Petugas dapat mengakses setiap rekomendasi yang diterbitkan oleh pusat pada sistem yang ada di bagian pemeriksaan sehingga dapat dilakukan monitoring di lapangan.
- b. Melaksanakan tindak lanjut yang diberikan baik oleh pusat maupun lintas sektor terkait sesuai SOP yang ada.

Loka POM di Dhamasraya :

- a. Masih rendahnya kepedulian pelaku usaha / penanggung jawab sarana untuk memberikan umpan balik terhadap Surat Tindak Lanjut Loka POM di Kabupaten Dhamasraya
- b. Monitoring terhadap umpan balik Surat Tindak Lanjut belum efektif/ belum memadai.
- c. Telah meningkatnya pengetahuan penanggungjawab/pelaku usaha terkait rekomendasi tindak lanjut sehingga adanya perbaikan.

4. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Balai Besar POM di Padang

- a. Perlunya suatu sistem /aplikasi yang dapat membantu petugas dalam pembuatan surat tindak lanjut,
- b. Perlunya aplikasi yang dapat digunakan untuk monev hasil pengawasan.

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan.
- b. Monitoring rekomendasi dari pusat dan lintas sektor terkait yang disampaikan ke Loka POM Payakumbuh yang dapat diakses setiap petugas
- c. Melakukan monitoring terhadap laporan pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM Payakumbuh yang disampaikan / dilaporkan ke Pusat.

Loka POM di Dhamasraya :

- a. Dilakukan pengendalian secara rutin dan monitoring terhadap surat tindak lanjut yang dibuat kepada pihak sarana maupun lintas sektor daerah.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan.
- c. Dibutuhkan alat/fasilitas/aplikasi yang dapat digunakan untuk memudahkan movev rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan.

5. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Rekomendasi perbaikan pada TW I berupa pembuatan aplikasi/ system yang dapat membantu proses pembuatan dan monitoring terhadap pelaksanaan keputusan hasil inspeksi sarana masih dalam tahap pengembangan, sehingga belum dapat difungsikan. Diharapkan dengan adanya aplikasi/ system ini dapat memperpendek waktu dan menghemat tenaga SDM Substansi Pemeriksaan dalam pelaksanaan kegiatan.

B. Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

- ❖ Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan makanan.
- ❖ Pemangku kepentingan adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan yaitu pelaku usaha dan lintas sektor (Pemerintah Daerah,

Kementrian/Lembaga, Organisasi Profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan obat dan makanan.

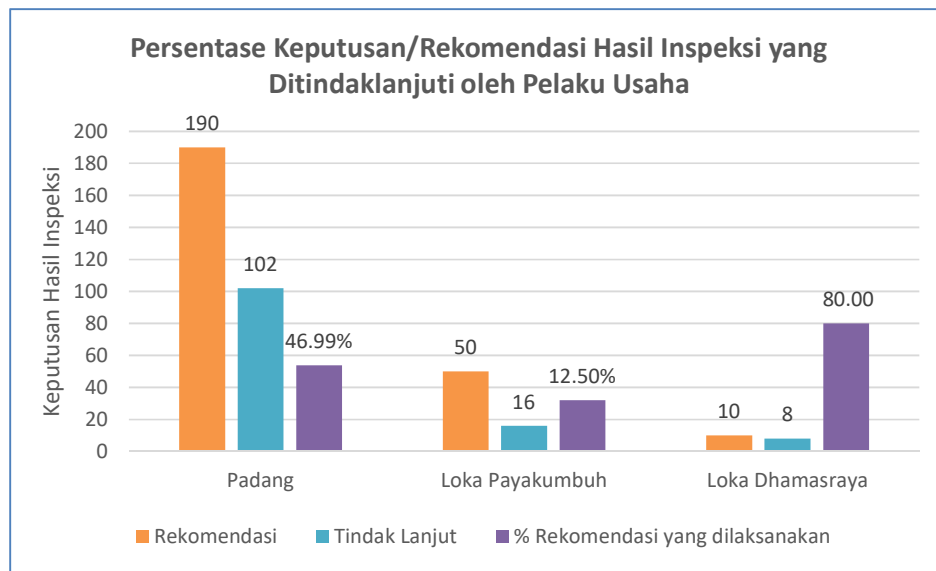
- ❖ Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan, hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.
- ❖ Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Padang

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	41,87	59,81	Kurang

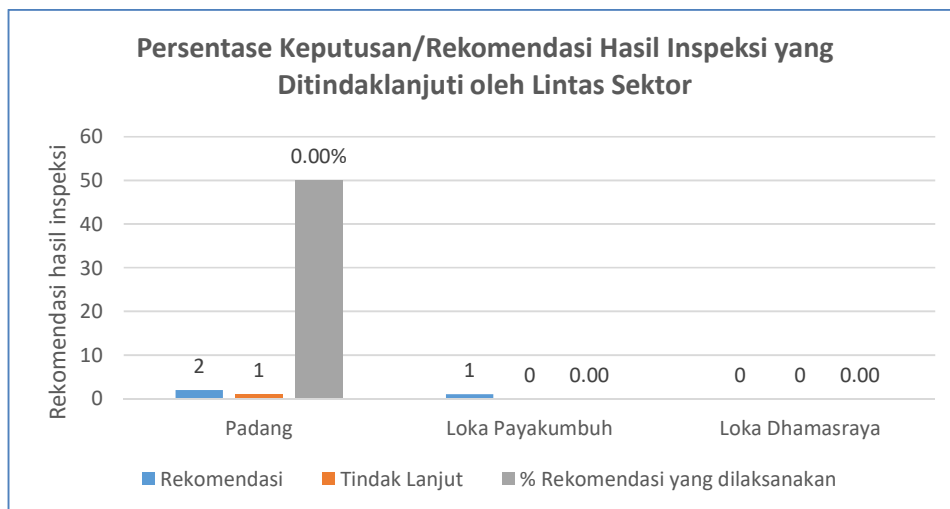
Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan II Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2021

Pada Triwulan II tahun 2021 target indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang adalah 70% dengan realisasi 41,87% sehingga persentase capaian atas indikator kinerja ini pada Triwulan II Tahun 2021 adalah 59,81% dengan kriteria Kurang



Gambar 3.18 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha Triwulan II Tahun 2021



Gambar 3.19 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor Triwulan II Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang adalah 41,87%. bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 70%, maka capaian sama yaitu sebesar 59,81%

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Balai Besar POM di Padang :

- a. Komunikasi dengan pelaku usaha tidak dapat dilakukan dengan intens karena Padatnya kegiatan pada TW II
Alternatif solusi :
Dilakukan komunikasi secara kontiniu kepada pelaku usaha/ pengelola sarana dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan umpan balik terhadap tindak lanjut, tatap muka atau melalui media email, whatsapp, SMS atau telpon.
- b. Analisa penyebab :
Monitoring terhadap hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan belum dapat dilakukan secara optimal
Alternatif solusi
Dibentuk tim untuk melakukan monitoring dan menunjuk penanggungjawab untuk melakukan monitoring pada masing-masing jenis sarana.

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Monitoring terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang telah diberikan kepada sarana secara rutin.
- b. Aktif untuk mengingatkan sarana agar menyampaikan umpan balik terhadap tindak lanjut yang diberikan.

Loka POM di Dhamasraya :

- a. Aktif mengingatkan kembali kepada pelaku usaha/pengelola melalui media email, whatsapp, SMS dan telpon tentang tindak lanjut yang sudah dikirim untuk direspon.
- b. Dilakukan komunikasi secara kontiniu kepada pelaku usaha/ pengelola sarana dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan umpan balik terhadap tindak lanjut, tatap muka atau melalui media email, whatsapp, SMS atau telpon.

Alternatif solusi :

Lebih aktif memantau atau mengingatkan pelaku usaha serta instansi terkait untuk memberikan umpan balik terhadap surat tindak lanjut yang dikeluarkan.

4. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Monitoring terhadap kepastian bahwa surat tindak lanjut yang dikirimkan Balai POM ke Pemerintah Kabupaten/Kota terkait selalu dijalankan, sehingga tidak ada surat yang hilang atau tidak sampai ke tujuan.
- b. Dilakukan komunikasi secara kontiniu kepada pelaku usaha/pengelola sarana dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan umpan balik terhadap tindak lanjut.
- c. Aktif mengingatkan kembali kepada pelaku usaha/pengelola melalui media email, whatsapp, SMS dan telpon tentang tindak lanjut yang sudah dikirim untuk direspon.

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Melakukan monitoring tindak lanjut yang dilakukan oleh petugas untuk mengontrol sarana yang telah menyampaikan perbaikan terhadap rekomendasi tindak lanjut yang diberikan.
- b. Memberikan pendampingan terhadap sarana untuk perbaikan yang dilakukan sesuai tindak lanjut yang diberikan.

Loka POM di Dhamasraya :

Memonitoring tindak lanjut yang diberikan pada pelaku usaha dan melakukan koordinasi dengan lintas sektor.

5. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Balai Besar POM di Padang :

Rekomendasi perbaikan pada TW I berupa pembuatan aplikasi/ sistem kontrol yang dapat membantu proses monitoring terhadap keputusan hasil inspeksi yang ditindaklanjuti pemangku kepentingan masih dalam tahap pengembangan, sehingga belum dapat difungsikan. Diharapkan dengan adanya aplikasi/ sistem ini dapat memperpendek waktu dan menghemat tenaga SDM Substansi Pemeriksaan dalam pelaksanaan kegiatan.

Kontrol terhadap keputusan hasil inspeksi yang ditindaklanjuti pemangku kepentingan telah dilakukan oleh penanggung jawab masing-masing komoditi/sarana yang dikoordinir secara langsung oleh Subkoordinator inspeksi

dan Koordinator pemeriksaan. Hal ini dapat terlihat dari angka realiasi terhadap indikator ini mengalami peningkatan di bandingkan realisasi pada TWI. Realisasi BBPOM di Padang TW I sebesar 45,35 %, sedangkan realisasi pada TW II sebesar 51,84%. Namun demikian monitoring terhadap indikator ini perlu lebih dioptimalkan dan perlu dilakukan pendampingan kepada pelaku usaha agar pelaku usaha dapat menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi.

C. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu terhadap jumlah permohonan penilaian sertifikasi. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

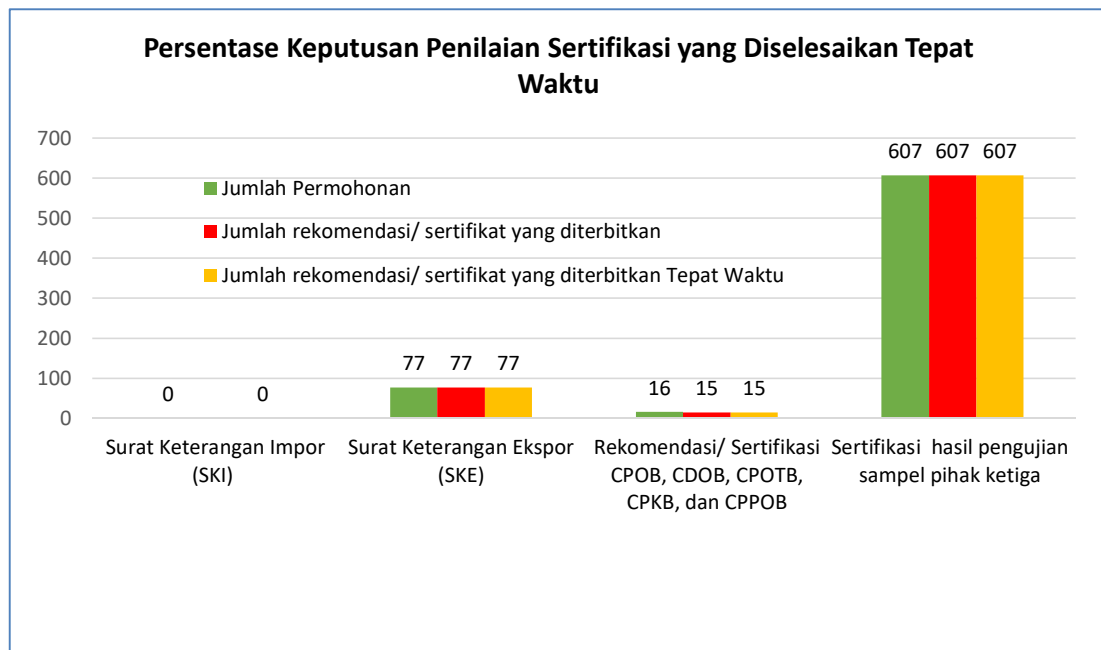
- 1) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
- 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- 3) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- 4) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
- 5) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
- 6) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
- 7) Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
- 8) Sertifikat (Laporan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha (termasuk UMKM), sampel early warning system)

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	99,86	117,48	Sangat Baik

Tabel 3.12.Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan II Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2021

Pada Triwulan II tahun 2021 target indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang adalah 85% dengan realisasi 99,86% sehingga persentase capaian atas indikator kinerja ini adalah 117,82% dengan kriteria Sangat Baik



Gambar 3.20 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang adalah 99,86%, bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 85%, maka capaian sama yaitu sebesar 117,48%

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Balai Besar POM di Padang :

- Petugas telah dapat memastikan kesiapan sarana produksi sebelum dilakukannya proses audit sarana dalam rangka sertifikasi yaitu ruang produksi, dokumen dan SOP, sehingga dapat meminimalisir temuan audit yang menjadi kendala dalam percepatan proses penerbitan rekomendasi.

- Sarana produksi telah menyelesaikan perbaikan temuan (CAPA) yang dipersyaratkan pada triwulan I tahun 2021 yaitu Rendang Umniah dan Dawai sehingga pada triwulan II rekomendasi dapat diterbitkan dalam rangka sertifikasi.
- Komunikasi yang baik terlaksana antara petugas balai dengan pelaku usaha sehingga percepatan penerbitan SKE dapat dipenuhi.
- Meningkatnya komitmen tim pengujian dan administrasi dalam penyelesaian sampel kepolisian dan selalu memprioritaskan layanan pengujian pihak ke 3.
- Bidang Pengujian dalam melaksanakan layanan pengujian pihak ke 3 telah melakukan pengujian sesuai dengan SK Kepala Balai Besar POM di Padang tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Pelaku usaha membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan perbaikan terhadap temuan hasil audit dalam rangka pemenuhan aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sehingga rekomendasi dalam rangka sertifikasi / pendaftaran produk belum dapat diterbitkan.
- b. Petugas aktif melakukan komunikasi dengan pelaku usaha terkait perbaikan sarana / temuan yang harus diperbaiki agar penerbitan rekomendasi dapat segera dilakukan.

Loka POM di Dhamasraya :

- a. Masih dilakukan pembinaan/pendampingan terhadap pelaku usaha dalam rangka penerbitan rekomendasi.
- b. Perbaikan temuan yang terlalu lama diselesaikan oleh pelaku usaha serta kurangnya komitmen pelaku usaha.

4. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Balai Besar POM di Padang :

Capaian kinerja sertifikasi pada Triwulan II tahun 2021 yaitu tercapainya persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 99,86 % (target 85 %), maka tim sertifikasi akan tetap mempertahankan kinerjanya dengan meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait pemenuhan GMP sarana

produksi. Kegiatan lainnya yang dapat menunjang keberhasilan program kegiatan diantaranya :

- a. Koordinasi dengan dinas terkait di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM di wilayah Sumatera Barat.
- b. Melakukan Forum Konsultasi Publik secara berkala kepada pelanggan layanan pengujian pihak ke 3 agar dalam menentukan kebijakan Layanan Pengujian Pihak ke 3 dapat dilibatkan dan dikomunikasikan kepada seluruh pelanggan sehingga kebijakan dapat dilaksanakan secara transparan kepada pihak ke 3.
- c. Koordinasi dengan Instansi Terkait/ Pemerintah Daerah dalam hal pengujian melalui Jejaring Laboratorium di daerah
- d. Peningkatan kompetensi teknis petugas sertifikasi dan laboratorium.

Loka Payakumbuh

- a. Petugas aktif melakukan komunikasi terhadap pelaku usaha yang sudah diberikan pembinaan terhadap sarana produksi yang akan berproses untuk pendaftaran produk juga terhadap kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha.
- b. Pemahaman yang sama kepada petugas yang memberikan pendampingan terhadap pelaku usaha.

Loka POM di Dhamasraya :

- a. Koordinasi dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) untuk mendapatkan data sarana yang akan dilakukan pembinaan untuk sertifikasi.
- b. Petugas aktif melakukan komunikasi terhadap pelaku usaha untuk melakukan pembinaan baik secara langsung maupun via online.

5. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Evaluasi dan Analisa terkait Tindak Lanjut atas rekomendasi Perbaikan dalam proses penerbitan rekomendasi/sertifikasi akan dilakukan beberapa strategi percepatan, diantara :

- a. Melakukan monitoring terhadap setiap permohonan izin edar dengan menetapkan petugas yang bertanggungjawab terhadap evaluasi izin edar
- b. Petugas akan selalu memastikan sarana produksi telah siap untuk diaudit dalam rangka sertifikasi dengan melakukan beberapa kali fasilitasi ke sarana produksi.

- c. Petugas akan mengkonfirmasi kembali pelaku usaha dengan kesiapan dan komitmennya untuk memenuhi persyaratan audit sertifikasi.
- d. Petugas akan lebih meningkatkan komunikasi dengan pelaku usaha dan petugas Badan POM bila ada kendala terkait proses registrasi di aplikasi.
- e. Petugas sertifikasi dan pengujian lebih meningkatkan komunikasi terkait layanan sertifikat (Laporan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha (termasuk UMKM), sampel early warning system.

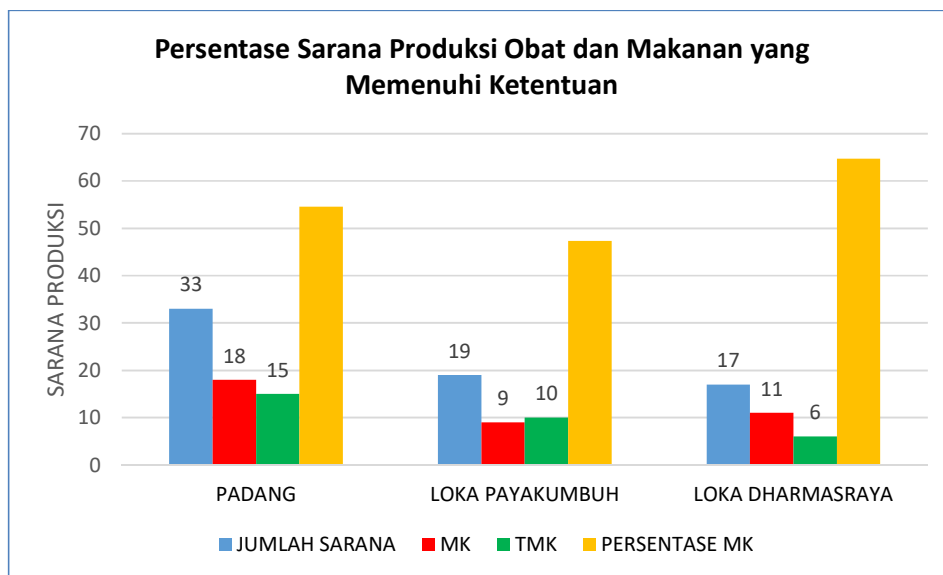
D. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	49	55,07	112,39	Sangat baik

Tabel 3.13. Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2021

Pada Triwulan II tahun 2020 target indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang adalah 49%. Sedangkan realisasi adalah 55,07 %, sehingga persentase capaian atas indikator kinerja ini adalah 112,39% dengan kriteria Sangat baik. Realisasi dihitung terhadap jumlah sarana dengan kategori Memenuhi Ketentuan sebanyak 38 sarana dari 69 sarana yang diperiksa sampai dengan Triwulan II tahun 2021.



Gambar 3.21 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang sampai dengan triwulan II Tahun 2021 adalah 55,07%, bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 49%, maka capaian sama yaitu sebesar 112,39%

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Balai Besar POM di Padang

Sarana yang dikunjungi pada Triwulan II adalah Industri Pangan MD, Industri Pangan Rumah Tangga (IRTP) dan industri kosmetik (IKOS) yang dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2021.

- Sarana Industri pangan MD sudah meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan penerapan aspek CPPOB.
- Sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan pada umumnya ditemukan label Produk IRTP yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
- Sarana Industri kosmetik sudah memenuhi ketentuan terhadap penerapan aspek CPKB

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Sebagian besar dari target pemeriksaan sarana produksi Loka POM di Kota Payakumbuh adalah Industri pangan MD yang sudah meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan penerapan aspek CPPOB.

Loka POM di Dhamasraya :

- a. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik Industri Rumah Tangga Pangan (CPPB-IRT)
- b. Sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan pada umumnya tidak memenuhi ketentuan Label Produk IRTP dengan temuan bersifat Kritis

4. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Balai Besar POM di Padang :

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja perlu dilakukan kegiatan : Membuat kajian terhadap temuan ketidaksesuaian yang banyak ditemui pada sarana produksi dan melakukan bimbingan teknis, jika diperlukan melakukan pendampingan saat produksi serta pemberian penjelasan aturan yang harus dipenuhi oleh sarana produksi baik secara langsung saat pengawasan ataupun melalui surat rekomendasi tindak lanjut yang diberikan.

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha industri pangan untuk menerapkan CPPOB secara konsisten.
- b. Memberikan pemahaman aspek CPPB-IRT pada pelaku usaha yang harus dilaksanakan oleh sarana produksi
- c. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan pemahaman CPPB-IRT terhadap IRTP.

Loka POM di Dhamasraya :

- a. Memberikan bimbingan tentang CPPB-IRT pada saat kunjungan dan melalui penyuluhan kepada pelaku usaha
- b. Meningkatkan koordinasi dengan dinas kesehatan untuk turut serta memberikan pembinaan kepala pelaku usaha IRTP agar pelaku usaha memahami CPPB-IRT.

5. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

- a. Telah dilakukan koordinasi yang baik dengan Dinas Kesehatan pada masing-masing Kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam rangka pembinaan dan pengawasan sarana produksi IRTP. Adanya dana alokasi khusus pada semua Kabupaten /Kota yang ada di Sumatera Barat dapat meningkatkan peranan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha terutama pelaku usaha IRTP terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB),
- b. Memberikan bimbingan kepada pelaku usaha secara langsung pada saat pengawasan sarana dan melakukan pendampingan proses perbaikan atas temuan ketidaksesuaian telah dilaksanakan dan ini memberikan hasil meningkatnya jumlah sarana produksi yang memenuhi ketentuan.

E. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

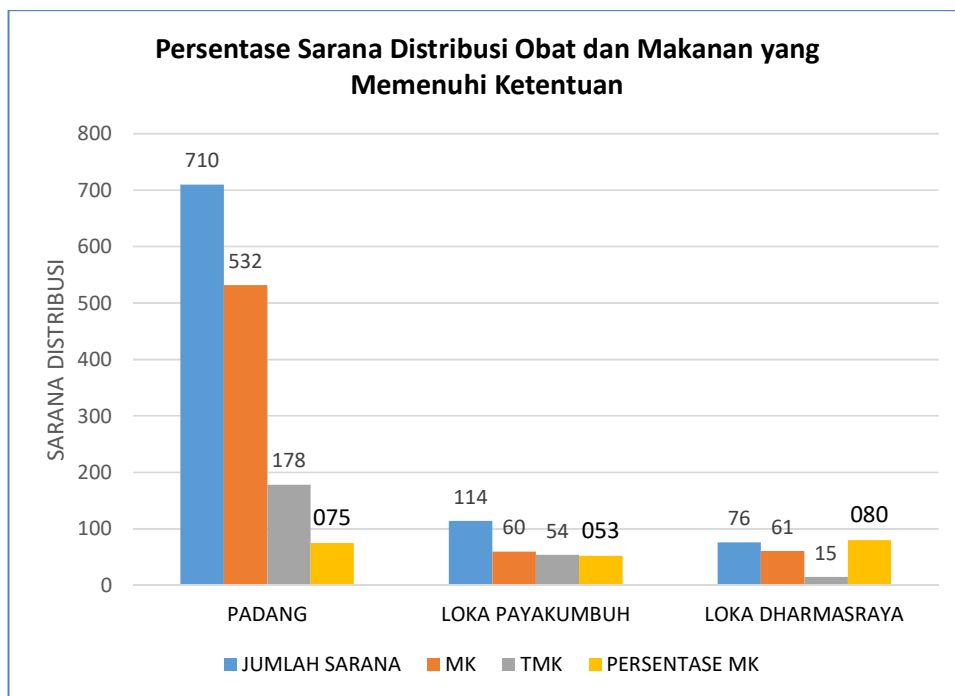
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62	72,56	117,03	Sangat Baik

Tabel 3.14. Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2021

Pada Triwulan II tahun 2021 target indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang adalah 62% dengan realisasi 72,56% sehingga persentase capaian atas indikator kinerja ini adalah 117,03% dengan kriteria Sangat Baik.

Realisasi dihitung terhadap jumlah sarana dengan kategori Memenuhi Ketentuan sebanyak 653 sarana dari 900 sarana yang diperiksa sampai dengan Triwulan II tahun 2021.



Gambar 3.22 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang adalah 72,56%. bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 62%, maka capaian sama yaitu sebesar 117,03%

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Balai Besar POM di Padang :

Tercapainya kinerja sasaran ini disebabkan oleh :

Semakin meningkatnya jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan serta sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi ketentuan, merupakan dampak pembinaan yang dilakukan secara langsung oleh petugas BBPOM di Padang pada saat pengawasan serta dilakukannya pendampingan kepada pihak sarana dalam melakukan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian hasil pengawasan.

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Rendahnya persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan disebabkan karena pemilihan sarana berdasarkan analisis resiko, menyebabkan sarana terpilih sebagian merupakan sarana dengan tingkat kepatuhan rendah.
- b. Sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan untuk sarana pelayanan kefarmasian adalah Apotek karena target sarana dipilih sarana dengan tingkat kepatuhan rendah.
- c. Untuk sarana distribusi obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan banyak ditemukan pada sarana distribusi kosmetik karena masih banyak ditemukan produk kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) pada sarana tersebut.

Loka POM di Dharmasraya :

Sarana distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Dharmasraya dibagi atas dua wilayah kabupaten, yaitu Sijunjung dan Dharmasraya, kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan adalah : SDM di loka terbatas, adanya kegiatan di luar perencanaan yang mendadak dan Untuk pemilihan sarana berdasarkan analisis resiko.

Untuk analisis keberhasilan : Bertambahnya persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan disebabkan karena beberapa sarana telah ada kepedulian dan adanya perbaikan. Adanya peningkatan pengetahuan penanggungjawab/pemilik sarana distribusi.

4. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Balai Besar POM di Padang :

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja perlu dilakukan kegiatan : Melakukan analisa dan kajian terhadap temuan -temuan ketidaksesuaian yang sering ditemukan pada saat pengawasan dan akar masalah/penyebab terjadinya temuan. Dan perlu dilakukan tindak lanjut terhadap hasil Analisa dan kajian untuk memberikan arah dalam melakukan kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan dan sarana pelayanan kefarmasian.

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Terhadap sarana dilakukan monitoring terhadap perbaikan yang dilakukan sehingga untuk pemeriksaan berikutnya tidak ditemukan lagi ketidaksesuaian yang sama.
- b. Melakukan bimbingan teknis (BIMTEK) kepada pelaku usaha obat terutama pelayanan kefarmasian agar melakukan pengelolaan obat sesuai dengan ketentuan.

Loka POM di Dhamasraya :

- a. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasin secara rutin
- b. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam hal melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi obat, terutama sarana distribusi milik pemerintah.
- c. dilakukan bimtek secara langsung saat pengawasan ataupun bimtek secara klasikal ataupun daring dengan penanggungjawab/pemilik sarana.
- d. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas Loka POM di Kab. Dharmasraya.

5. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Untuk lebih meningkatkan capaian indikator ini telah diupayakan pemberian sanksi yang lebih tegas dan langsung ke sarana serta pengamanan produk obat dan makanan yang ditemukan di sarana bila ditemukan produk tidak ada izin edar/ tidak sesuai aturan. Juga diberikan peringatan dan peringatan keras untuk sarana yang temuannya berulang.

F. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Balai Besar POM di Padang berdasarkan 6 aspek meliputi : kegiatan pelayanan (30%), profesionalitas SDM (18%), Sarana Prasarana (15%), Sistem Informasi pelayanan Publik (SIPP) (15%), Konsultasi dan Pengaduan (15%) dan Inovasi (7%).

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Pelayanan Publik	3,76	4,42	117,55	Sangat Baik

Tabel 3.15. Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2021

Target indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang adalah 3,76 dengan realisasi 4,42 sehingga persentase capaian atas indikator kinerja ini adalah 117,55% dengan kriteria Sangat Baik.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Realisasi Indeks Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang adalah 4,42%. bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 3,76 maka capaian sama yaitu sebesar 117,55%

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

- Penerapan kebijakan Standar Layanan Publik di Balai Besar POM di Padang
- Ketepatan waktu dalam pelayanan (SKI/SKE, Sertifikat hasil pengujian serta pelayanan informasi dan pengaduan

4. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan pengujian dan fasilitas layanan Publik
- Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan dengan sosialisasi secara virtual.
- Melakukan inovasi pelayanan seperti on billing code, daring dan customer day

5. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

- Pelayanan publik harus lebih ditingkatkan lagi, selalu menciptakan inovasi serta implementasi inovasi yang telah direncanakan sehingga dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat menuju pelayanan prima

3.1.5 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN V

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 4 indikator kinerja utama,. Hasil capaian rata-rata ketiga indikator tersebut adalah 138,01%. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,54	92,38	102,03	Baik
1.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40%	50%	125	Tidak dapat disimpulkan
2.	Jumlah desa pangan aman	40%	65%	162,50	Tidak dapat disimpulkan
3.	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	40%	65%	162,50	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 3.16. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan V

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-V sebagai berikut :

A. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	40%	50%	125,00	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 3.17. Capaian Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan II Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2021

Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2021 adalah 50% dari target sebesar 40% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 125% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman adalah 50% bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 100% atau 40 sekolah, maka capaian terhadap target akhir tahun adalah sebesar 50%.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- a. Pelaksanaan Advokasi disesuaikan dengan agenda Pemerintah Daerah sehingga setiap OPD terkait dapat hadir. Pada bulan April advokasi berhasil dilaksanakan di dua daerah yaitu Kabupaten Tanah Datar dan Pariaman dengan menerapkan protokol kesehatan
- b. Pemerintah Daerah (Walikota/Bupati) berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan keamanan pangan di daerah intervensi yang dipilih sebagai pilot project keamanan pangan
- c. Sosialisasi Keamanan Pangan dilakukan secara daring pada tanggal 24 April 2021 dengan peserta berasal dari 17 sekolah intervensi A dan 39 sekolah cakupan perluasan program PJAS kemudian dilanjutkan tanggal 6 Mei 2021 dengan peserta dari 3 sekolah intervensi A dan 16 sekolah cakupan perluasan.
- d. Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah dilaksanakan pada bulan april di masing-masing Kabupaten/Kota intervensi yaitu Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten 50 Kota dengan peserta terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, dan Orang Tua Siswa/Komite Sekolah masing-masing sekolah intervensi, serta penanggung jawab kegiatan PJAS dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan
- e. Pemberian paket edukasi keamanan pangan terhadap 20 sekolah intervensi A dan produk informasi keamanan pangan terhadap 55 sekolah cakupan perluasan terlaksana di Bulan April
- f. Monitoring pemberdayaan kader dilaksanakan selama bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2021 via whatsapp group kader keamanan pangan sekolah dan juga melalui bit.ly/MKKPS2021 untuk melihat bukti fisik yang telah diupload oleh kader setelah melaksanakan kegiatan PJAS secara mandiri

4. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Koordinasi dengan lintas sektor terus dilanjutkan sejak dilaksanakannya

audiensi pada bulan Februari melalui Whatsapp dan telepon sehingga didapatkan jadwal advokasi yang disepakati bersama dua daerah di bulan April yaitu Kota Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar

- b. Pada advokasi dilaksanakan penandatanganan lembar komitmen mendukung penuh pelaksanaan intervensi keamanan pangan dari Balai Besar POM di Padang melalui program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah oleh Pemerintah Daerah (Walikota/Bupati).
- c. Rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan setelah advokasi pada sekolah calon intervensi disepakati bersama pada saat advokasi.
- d. Sosialisasi Keamanan Pangan dilakukan secara daring pada tanggal 24 April 2021 yang tidak dihadiri oleh seluruh undangan dikarenakan adanya keterbatasan untuk akses zoom meeting di beberapa daerah. Oleh karena itu, didiskusikan bersama melalui whatsapp group dan disepakati pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan sekolah untuk peserta yang belum mengikuti pada tanggal 6 Mei 2021
- e. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Sekolah terlaksana bulan April di masing-masing Kabupaten/Kota dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadwal pelaksanaan bimtek ini telah didiskusikan dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan masing-masing Kabupaten/Kota sehingga dapat dilaksanakan secara tatap muka.
- f. Pemberian paket edukasi terhadap 20 sekolah Intervensi A dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Bimtek Keamanan Pangan Sekolah, sedangkan pemberian produk informasi terhadap 55 sekolah cakupan perluasan diberikan melalui Dinas Pendidikan masing-masing Kabupaten/Kota pada bulan April
- g. Monitoring pemberdayaan kader dilakukan setiap minggu melalui whatsapp group kader keamanan pangan sekolah masing-masing Kabupaten/Kota
- h. Dukungan dari Pimpinan Pemerintah Daerah dan pembinaan dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

5. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

- a. Follow up SK Tim Keamanan Pangan Terpadu yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota)
- b. Melakukan konfirmasi kesanggupan sekolah dalam mengikuti kegiatan secara daring

- c. Monitoring pemberdayaan kader melalui bit.ly/MKKPS2021 dan whatsapp group kader keamanan pangan sekolah dilakukan setiap hari

B. Jumlah Desa Pangan Aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah desa pangan aman	40%	65%	162,50	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 3.18. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan II Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2021

Realisasi Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang sampai dengan Triwulan II tahun 2021 adalah sebesar 65% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan II tahun 2021 sebesar 162,50% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Realisasi Jumlah desa pangan aman adalah 65% bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 100%, atau 18 desa, maka capaian terhadap target akhir tahun adalah sebesar 65%

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- a. Tahapan kegiatan Desa Pangan Aman yaitu Bimtek Komunitas dan pelaku usaha pangan Desa, Fasilitasi keamanan pangan tahap I dan Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan (pre-intervensi) dilakukan secara serentak dan dilakukan secara berkelanjutan di 11 nagari/desa/kelurahan
- b. Koordinasi dengan lintas sektor dan nagari/desa/kelurahan terkait persiapan kegiatan terus dilakukan sehingga kegiatan dapat segera dilaksanakan.
- c. Adanya penunjukan penanggungjawab kegiatan untuk setiap Kabupaten/Kota yang akan diintervensi

4. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Jadwal kegiatan disusun fleksibel serta berkoordinasi dengan lintas sektor dan nagari/desa/kelurahan yang diintervensi secara berkesinambungan.
- b. Memberdayakan seluruh sumber daya yang ada sehingga kegiatan dapat dilakukan secara paralel .
- c. Pemilihan Kader dari Nagari/desa/kelurahan yang diintervensi adalah kader yang memiliki keinginan yang tinggi untuk mendapatkan pengetahuan tentang keamanan pangan
- d. Dukungan dari stakeholder/Dinas terkait terhadap kegiatan Desa Pangan Aman

5. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

- a. *Memfollow-up* agar SK Tim Terpadu pengawasan obat dan makanan segera dibentuk oleh Kabupaten / Kota yang diintervensi
- b. Kegiatan Desa Pangan Aman diharapkan dapat direplikasi oleh Dinas terkait sehingga kegiatan dapat dilakukan secara mandiri dengan jangkauan yang lebih luas
- c. Melanjutkan kegiatan pada tahap selanjutnya yaitu Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Tahap 2, Monev dan Pengawasan Desa tahun sebelumnya

C. Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	40%	65%	162,50%	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 3.19. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Triwulan II Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2021

Realisasi Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2021 adalah sebesar 65% dari target sebesar 40% sehingga capaian yang diperoleh samapi dengan Triwulan II tahun 2021 sebesar 162,50% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Realisasi Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya adalah 65% bila dibandingkan dengan target akhir tahun 6 pasar atau sebesar 100%, maka capaian terhadap target akhir tahun adalah sebesar 65%

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- a. Adanya dukungan dan perkuatan kerjasama dari Pimpinan Pemerintah Daerah dan pembinaan dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
- b. Pelaksanaan Audiensi Keamanan Pangan Terpadu sudah terlaksana sejak bulan Februari 2021 dalam rangka persiapan pelaksanaan Advokasi Kegiatan Keamanan Pangan Terpadu.
- c. Pelaksanaan Advokasi Keamanan Pangan Terpadu sudah dapat terlaksana di dua daerah di bulan Maret yaitu Kota Sawahlunto dan Kabupaten 50 Kota, dua daerah di bulan April yaitu Kota Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di era new normal.
- d. Kegiatan Survey Pasar terlaksana bulan April 2021 di dua titik pasar yang akan diintervensi.
- e. Kegiatan Bimbingan teknis pengelola Pasar dan fasilitator terlaksana bulan april dilaksanakan dan sesuai juknis new normal yang telah ditetapkan Badan POM dengan menerapkan protokol kesehatan
- f. Kegiatan Fasilitator Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya terlaksana bulan Mei dilaksanakan dan sesuai juknis new normal yang telah ditetapkan Badan POM dengan menerapkan protokol kesehatan
- g. Kegiatan Monitoring dan evaluasi Tahap I Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya terlaksana bulan Juni dilaksanakan dan sesuai juknis new normal yang telah ditetapkan Badan POM dengan menerapkan protokol kesehatan
- h. Penambahan SDM dibidang Informasi dan Komunikasi

4. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan II dan sudah dilaksanakan survey pasar, Bimbingan teknis pengelola Pasar dan fasilitator, Fasilitator Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya, Monitoring dan evaluasi Tahap I Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya yang akan diintervensi.

- b. Perkuatan Kerjasama lintas sektor dilakukan dengan koordinasi dengan Lintas sektor dan pemerintah kabupaten /Kota di Sumatera Barat
- c. Melakukan *Continuous Improvement* dibidang Infokom dengan Penataan Manajemen sumber daya manusia dan peningkatan akuntabilitas kinerja sebagai implementasi program Reformasi Birokrasi Pemerintah menuju *Good governance* dan *Clean Government*

5. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

- a. Tahapan kegiatan Pasar Aman dari bahan berbahaya pada triwulan 2 dilakukan secara tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan agar edukasi dapat tersampaikan dengan baik
- b. Membuat SK Tim Petugas pengelola Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya, Keamanan Pangan Terpadu yang akan dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar POM di Padang)
- c. Monitoring pemberdayaan Petugas pengelola Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya, melalui whatsapp group Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2021 (PPABK, BBPOM Padang)
- d. Komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pengawalan kegiatan keamanan pangan terpadu.

3.1.6 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VI

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

S

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 138,96% dengan Tidak dapat disimpulkan. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40	51,04	127,60	Tidak Dapat Disimpulkan
2.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	35	52,61	150,31	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 3.20. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VI

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-VI sebagai berikut :

A. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

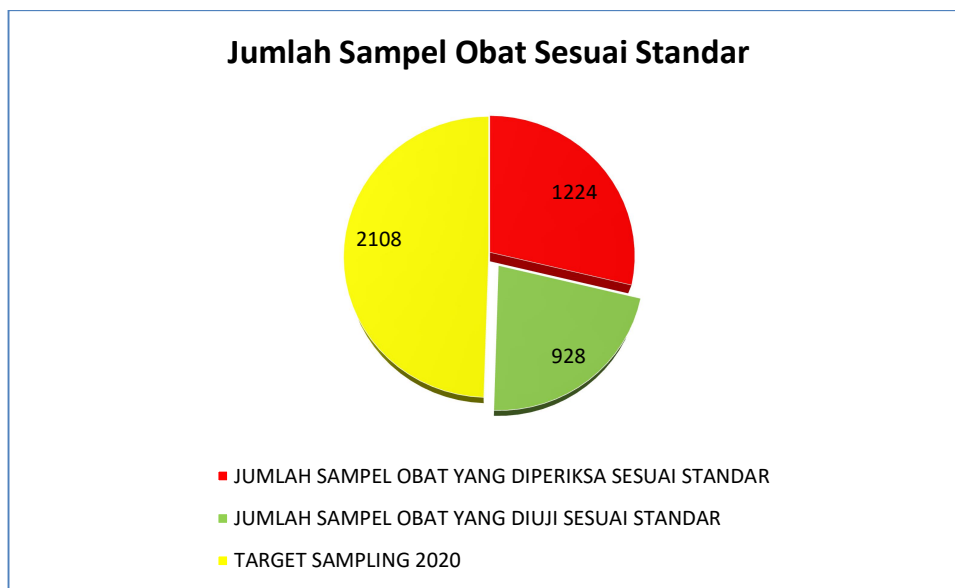
Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40	51,04	127,60	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 3.21. Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2021

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2021 adalah 51,04% dari target sebesar 40% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan II tahun 2021 sebesar 127,60% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan



Gambar 3.23 Jumlah Sampel Obat Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2021 adalah 51,04.%, bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 91% , maka capaian terhadap target akhir tahun adalah sebesar 56,09%

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- a. Melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan SOP serta Pedoman Sampling dan Pengujian

Analisa: Pada TW II ini masih ada sampel yang disampling belum sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian, dan jadwal sampel yang masuk ke Laboratorium masih ada yang belum sesuai perencanaan

- b. Sampel yang masuk ke laboratorium belum sesuai perencanaan

Analisa: Pada perencanaan sampel yang akan disampling tercantum jumlah sampel acak dan targetted yang dibuat pertahun dan perbulan. Pada pelaksanaan sampling masih ada beberapa komoditi produk yang disampling tidak sesuai jumlah sampel yang direncanakan terutama sampel Acak dan kategori sampel yang masih belum dipahami oleh bagian sampling.

- c. Reagensia yang dibutuhkan belum memadai
Analisa: Pengadaan reagensia yang diadakan untuk tahun 2021 sudah dilakukan pada TW II ini, tetapi reagensia yang datang masih belum memenuhi semua reagensia yang ditenderkan. Untuk selanjutnya perlu percepatan pengadaan oleh PPK. Adanya kebutuhan reagensia untuk memenuhi parameter uji baru untuk memenuhi pedoman prioritas sampling dan SKL.
- d. Ketersediaan baku pembanding dan baku pembanding internal
Analisa : Baku pembanding dan baku pembanding internal dari sampel target prioritas sampling yang tidak tersedia di P3OMN tetapi sebelumnya belum dikonfirmasi ketersediaannya bisa menyebabkan pengujian terhambat dan tidak sesuai prosedur, sedangkan untuk pengadaannya terkendala anggaran dan ketersediaannya di pasaran
- e. Sampel yang masuk ke laboratorium masih ada yang belum sesuai perencanaan
Analisa: Pada perencanaan sampel yang akan disampling tercantum jumlah sampel acak dan targetted yang dibuat pertahun dan perbulan. Pada pelaksanaan sampling masih ada beberapa komoditi produk yang disampling tidak sesuai jumlah yang direncanakan
- f. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengujian terhadap PUK dan Timeline
Analisa: Dalam pelaksanaan pengujian, penguji dan penyelia harus melakukan monitoring terhadap PUK dan timeline pengujian sesuai pedoman sampling dan pengujian. Pada TW II ini semua sampel diuji sesuai PUK dan untuk sampel obat terdapat 2 item sampel yang melewati timeline disebabkan karena penegasan uji sampel yang TMS. Pada TW II ini semua sampel kosmetik dapat dilakukan sesuai PUK dan timeline.
- g. Peningkatan kompetensi penguji
Analisa: Untuk memenuhi indikator target pengujian, maka kompetensi penguji dalam memahami pedoman sampling dan pengujian sangat diperlukan. Karena dengan pemahaman dan kompetensi penguji maka sampel dapat diuji sesuai standar. Pada TW II ini telah dilakukan peningkatan kompetensi penguji melalui pelatihan instrumen dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi seperti ICP MS dan GC MS. Pada laboratorium kosmetik telah dilakukan Pelatihan Analisis Senyawa Polar secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi untuk peningkatan kompetensi pengujian Penetapan Kadar AHA dalam sediaan kosmetik

- h. Koordinasi antara Substansi Pemeriksaan, Substansi Penindakan Substansi Pengujian dan Bagian Tata Usaha

Analisa: Koodinasi antar Substansi sangat diperlukan terutama dalam hal sampling, karena ketidaktersediaan reagensia, baku pembanding, suku cadang, kerusakan alat laboratorium dapat menjadi kendala dalam pengujian, maka perlu disepakati bersama untuk sampling sampel yang terkendala tersebut. Juga terhadap penerimaan sampel di TPS maka koordinasi ketiga substansi sangat dibutuhkan sehingga pelaksanaan penerimaan sampel dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Termasuk untuk sampel TIE, sampel UMKM dalam rangka registrasi, dan sampel kasus dari Substansi Penindakan.

4. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Peningkatan kemampuan ruang lingkup pengujian

Analisa: Dengan peningkatan ruang lingkup pengujian maka sampel yang diuji dengan parameter (PUK) yang diwajibkan pada pedoman sampling dan pengujian, akan dapat tercapai. Peningkatan ruang lingkup pengujian dengan cara mengusulkan sampel yang belum masuk ruang lingkup tsb untuk disampling Substansi Pemeriksaan, kemudian melakukan pengujiannya.

- b. Pengadaan baku pembanding secara mandiri

Analisa: Ketersediaan baku pembanding di P3OMN belum memadai sehingga P3OMN merekomendasikan agar Balai melakukan pengadaan baku pembanding secara mandiri, tapi Balai harus menyediakan anggaran untuk pengadaannya. Pada TW II masih belum ada baku pembanding yang diadakan secara mandiri, mengingat harganya mahal, anggaran khususnya belum tersedia dan ketersediaannya di pasaran sulit.

- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sampel yang diuji di laboratorium

Analisa: Substansi Pengujian secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan PUK dan timeline sampel yang diuji sehingga pengujian yang dilakukan dapat dikelola dengan baik dan pada TWII ini sampel yang diuji hampir semuanya memenuhi standar, kecuali 2 item sampel obat yang dilakukan pengulangan uji untuk mempertegas hasil yang TMS , sehingga penyelesaiannya melewati timeline.

5. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

- a. Rekomendasi perbaikan kinerja sebelumnya adalah pengadaan reagensia, baku pembanding dan pemeliharaan Alat Laboratorium.
 - Evaluasi dan Analisa: Dari hasil evaluasi didapat bahwa reagensia yang digunakan pada awal tahun 2021 dan sampai TW II ini masih menggunakan sisa reagensia tahun 2020 dan sudah ada beberapa yang menggunakan reagensia hasil pengadaan tahun 2021. Untuk itu tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah percepatan pengadaan reagensia dan jumlah anggaran untuk pengadaan reagensia perlu ditambah karena ada beberapa reagensia yang tidak terpenuhi.
 - Untuk alat laboratorium yang sering rusak (contoh AAS) perlu penambahan anggaran untuk pemeliharaan sehingga alat laboratorium dapat terpelihara dengan baik, dan penambahan alat AAS yang baru, karena semua Laboratorium Kimia sejak tahun 2020 sudah menggunakan AAS untuk pengujian parameter Logam (PUK) yang berakibat frekwensi penggunaan AAS sangat tinggi.
 - Pengadaan baku pembanding yang tidak tersedia di P3OMN perlu penyediaan anggaran khusus karena harga baku pembanding sangat mahal dan sulit dipasaran, namun anggaran yang tersedia masih terbatas.
 - Untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung laboratorium diperlukan anggaran yang mencukupi agar instrument utama untuk pengujian dapat terpelihara contohnya AC diruangan instrument GC sangat dibutuhkan dengan jumlah atau kapasitas yang memadai karena alat mengeluarkan panas terutama jika semua alat di ruangan tersebut sedang berjalan.
- b. Ketepatan jadwal masuknya sampel ke laboratorium sesuai dengan perencanaan dan kesepakatan saat rapat perencanaan dengan Substansi Pemeriksaan, agar penyelesaian pengujian sampel bisa sesuai target yang direncanakan.

B. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Sampel makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

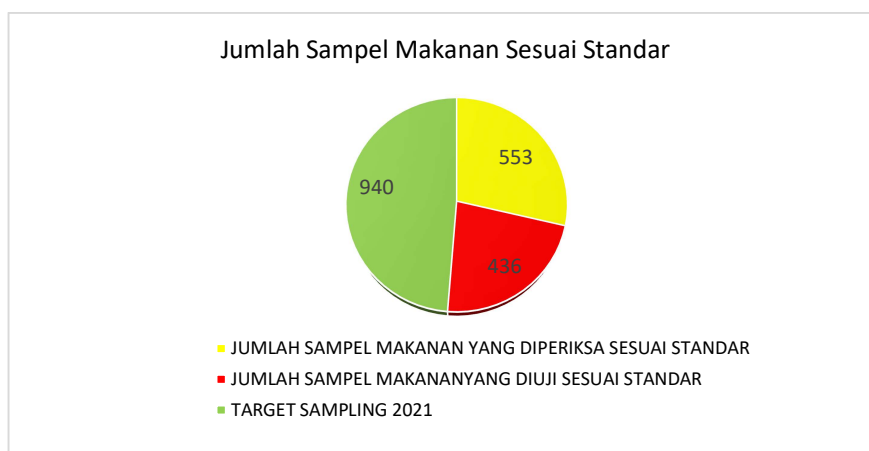
Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	35	52,61	150,31	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 3.22. Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2021

Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2021 adalah 52,61% dari target sebesar 35% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan II tahun 2021 sebesar 150,31% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.



Gambar 3.24. Jumlah Sampel Makanan Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2021 adalah 52,61%, bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 87% , maka capaian terhadap target akhir tahun adalah sebesar 60,47%

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- a. Melakukan sampling dan pengujian sesuai pedoman sampling dan pengujian, serta sesuai SOP

Analisa: Substansi Pemeriksaan, Pengujian dan Bagian TU serta Loka POM pada awal tahun telah melakukan kesepakatan dalam perencanaan sampel yang akan disampling terkait jumlah dan waktu sampling. Pada TW II ini masih ada sampel yang disampling belum sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian, dan jadwal sampel yang masuk ke Laboratorium ada yang belum sesuai perencanaan.

- b. Reagensia yang dibutuhkan tidak memadai

Analisa: Pengadaan reagensia yang diadakan untuk tahun 2021 belum dilakukan pada awal tahun, sehingga untuk pelaksanaan kegiatan pengujian masih menggunakan pengadaan reagensia tahun 2020, tetapi tidak mencukupi sehingga perlu percepatan pengadaan reagensia oleh PPK. Terutama reagensia untuk sampel DAK yang berasal dari Kabupaten / Kota , reagensia untuk Pangan fortifikasi dan reagensia dalam rangka Mobkel yang belum dianggarkan sehingga dalam pelaksanaan dilakukan pengadaan langsung

- c. Sampel yang masuk ke laboratorium belum sesuai perencanaan

Analisa: Pada perencanaan sampel yang akan disampling tercantum jumlah sampel acak dan targetted yang dibuat pertahun dan perbulan. Pada pelaksanaan sampling masih ada beberapa komoditi produk yang disampling tidak sesuai jumlah sampel yang direncanakan terutama sampel Acak.

- d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengujian terhadap PUK dan Timeline

Analisa: Dalam pelaksanaan pengujian, penguji dan penyelia harus melakukan monitoring terhadap PUK dan timeline pengujian sesuai pedoman sampling dan pengujian. Pada TWII ini ada sampel yang diuji tidak dapat memenuhi PUK dan timeline.

- e. Peningkatan kompetensi penguji

Analisa: Untuk memenuhi indikator target pengujian, maka kompetensi penguji dalam memahami pedoman sampling dan pengujian sangat diperlukan. Karena dengan pemahaman dan kompetensi penguji maka sampel dapat diuji sesuai standar. Pada TWII ini untuk laboratorium Pangan untuk meningkatkan kompetensi petugas dilakukan pelatihan Analisis dengan Instrumen HPLC detector Fluresence (Penetapan Kadar Aflatoxin B1,B2, G1 dan G2 dalam Bumbu siap pakai)

- f. Koordinasi antara Substansi Pemeriksaan, Substansi Pengujian dan Bagian Tata Usaha

Analisa: Koordinasi antar Substansi sangat diperlukan terutama dalam hal sampling, karena terkadang pada saat reagensia, suku cadang dan alat laboratorium mengalami kendala maka perlu disepakati bersama kegiatan sampling pada saat tersebut. Dan juga terhadap penerimaan sampel di TPS maka koordinasi ketiga substansi sangat dibutuhkan sehingga pelaksanaan penerimaan sampel dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

4. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Peningkatan kemampuan ruang lingkup pengujian

Analisa: Dengan peningkatan ruang lingkup pengujian maka sampel yang diuji dengan parameter (PUK) yang diwajibkan pada pedoman sampling dan pengujian, akan dapat tercapai. Peningkatan ruang lingkup pengujian dengan cara melakukan pengujian yang belum masuk ruang lingkup, serta pelatihan terhadap parameter uji tersebut. Pada TWII untuk meningkatkan Jaminan Mutu Hasil Pengujian telah dilakukan Verifikasi Metoda untuk penambahan Ruang Lingkup di lab pangan.

- b. Rapat evaluasi bulanan bersama antara Substansi pemeriksaan, dan substansi pengujian

Analisa: Rapat evaluasi ini untuk mensinkronkan jumlah sampel yang telah disampling dan yang masuk ke laboratorium. Dan juga kesesuaian terhadap kesepakatan yang telah dibuat di awal tahun

- c. Pengadaan baku pembanding secara mandiri

Analisa: Ketersediaan baku pembanding di P3OMN belum memadai sehingga P3OMN merekomendasikan agar Balai melakukan pengadaan baku pembanding secara mandiri, tapi tentu Balai harus menyediakan anggaran untuk pengadaannya. Pada TWII ada beberapa baku pembanding yang diadakan secara mandiri.

- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sampel yang diuji di laboratorium

Analisa: Substansi Pengujian secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan PUK dan timeline sampel yang diuji. Sehingga pengujian yang dilakukan dapat dikelola dengan baik. Pada TW II ini sampel yang diuji ada yang tidak memenuhi PUK dan melebihi timeline yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena terjadi pengulangan sampel untuk uji penegasan sampel yang TMS. Selain itu juga disebabkan laboratorium pangan pada TW2 melaksanakan

pelatihan Internal, kerusakan pada alat untuk pengujian aflatoxin , terlambat sampel masuk ke laboratorium dari substansi pemeriksaan dan terlambat pengadaan Baku banding ,suku cadang dan reagensia.

5. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

- a. Rekomendasi perbaikan kinerja sebelumnya adalah pengadaan reagensia, baku pembanding, suku cadang, dan pemeliharaan Alat Laboratorium.

Evaluasi dan Analisa: Dari hasil evaluasi didapat bahwa reagensia yang digunakan pada awal tahun 2021 sampai dengan TW 2 masih menggunakan sisa reagensia tahun 2020 dan jumlahnya tidak memadai. Untuk itu tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah percepatan pengadaan reagensia. Dan jumlah anggaran untuk pengadaan reagensia perlu ditambah karena ada beberapa reagensia yang tidak terpenuhi. Terutama reagensia untuk sampel DAK yang berasal dari Kabupaten / Kota , reagensia untuk Pangan fortifikasi dan reagensia dalam rangka Mobkel yang belum dianggarkan sehingga perlu anggaran tersendiri.

Dan untuk alat laboratorium yang sering rusak (contoh AAS) perlu penambahan anggaran untuk pemeliharaan sehingga alat laboratorium dapat terpelihara dengan baik , dan penambahan alat AAS yang baru, karena semua Laboratorium Kimia sejak tahun 2020 sudah menggunakan AAS untuk pengujian parameter Logam (PUK) yang berakibat frekwensi penggunaan AAS sangat tinggi.

- Untuk baku pembanding, harus disediakan anggaran khusus untuk pengadaan baku pembanding yang tidak tersedia di P3 OMN
 - Perlu Penambahan suku cadang alat laboratorium (kolom HPLC, PDA) yang memadai karena frekwensi pemakaian alat laboratorium yang sangat tinggi.
 - Perlu penambahan anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan alat Laboratorium, dan memperbaiki segera yang rusak
- b. Ketepatan jadwal masuknya sampel ke laboratorium sesuai dengan perencanaan dan kesepakatan saat rapat perencanaan dengan Substansi Pemeriksaan, agar penyelesaian pengujian sampel bisa sesuai target yang direncanakan.

3.1.7 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VII

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

A. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	30	44,17	147,23	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 3.23. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2021

Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Padang sampai dengan Triwulan II tahun 2021 adalah 44,17% dari target sebesar 30% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan II tahun 2021 sebesar 147,23% dengan kriteria Tidak Dapat disimpulkan

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan II tahun 2021 adalah 44,17%, bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 91% , maka capaian terhadap target akhir tahun adalah sebesar 48,54%.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

a. Melakukan Perencanaan yang matang dalam penentuan target operasi penindakan dan diatur sedemikian rupa bagaimana cara bertindak di tempat kejadian perkara

b. Pembobotan tiap tahap proses penyidikan

Penilaian tingkat keberhasilan penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara yaitu :

a. Proses SPDP dengan bobot 15%

b. Proses Tahap I dengan bobot 40%

c. Proses P21 dengan bobot 30%

d. Proses Tahap II dengan bobot 15%

Sehingga proses tersebut harus dilalui tahap demi tahap untuk mencapai nilai pembobotan 100%, agar tercapai tingkat keberhasilan penyidikan tindak pidana dibidang obat dan makanan sesuai target

c. Peningkatan Kompetensi penyidik

Dalam periode Triwulan 2 , penyidik BBPOM Padang telah menyelesaikan proses tahap II sebanyak 2 perkara dan tahap 1 sebanyak 1 perkara yang diselesaikan sesuai time line SOP mikro Perencanaan dan pelaksanaan operasi penindakan.

d. Melakukan monitoring dan evaluasi

Dalam pencapaian keberhasilan penyidikan tindak pidana dibidang obat dan makanan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Untuk setiap perkara yang sudah diproses projustisia dilakukan monitoring pada kartu kendali perkara.

e. Koordinasi dengan ICJS

Koordinasi dengan penegakan hukum seperti; Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan terlaksana dengan baik sehingga berkas perkara yang diselesaikan dapat sampai ke persidangan

f. Tindak lanjut hasil operasi penyidikan

Pelaksanaan gelar perkara dilakukan setelah kegiatan operasi penindakan, dimana hasil gelar perkara ada yang tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan dikarenakan pelaku usaha yang telah ditindak tersebut mempunyai keinginan baik untuk mengurus izin edar dan sekarang sedang melakukan proses pendaftaran/notifikasi kosmetik ke BPOM RI.

g. Perkara yang carry over

Ada 1 (satu) perkara Tahun 2020 dihitung masih pada proses P21 hingga sekarang karena perkara tersebut belum bisa dilaksanakan Tahap II dikarenakan tersangka melarikan diri dan saat ini telah diterbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh POLRI.

4. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Telah tercapainya target capaian kinerja pada Triwulan II didukung oleh kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh petugas substansi penindakan pada Balai Besar POM di Padang. Untuk pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen

diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan tersebut seperti komputer/laptop yang memiliki spesifikasi tinggi sehingga dapat memudahkan pencarian dan akses informasi peredaran obat dan makanan secara online serta dibutuhkan pengembangan kompetensi petugas di bidang cyber crime. Untuk proses penyidikan dibutuhkan koordinasi yang baik dengan CJS/lintas sektor terkait sehingga memudahkan PPNS dalam menyelesaikan berkas perkara hingga pelaksanaan Tahap II.

Mengamati perkembangan perkara pada tahun 2020, pelaku kejahatan obat dan makanan telah memiliki taktik untuk melarikan diri saat proses penyidikan, sehingga ini menyebabkan pelaksanaan Tahap II tertunda dan menerbitkan DPO. Untuk mengatasi tidak terulangnya kasus tersebut diatas, maka PPNS menginstruksikan wajib lapor pada pelaku yang telah disangkakan.

5. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya (TW I) meliputi:

- a. Memperhatikan dan menerapkan seluruh Aspek protokol kesehatan dalam melaksanakan penindakan dan penyidikan di lingkungan BBPOM di Padang
- b. Meningkatkan koordinasi secara virtual dengan seluruh pihak – *Criminal Justice System* (CJS) dalam rangka penerapan kebiasaan baru dalam melakukan kegiatan.
- c. Meningkatkan akses informasi yang dapat memberikan input untuk perkara obat dan makanan.

Dengan berakhirnya periode TW II 2021 dan menyisakan 6 (enam) bulan berjalan, untuk mencapai target telah disimulasikan bahwa minimal pencapaian proses penyelesaian perkara pada TW III 2021 adalah :

- 1 perkara pada proses SPDP
- 1 perkara pada proses Tahap I
- 1 perkara pada proses P21
- 3 perkara pada proses Tahap II

3.1.8 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VIII

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG YANG OPTIMAL

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utamayaitu :

- A. Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang**
- B. Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang**

Kedua indikator dari sasaran kegiatan terwujudnya organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang efektif di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang ini diukur pada akhir tahun 2021 sehingga tidak dapat disimpulkan hasil capaian pada Triwulan II Tahun 2021.

3.1.9 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IX

TERWUJUDNYA SDM BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG YANG BERKINERJA OPTIMAL

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu :

- A. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang**

Indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang ini diukur pada akhir tahun 2020 sehingga tidak dapat disimpulkan hasil capaian pada Triwulan II Tahun 2021

3.1.10 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN X

MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama, yaitu :

- A. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP**

Indikator Persentase pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar diukur pada akhir tahun 2021 sehingga tidak dapat disimpulkan hasil capaian pada Triwulan II Tahun 2021

B. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang Optimal

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	2	1,95	97,50	Baik

Tabel 3.24. Capaian Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal Triwulan 2 Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2021

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal sampai dengan triwulan 2 tahun 2021 adalah 1,95 dari target sebesar 2 sehingga capaian yang diperoleh Triwulan II Tahun 2021 sebesar 97,50%.

Tabel 3.25. Rincian nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Padang

No	Nama Balai	Data dan Informasi Mutakhir		Jumlah	Pemanfaatan Sistem Informasi				Jumlah	Total Nilai i i =c+h/ 2		
		SIPT(a)	SPIMKer(b)		c= a+ b	Email(d)	Sharing Folder (e)	Dashboard BCC (f)			Berita Aktual (g)	h = d+e+f+g/4
		80%	20%									
	Balai Besar POM di Padang	0,8	0,6	1,4	3	3	3	1	2,5			

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal pada Triwulan II tahun 2021 adalah 1,95, bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 2, maka capaian terhadap target akhir tahun sama yaitu sebesar 97,50%.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- a. Pada triwulan IV, seluruh laporan hasil pemeriksaan sarana, penandaan, iklan, sampling dan pengujian telah masuk semua ke dalam aplikasi SIPT dan sudah memenuhi target, sehingga terjadi kenaikan laporan SIPT dari triwulan sebelumnya.
- b. Terjadi peningkatan verifikasi kasus keracunan pada aplikasi SPIMKER yang tepat waktu oleh verifikator.
- c. Pimpinan BBPOM di Padang aktif memanfaatkan dashboard BCC.
- d. Petugas pemeriksaan aktif menggunakan sharing folder
- e. Seluruh pegawai sudah aktif memanfaatkan email corporate setiap harinya.
- f. Aktif dalam melaporkan berita kegiatan dalam berita aktual di subsite BBPOM di Padang

Alternatif solusi :

- a. Tim TI BBPOM di Padang aktif dalam menginformasikan dan melakukan sosialisasi kepada pegawai untuk memanfaatkan seluruh aplikasi yang sudah dibangun dalam mengelola data dan informasi.
- b. Pengguna SIPT aktif berkoordinasi dengan Tim TI BBPOM di Padang jika ada kendala terkait SIPT sehingga bisa langsung di Tindak Lanjuti oleh Tim TI BBPOM di Padang ke tim SIPT di Pusdatin.
- c. Tim TI BBPOM di Padang aktif berkoordinasi dengan tim Pusdatin BPOM jika terjadi kendala dalam penggunaan aplikasi ataupun teknologi lainnya.

3. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Pemanfaatan seluruh aplikasi maupun teknologi informasi yang sudah disediakan oleh Pusdatin BPOM dalam melakukan kegiatan pengawasan obat dan makanan.
- b. Penggunaan aplikasi yang tepat waktu (sesuai timeline), seperti verifikasi kasus keracunan pada SPIMKER dibawah 5 hari kerja, begitupun dengan SIPT.
- c. Pemanfaatan email corporate BPOM dalam berkomunikasi.

4. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

- a. Tim TI BBPOM di Padang aktif dalam menginformasikan, melakukan sosialisasi serta melakukan pemantauan kepada pimpinan dan pegawai untuk memanfaatkan seluruh aplikasi yang sudah dibangun dalam mengelola data dan informasi.

- b. Pimpinan dan pegawai BBPOM di Padang sudah aktif dalam memanfaatkan teknologi ataupun aplikasi yang tersedia.

Tim TI BBPOM aktif berkoordinasi dengan pengguna aplikasi maupun dengan tim Pusdatin BPOM jika terjadi kendala dalam penggunaan aplikasi ataupun teknologi lainnya, serta cepat dalam penanganan masalah terkait TIK.

3.1.11 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN XI

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 123,84% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	50	78,68	157,36	Tidak dapat disimpulkan
2.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	93	84	90,32	Baik

Tabel 3.26. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan XI

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-XI sebagai berikut :

A. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	50	78,68	157,36	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 3.27. Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Triwulan II Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2021

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sampai dengan Triwulan II tahun 2021 adalah 78,68% dari target sebesar 50 sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan II tahun 2021 sebesar 157,36% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

Tabel 3.28 Rincian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Padang

NILAI EKA	NILAI IKPA	REALISASI
68,28	94,27	78,68

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang adalah 78,68 bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 94, maka capaian terhadap target akhir tahun adalah sebesar 83,70%

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

- Pengisian realisasi output telah dilaksanakan secara akurat dengan memperhatikan volume kegiatan yang telah dilaksanakan di masing-masing RO
- Koordinasi dengan substansi terkait data realisasi RO agar pengisian realisasi maksimal sehingga meningkatkan nilai Evaluasi Kinerja anggaran pada monev DJA dan capaian output pada penilaian IKPA
- Tertib dalam pelaksanaan administrasi anggaran, sehingga dapat meningkatkan nilai IKPA

4. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Peningkatan Koordinasi tim monitoring dan evaluasi kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang
- Melakukan monitoring realisasi hasil capaian kinerja setiap substansi dan bagian yang tertuang dalam RAPK yang diperlukan untuk pengisian aplikasi monev DJA dan aplikasi lainnya
- Pelaporan capaian kinerja dan anggaran sesuai pedoman dengan data yang akurat dan tepat waktu
- Tertib administrasi keuangan sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan untuk memperoleh nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran (IKPA) yang baik sebagai pengukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran

5. Melakukan revisi DIPA dan POK terhadap kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.

5. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

1. Perlu peningkatan pemahaman personil terhadap definisi operasional, cara perhitungan dan target Indikator Kinerja Utama sesuai perjanjian Kinerja.
2. Meningkatkan disiplin personil dalam menyampaikan rencana kegiatan dan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban sesuai prosedur.
3. Peningkatan tertib administrasi keuangan untuk meningkatkan kualitas kinerja anggaran

B. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	93	84	90,32	Baik

Tabel 3.29.Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Triwulan II Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2021

Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada Triwulan II tahun 2021 adalah 84% dari target efisien 93%, sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan II tahun 2021 sebesar 90,32% dengan kriteria Baik

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang triwulan II adalah 84%, bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 93% maka capaian terhadap target akhir tahun sama yaitu sebesar 90,32%.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Penyebab belum efisiennya penggunaan anggaran Balai Besar POM di Padang karena adanya beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan antara lain karena adanya pandemi covid-19, sehingga belum bisa melaksanakan kegiatan yang melibatkan orang banyak. Penyebab lain adalah karena kegiatan terpadu yang tidak jadi dilaksanakan, namun anggaran belum direvisi sehingga realisasi output menjadi rendah. Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan membuat perencanaan realisasi kegiatan dan anggaran secara berkesinambungan sehingga lebih terarah rencana penggunaan anggaran disetiap tahap berikutnya.

4. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Melakukan kegiatan sesuai perencanaan yang telah dibuat untuk memenuhi target output dan anggaran yang tersedia
- b. Melakukan evaluasi secara berkala oleh masing-masing bidang terhadap realisasi target dan anggaran yang telah digunakan.
- c. Melakukan revisi POK apabila ada kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan.

5. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Terhadap rekomendasi sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan sesuai perencanaan dan melakukan revisi apabila kegiatan tidak jadi dilaksanakan, namun ada beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan sesuai perencanaan dan untuk kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan belum sepenuhnya dilakukan revisi, sehingga realisasi output dan penyerapan anggaran masih rendah. Untuk tahap selanjutnya dilakukan recofusing anggaran untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran dan realokasi anggaran agar anggaran tersedia dengan memadai guna penanganan penyebaran covid-19 dengan segala dampak yang ditimbulkannya

3.2 REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan program pengawasan obat dan makanan di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang memperoleh anggaran sebesar Rp.45.198.746.000. Realisasi anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang triwulan II tahun 2021 adalah 34,02%.

JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE REALISASI (%)
Belanja Pegawai	17,153,091,000	8,943,525,693	52.14%
Belanja Barang	22,820,905,000	5,867,698,572	25.71%
Belanja Modal	5,224,750,000	565,091,200	10.82%
	45,198,746,000	15,376,315,465	34.02%

Tabel 3.30. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja sampai TW II Tahun 2021

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja yang terdiri dari 11 sasaran kegiatan sebagai berikut :

1. CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PER *OUTPUT* TRIWULAN II

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	VOLUME			ANGGARAN		
		TARGE T TW I	REALISAS I	CAPAIAN	PAGU TW I	REALISASI	CAPAIAN
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	$e=(d/c \times 100)$	<i>f</i>	<i>g</i>	$h=(g/f \times 100)$
1	3165.ADD Standarisasi Lembaga	0.4	0.8288	207.20%	1,601,008,800	493,342,090	30.81%
2	3165.AEA Koordinasi	2	1.818	90.90%	72,292,000	31,060,950	42.97%
3	3165.BAH Pelayanan Publik Lainnya	3.6	4.5002	125.01%	30,438,450	76,369,300	250.90%
4	3165.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2540	802	31.57%	1,560,000,000	186,535,250	11.96%
5	3165.BKB Pemantauan produk	0.4	0.5	125.00%	832,526,400	527,130,063	63.32%
6	3165.BMB Komunikasi Publik	30.4	60	197.37%	33,300,000	50,569,350	151.86%
7	3165.CAB Sarana Bidang Kesehatan	1.2	1.6346	136.22%	2,089,900,000	565,091,200	27.04%
8	3165.QCD Perkara Hukum Badan Usaha	3.6	1	27.78%	331,938,000	169,526,500	51.07%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	VOLUME			ANGGARAN		
		TARGE T TW I	REALISAS I	CAPAIAN	PAGU TW I	REALISASI	CAPAIAN
9	3165.QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	25.6	35.6	139.06%	790,952,400	942,185,875	119.12%
10	3165.QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	1219.2	1390	114.01%	674,716,400	468,240,456	69.40%
11	3165.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	735.6	985	133.90%	880,090,000	609,661,030	69.27%
12	6384.EAA Layanan Perkantoran	0.4	0.5	125.00%	9,076,105,200	12,002,409,676	132.24%
JUMLAH					18,079,498,400	16,122,121,740	89.17%

Tabel 3.31. Realisasi Anggaran per Output triwulan II Tahun 2021

2. CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS TRIWULAN II TAHUN 2021

Tabel 3.32. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis TW II Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	NAMA INDIKATOR	ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS					
		TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
<i>b</i>	<i>c</i>		<i>e</i>	$f = (e/d \times 100)$	<i>g</i>	<i>h</i>	$l = (h/g \times 100)$
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.60	87.55	104.72	Rp120,074,200	Rp111,239,014	92.64%
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.00	80.00	100.00	Rp7,173,000	Rp4,540,458	63.30%
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87.00	91.74	105.45	Rp120,074,200	Rp111,239,014	92.64%
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68.00	81.42	119.73	Rp7,173,000	Rp4,540,458	63.30%

SASARAN STRATEGIS	NAMA INDIKATOR	ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS					
		TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	88.00			Rp15,866,400	Rp10,042,582	63.29%
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	-	-	-	Rp189,772,000	Rp375,468,315	197.85%
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	Rp40,584,600	Rp38,184,650	94.09%
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	Rp780,000,000	Rp93,267,625	11.96%
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90.50	-	-	Rp632,538,160	Rp486,589,726	76.93%
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87.00	87.87	101.00	Rp220,022,500	Rp152,415,258	69.27%

SASARAN STRATEGIS	NAMA INDIKATOR	ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS					
		TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70.00	41.87	58.90	Rp220,022,500	Rp152,415,258	69.27%
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85.00	99.86	117.48	Rp40,584,600	Rp38,184,650	94.09%
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	49.00	55.07	112.39	Rp43,838,400	Rp24,142,600	55.07%
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62.00	72.56	117.03	Rp396,206,600	Rp280,687,915	70.84%
	Indeks Pelayanan Publik	3.76	4.42	117.55	Rp160,600,000	Rp148,569,350	92.51%
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90.54	92.38	102.03	Rp780,000,000	Rp93,267,625	11.96%
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40.00	50.00	125.00	Rp275,264,400	Rp332,902,400	120.94%
	Jumlah desa pangan aman	40.00	65.00	162.50	Rp223,195,200	Rp58,668,560	26.29%
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	40.00	65.00	162.50	Rp102,720,800	Rp175,146,600	170.51%
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40.00	51.04	127.60	Rp843,704,400	Rp221,544,523	26.26%

SASARAN STRATEGIS	NAMA INDIKATOR	ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS					
		TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	35.00	52.61	150.31	Rp865,740,000	Rp258,617,829	29.87%
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	30.00	44.17	147.23	Rp404,230,000	Rp200,587,450	49.62%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	-	-	-	Rp275,109,720	Rp109,111,614	39.66%
	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	-	-	-	Rp155,640,120	Rp87,196,991	56.02%
Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	-	-	-	Rp169,522,800	Rp140,927,940	83.13%
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	Rp1,611,900,000	Rp369,091,200	22.90%
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	2.00	1.95	97.50	Rp72,000,000	Rp-	0.00%

SASARAN STRATEGIS	NAMA INDIKATOR	ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS					
		TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	50.00	78.68	157.36	Rp6,861,236,400	Rp9,560,692,018	139.34%
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	93.00	84.00	90.32	Rp2,444,704,400	Rp2,482,840,120	101.56 %

3.3 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Yang menjadi fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar, atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE), mengikuti formula logika sebagai berikut :

Jika $IE \geq SE$: kegiatan efisien
Apabila $IE < SE$: kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{IE}$$

Yang menjadi fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar, atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE), mengikuti formula logika sebagai berikut :

Jika $IE \geq SE$: kegiatan efisien
Apabila $IE < SE$: kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pengukuran efisiensi secara lengkap dapat dilihat pada tabel Nilai efisiensi masing-masing Indikator kinerja utama sebagai berikut :

No	Indikator	IE	TE	Capaian TE
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	1.13	0.13	100 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	1.58	0.58	92 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	1.14	1,80	75 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	1.89	0.89	88 %
5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	1.34	0.34	95 %
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	1.46	0.46	92 %
7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	0.86	-0.14	75 %
8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	1.25	0.25	95 %
9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	2.04	1.04	86 %
10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	1.65	0.65	90 %
11	Indeks Pelayanan Publik	1.27	0.27	95 %
12	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	8.52	7.52	75 %
13	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	1.03	0.03	100 %

14	Jumlah desa pangan aman	6.18	5.18	75 %
15	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	0.95	-0.05	75 %
16	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	4.86	3.86	75 %
17	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5.03	4.03	75 %
18	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	2.97	1.97	75 %
19	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
20	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1.13	0.13	100 %
TOTAL		2.29	1.29	84 %

Tabel 3.33. Nilai efisiensi sasaran kegiatan Triwulan II Tahun 2021

BAB IV

PENUTUP



4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Interim Triwulan II Balai Besar POM di Padang Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan dan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tahun 2021. Dalam laporan Akuntabilitas Kinerja ini tergambar target, capaian, tantangan, kendala sekaligus peluang dalam pencapaian kinerja 11 (sebelas) sasaran strategis yang diukur dengan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Padang.

Secara umum Balai Besar POM di Padang berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Balai Besar POM di Padang berhasil mencapai 2 sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria baik, 4 sasaran kegiatan dengan kriteria tidak dapat disimpulkan dan 5 sasaran kegiatan belum bisa dihitung karena capaiannya diukur pada akhir tahun.
2. Realisasi anggaran pada triwulan II tahun 2021 berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebesar sebesar Rp.15,376,315,465- (Lima belas milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) atau 34,02% dari total pagu anggaran sebesar Rp.45,198,746,000 (Empat puluh lima milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).
3. Berdasarkan analisis tingkat efisiensi kegiatan yang dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2021 di Provinsi Sumatera Barat belum efisien dengan nilai efisiensi 84%

4.2 RENCANA PERBAIKAN KINERJA

Capaian kinerja dan realisasi anggaran dari 11 (sebelas) sasaran strategis yang diperoleh Balai Besar POM di Padang Triwulan II Tahun 2020 sudah terlaksana dengan baik, namun masih diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap capaian tersebut, terutama untuk realisasi yang masih

rendah. Hal ini diperlukan untuk untuk rencana perbaikan kinerja Balai Besar POM di Padang triwulan berikutnya. Rencana perbaikan kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan capaian sasaran Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dilakukan dengan monitoring terhadap realisasi pelaksanaan sampling TW II, termasuk sebaran daerah pelaksanaan kegiatan sampling. Peningkatan kemampuan uji dengan meningkatkan SRL, Alat Laboratorium dan Kompetensi penguji dengan pelatihan internal kepada staf penguji terutama metoda pengujian dengan tingkat kesulitan yang tinggi (III, IV dan V)
2. Peningkatan capaian sasaran Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dilakukan dengan membuat aplikasi yang dapat membantu petugas dalam pembuatan surat tindak lanjut, serta dapat digunakan untuk monev hasil pengawasan. Melakukan pembinaan kepada sarana produksi UMKM Pangan/OT/Kosmetik dan monitoring proses izin edar dengan melakukan komunikasi secara intensif terhadap pelaku usaha
3. Peningkatan capaian sasaran Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang antara lain dengan menindaklanjuti Bupati/Walikota terkait pembuatan SK Tim Terpadu dan OPD yang mengawal kegiatan bersama-sama dengan BPOM di Padang, pelaksanaan kegiatan Pasar, Bimtek PJAS dan kegiatan pelatihan korlap dan KKPD,
4. Peningkatan capaian sasaran Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dilakukan dengan percepatan pengadaan reagensia dan Monitoring dan evaluasi terhadap manajemen pengujian(PUK dan Timeline),
5. Peningkatan capaian sasaran Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan penegakan hukum seperti; Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan terlaksana dengan baik sehingga berkas perkara yang diselesaikan dapat sampai ke persidangan. Dalam pencapaian keberhasilan penyidikan tindak pidana dibidang obat dan makanan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Untuk setiap perkara yang sudah diproses projustisia dilakukan monitoring pada kartu kendali perkara.

6. Peningkatan capaian sasaran Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel dilakukan dengan Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan dan melakukan revisi apabila kegiatan tidak jadi dilaksanakan, melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara berkesinambungan serta melaksanakan tindaklanjut yang efektif. Pengisian realisasi capaian output secara tepat dan konsisten sesuai kegiatan yang dilaksanakan pada setiap RO dan tertib administrasi pelaksanaan anggaran sesuai pedoman dan peraturan untuk meningkatkan nilai IKPA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI PADANG

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR PR.04.01.93.931.12.20.189 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan perencanaan kinerja dan anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tentang Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2021;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TAHUN 2021.
- KESATU : Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2021;
- KEDUA : Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Desember 2020

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PADANG,



FIRDAUS UMAR 4.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
NOMOR PR. 04.01.93.931.12.20.189 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TAHUN 2021

RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	73
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	75

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	90,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	49
		5. Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	62
		6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	3,76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,64
		2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		3. Jumlah desa pangan aman	18
		4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91
		2. Persentase sampel makanan	87

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		yang diperiksa dan diuji sesuai standar	
7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	89
8	Terwujudnya organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang efektif	1. Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	92
		2. Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	85
9	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	77
10	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	82
		2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	94
		2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Efisien (93%)

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,


FIRDAUS UMAR y.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdaus Umar, S.Si,Apt.

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang
selanjutnya disebut Pihak Pertama

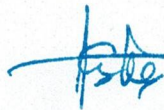
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Pihak Pertama

Firdaus Umar, S.Si., Apt.

Padang, 22 Desember 2020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	73
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	90,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	49
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	3,76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,64
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	18
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	87
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	89

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	92
		Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	85
9	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Efisien (93%)

Program

- 1 Pengawas Obat dan Makanan
- 2 Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 22.508.483.000
Rp 23.411.972.000

Kegiatan

- 1 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
- 2 Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Anggaran

Rp 22.508.483.000
Rp 23.411.972.000

Padang, 22 Desember 2020

Kepala Badan POM



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Kepala Balai Besar POM di Padang



Firdaus Umar, S.Si, Apt.

Padang, 12 April 2021

Nomor : B-PR.05.93.931.04.21.152
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : **Revisi RAPK Balai Besar POM di Padang tahun 2021**

Kepada Yth.
Bagian Perencanaan
Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM RI
di
Jakarta

Sehubungan dengan adanya perubahan target triwulan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Padang, maka dengan ini kami sampaikan revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Besar POM di Padang tahun 2021 yang terdiri dari:

No	Indikator Kinerja	Semula	Menjadi	Justifikasi
1	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	45%, 50%, 70%, 40	10%, 40%, 70%, 40	Adanya perubahan definisi target dari PMPU, bahwa target output pengawalan dihitung di akhir tahun
2	Jumlah desa pangan aman	45%, 50%, 70%, 18	10%, 40%, 75%, 18	
3	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	40, 50,70, 6	10, 40, 70, 6	
4	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	35,85,80,91	25, 40, 75, 91	Adanya kesalahan dalam menghitung target sampel obat yang diuji sesuai standar

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Padang



Firdaus Umar, S.Si, Apt.

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (RUPIAH)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6	83.6	83.6	83.6	Rp 179.172.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	Rp 35.865.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	87	87	87	Rp 421.199.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68	68	68	68	Rp 197.217.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu				73	Rp 503.630.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				87	Rp 101.461.500
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan				75	Rp 1.950.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang				90,5	Rp 450.000.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana	87	87	87	87	Rp 107.876.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (RUPIAH)
			B03	B06	B09	B12	
	pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	produksi dan distribusi yang dilaksanakan					
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	70	70	70	Rp 992.236.500
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85	85	85	Rp 101.461.500
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	49	49	49	49	Rp 107.876.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62	62	62	62	Rp 992.236.500
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang				3,76	Rp.222.000.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,64	90,64	90,64	90,64	Rp 1.950.000.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	10%	40%	70%	40	Rp 688.161.000
		Jumlah desa pangan aman	10%	40%	75%	18	Rp 528.788.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10%	40%	70%	6	Rp 256.802.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	40	75	91	Rp 2.254.161.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	35	70	87	Rp 2.151.699.000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	30	50	89	Rp. 1.010.575.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (RUPIAH)
			B03	B06	B09	B12	
	Pengawas Obat dan Makanan di Padang						
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang				92	Rp. 265.220.000
		Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang				85	Rp. 1.538.216.000
9	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang				77	Rp. 277.880.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP				82	Rp. 4.029.750.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	2	2	2	2	Rp. 1.195.000.000
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	45	50	60	94	Rp. 17.874.800.000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Efisien (93 %)	Efisien (93 %)	Efisien (93 %)	Efisien (93 %)	Rp. 5.537.172.000

Padang, 4 Maret 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG



Firdaus Umar, S.Si., Apt.

**PENCAPAIAN KINERJA BESAR POM DI PADANG
TRIWULAN II TAHUN 2021**

NO	NAMA KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TW I	PEMBILAN G	PENYEBUT	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN PENYESUAIAN (%)	KRITERIA
Stakeholder Perspective											
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	%	83.60	626	715	87.55	104.73	104.73	Baik
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	%	80.00	268	335	80.00	100.00	100.00	Baik
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	87.00	200	218	91.74	105.45	105.45	Baik
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	68.00	92	113	81.42	119.73	119.73	Sangat baik
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS1:									107.48	107.48	Sangat baik
SS2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	Indeks	73.00	-	-	-	-	-	-
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS2:									-	-	
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	87.00	-	-	-	-	-	-
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	75.00	-	-	-	-	-	-
		8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Indeks	90.50	-	-	-	93.13	102.91	-
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS3:											
Capaian Stakeholder Perspective											
Internal Process Perspective											
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar	9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	%	87.00			87.87	101.00	101.00	Baik

NO	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TW I	PEMBILAN G	PENYEBUT	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN PENYESUAIAN (%)	KRITERIA
	Pengawas Obat dan Makanan di Padang	10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	%	70.00			41.87	59.81	59.81	Cukup
		11		%	85.00	699	700	99.86	117.48	117.48	Sangat baik
		12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	49.00	38	69	55.07	112.39	112.39	Sangat baik
		13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	62.00	653	900	72.56	117.03	117.03	Sangat baik
		14	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.76	-	-	4.42	117.55	117.55	Sangat baik
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS4:				104.21104.21Baik							
SS5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	15	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Nilai	90.54	-	-	92.38	102.03	102.03	Baik
		16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Sekolah	40.00			50.00	125.00	120.00	Tidak dapat disimpulkan
		17	Jumlah desa pangan aman	Desa	40.00			65.00	162.50	120.00	Tidak dapat disimpulkan
		18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Pasar	40.00			65.00	162.50	120.00	Tidak dapat disimpulkan
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS5:				138.01115.51Sangat baik							

NO	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TW I	PEMBILAN G	PENYEBUT	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN PENYESUAIAN (%)	KRITERIA
SS6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	40.00	-	-	51.04	127.60	120.00	Tidak dapat disimpulkan
		20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	35.00	-	-	52.61	150.31	120.00	Tidak dapat disimpulkan
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS6:									138.96	120.00	Tidak dapat disimpulkan
SS7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	%	30.00			44.17	147.23	120.00	Tidak dapat disimpulkan
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS7:									147.23	120.00	Tidak dapat disimpulkan
Capaian Internal Process Perspective									132.10	114.93	Baik
Learning & Growth Perspective											
SS8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	22	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Indeks	92.00	-	-	-	-	-	-
		23	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Nilai	85.00	-	-	-	-	-	-
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS8:											
SS9	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Indeks	77.00	-	-	-	-	-	-
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS9:											

NO	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TW I	PEMBILAN G	PENYEBUT	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN PENYESUAIAN (%)	KRITERIA
SS10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	%	82.00	-	-	-	-	-	-
		26	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	Indeks	2.00	-	-	1.95	97.50	97.50	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS10:											
SS11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Nilai	50.00	-	-	78.68	157.36	120.00	Tidak dapat disimpulkan
		28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	%	93.00	-	-	84.00	90.32	90.32	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS11:									80.00	105.16	Baik
Learning & Growth Perspective											
NPS TOTAL											

Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Padang



Firdaus Umar, S.Si., Apt.

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI PADANG
TAHUN 2021**

NO	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2021	Target TW II	REALISASI TW I			Capaian	Kesimpulan	RENCANA TINDAK LANJUT PERIODE SEBELUMNYA (TW I)	PERBAIKAN/TINDAK LANJUT TW II TERHADAP REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT SEBELUMNYA	HAMBATAN TW II	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNGJAWAB
						Pembilang	Penyebut	Realisasi							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.60%	83.60%	626	715	87.55%	104.73%	Target tercapai	1. Melakukan monitoring terhadap sebaran sampel perkabupaten/kota 2. Meningkatkan kemampuan uji laboratorium pengujian dengan mempersiapkan metoda uji, reagensia dan peralatan yang memadai	1. Telah dilakukan monitoring terhadap realisasi pelaksanaan sampling TW II, termasuk sebaran daerah pelaksanaan kegiatan sampling 2. Sudah dilakukan peningkatan kemampuan uji dengan meningkatkan SRL, Alat Lab dan Kompetensi pengujian dengan pelatihan internal kepada staf pengujian terutama metoda pengujian dengan tingkat kesulitan yang tinggi (III, IV dan V)	1. Jenis obat yang tersedia disarana PKM kurang bervariasi 2. Pelatihan dilakukan secara "daring" karena kondisi pandemi Covid 19 ini 3. Untuk peningkatan SRL, terkendala ada sampel tidak tersampling 4. Untuk Alat Lab LCMSMS tidak disetujui oleh P3OMN	1. Meningkatkan kemampuan uji personil secara terus menerus baik "daring" maupun "luring" 2. Melakukan pembelian sampel untuk peningkatan SRL 3. Mengajukan kembali usulan ke P3OMN	
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.00%	80.00%	268	335	80.00%	100.00%	Target tercapai	1. Melakukan monitoring terhadap sebaran sampel perkabupaten/kota 2. Meningkatkan kemampuan uji laboratorium pengujian dengan mempersiapkan metoda uji, reagensia dan peralatan yang memadai	1. Telah dilakukan monitoring terhadap realisasi pelaksanaan sampling TW II, termasuk sebaran daerah pelaksanaan kegiatan sampling 2. Sudah dilakukan peningkatan kemampuan uji dengan meningkatkan SRL, Alat Lab dan Kompetensi pengujian dengan pelatihan internal kepada staf pengujian terutama metoda pengujian dengan tingkat kesulitan yang tinggi (III, IV dan V)	Belum semua kategori sampling pangan dapat dilakukan pengujian pada TWII karena ketidaktersediaan reagensia 1. Pelatihan dilakukan secara "daring" karena kondisi pandemi Covid 19 ini 2. Untuk peningkatan SRL, terkendala ada sampel tidak tersampling 3. Untuk Alat Lab LCMSMS tidak disetujui oleh P3OMN	Koordinasi antara substansi pemeriksaan dan pengujian terkait peningkatan kemampuan uji serta tim pengadaan reagensia 1. Meningkatkan kemampuan uji personil secara terus menerus baik "daring" maupun "luring" 2. Melakukan pembelian sampel untuk peningkatan SRL 3. Mengajukan kembali usulan ke P3OMN	PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN LOKA
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87.00%	87.00%	200	218	91.74%	105.45%	Target tercapai	1. Memberikan bimbingan teknis kepada petugas pengawas 2. Memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha (produksi dan distribusi) 2. Meningkatkan kemampuan uji laboratorium pengujian dengan mempersiapkan metoda uji, reagensia dan peralatan yang memadai	1. Memberikan bimbingan kepada petugas pelaksana sampling	1. Pelatihan dilakukan secara "daring" karena kondisi pandemi Covid 19 ini 2. Untuk peningkatan SRL, terkendala ada sampel tidak tersampling 3. Untuk Alat Lab LCMSMS tidak disetujui oleh P3OMN	1. Meningkatkan kemampuan uji personil secara terus menerus baik "daring" maupun "luring" 2. Melakukan pembelian sampel untuk peningkatan SRL 3. Mengajukan kembali usulan ke P3OMN	PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN LOKA
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68.00%	68.00%	92	113	81.42%	119.73%	Target tercapai	1. Komunikasi dengan Stakeholder terkait untuk dapat melakukan pembinaan terhadap sarana makanan yang berada di wilayahnya. 2. Meningkatkan kemampuan uji laboratorium pengujian dengan mempersiapkan metoda uji, reagensia dan peralatan yang memadai	2. Sudah dilakukan peningkatan kemampuan uji dengan meningkatkan SRL, Alat Lab dan Kompetensi pengujian dengan pelatihan internal kepada staf pengujian terutama metoda pengujian dengan tingkat kesulitan yang tinggi (III, IV dan V)	1. Pelatihan dilakukan secara "daring" karena kondisi pandemi Covid 19 ini 2. Untuk peningkatan SRL, terkendala ada sampel tidak tersampling 3. Untuk Alat Lab LCMSMS tidak disetujui oleh P3OMN	1. Meningkatkan kemampuan uji personil secara terus menerus baik "daring" maupun "luring" 2. Melakukan pembelian sampel untuk peningkatan SRL 3. Mengajukan kembali usulan ke P3OMN	PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN LOKA

NO	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2021	Target TW II	REALISASI TW I			Capaian	Kesimpulan	RENCANA TINDAK LANJUT PERIODE SEBELUMNYA (TW I)	PERBAIKAN/TINDAK LANJUT TW II TERHADAP REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT SEBELUMNYA	HAMBATAN TW II	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGINGJAWAB	
						Pembilang	Penyebut	Realisasi								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	73.00	-	-	-	-	#VALUE!		-					
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan	87.00	-	-	-	-	#VALUE!		-					
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan	75.00	-	-	-	-	#VALUE!		-					
		8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90.50	90.50	-	-	93.13	102.91%	Target tercapai	-	Menyiapkan lebih banyak petugas layanan publik yang kompeten dan telah menerima pelatihan pelayanan prima sehingga kepuasan masyarakat terhadap layanan publik ini semakin meningkat, hal ini juga ditunjang dengan ketepatan dan kecepatan hasil uji, karena konsumen pelayanan publik banyak dari pihak ketiga yang mengujikan sampel.	a. Belum semua pelaku usaha dan stake holder yang memahami Aplikasi Galamai dalam penyerahan sampel pihak ke 3 sehingga pelaku usaha dan stakeholder akan kembali menyerahkan sampel secara manual. b. Masih kurangnya sarana dan prasarana diruang layanan publik seperti toilet khusus tamu, tempat beribadah	a. Akan mengedukasi kembali stake holder dan masarakat tentang penggunaan Aplikasi Galamai untuk mempermudah proses penyerahan sampel,sertifikasi dll b. Telah dilakukan peningkatan luas layanan publik serta sarana di layanan sehingga pengunjung yang datang merasa nyaman dan tenang dalam memperoleh layanan c. Akan dilakukan evaluasi untukpeningkatan kepuasan masarakat ini	INFOKOM	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87.00%	87.00%			87.87%	101.00%	Target tercapai	Membuat suatu aplikasi yang dapat membantu petugas dalam pembuatan surat tindak lanjut, serta aplikasi yang dapat digunakan untuk movev hasil pengawasan.	Telah dibuat aplikasi yang dapat membantu petugas dalam pembuatan surat tindak lanjut, serta aplikasi yang dapat digunakan untuk movev hasil pengawasan, dalam tahap pengembangan	Padatnya kegiatan, menghambat petugas untuk membuat surat Tindak Lanjut sesuai batas waktu yang ditentukan	Menyegerakan penyelesaian pembuatan /pengembangan aplikasi yang dapat membantu petugas dalam membuat surat TL	PEMERIKSAAN DAN LOKA	
		10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70.00%	70.00%			41.87%	59.81%	Target belum tercapai	Membuat suatu sistem kontrol terhadap tindak lanjut yang direspon oleh pemangku kepentingan, serta menunjuk petugas yang akan bertanggungjawab untuk melakukan koordinasi dengan pelaku usaha terkait respon terhadap tindak lanjut	Telah ditunjuk penanggungjawab untuk melakukan monitoring terhadap feedback surat tindak lanjut	Koordinasi dengan pelaku kepentingan belum dilakukan secara optimal karena padatnya kegiatan pada TW II (intensifikasi pengawasan pangan di bulan Ramadhan menyambut lebaran, dan pemantauan sampel pabukaoan, pengawalan pendistribusian vaksin covid-19), serta kondisi pandemic covid	Mengoptimalkan koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian hasil inspeksi	PEMERIKSAAN DAN LOKA	

NO	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2021	Target TW II	REALISASI TW I			Capaian	Kesimpulan	RENCANA TINDAK LANJUT PERIODE SEBELUMNYA (TW I)	PERBAIKAN/TINDAK LANJUT TW II TERHADAP REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT SEBELUMNYA	HAMBATAN TW II	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNGJAWAB
						Pembilang	Penyebut	Realisasi							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85.00%	85.00%	699	700	99.86%	117.48%	Target tercapai	Melakukan pembinaan dan monitoring terhadap pelaku usaha yang mengajukan izin edar sehingga proses rekomendasi dapat dipercepat	1. Melakukan pembinaan ke 22 sarana produksi UMKM Pangan/OT/Kosmetik 2. Melakukan pembinaan denah lay out bangunan terhadap 6 sarana industri Pangan/OT/Kosmetik 3. Melakukan monitoring proses izin edar dengan melakukan komunikasi secara intensif terhadap pelaku usaha	1. Pengetahuan pelaku usaha terhadap GMP Pangan/OT/Kosmetik yang terbatas menyebabkan terkendalanya pendampingan terhadap proses izin edar 2. Terbatasnya pendanaan pelaku usaha dalam penerapan GMP untuk proses izin edar 3. Pandemi Covid-19 menyebabkan petugas tidak dapat melaksanakan komunikasi secara langsung dengan lancar	1. Melakukan bimtek setempat secara intensif terkait proses izin edar produk pangan/OT/Kosmetik 2. Melakukan layanan konsultasi secara langsung ataupun melalui WA dan telp	PEMERIKSAAN DAN LOKA
		12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	49.00%	49.00%	38	69	55.07%	112.39%	Target tercapai	Mengoptimalkan kegiatan dalam melakukan kajian terhadap daerah dimana sarana produksi Obat dan Makanan belum memenuhi ketentuan.	Penetapan target sarana berdasarkan kajian resiko	Padatnya kegiatan pada TW II, terbatasnya jumlah personel yang memiliki kompetensi yang sesuai, serta kondisi pandemic covid sehingga total target sarana produksi pada TW II tidak terpenuhi	Melakukan penyesuaian rencana kegiatan pengawasan sarana produksi pada TW berikutnya, agar semua target pengawasan dapat direalisasikan	PEMERIKSAAN DAN LOKA
		13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62.00%	62.00%	653	900	72.56%	117.03%	Target tercapai	Mengoptimalkan kegiatan dalam melakukan kajian terhadap daerah dimana sarana distribusi Obat dan Makanan belum memenuhi ketentuan.	Penetapan target sarana sudah berdasarkan kajian resiko dan tingkat keparahan temuan hasil pemeriksaan sebelumnya	Padatnya kegiatan pada TW II, terbatasnya jumlah personel yang memiliki kompetensi yang sesuai, serta kondisi pandemic covid sehingga total target sarana pelayanan kefarmasian dan sarana distribusi obat tidak terpenuhi	Melakukan penyesuaian rencana kegiatan pengawasan sarana pelayanan kefarmasian dan Distribusi obat pada TW berikutnya, agar semua target pengawasan dapat direalisasikan	PEMERIKSAAN DAN LOKA
		14	Indeks Pelayanan Publik	3.76	3.76	-	-	4.42	117.55%	Target tercapai	-	a. Membuat ruang layanan publik yang sesuai standar b. Meningkatkan kerjasama antar bidang terutama bidang TU dan Infokom serta tim QMS untuk menyusun standar layanan publik	a. Standar layanan publik dan maklumat layanan belum bisa disampaikan ke semua stake holder. b. Masih kurang nya koordinasi dg lintas sektor terkait layanan publik	Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait layanan publik dengan melaksanakan advokasi, meletakkan spanduk dan balho diperkantoran, menyebarkan buku atau brodur yang berisikan standar layanan publik BBPOM	INFOKOM
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90.54	90.54	-	-	92.38	102.03%	Target tercapai	a. Melanjutkan melaksanakan KIE Medsos b. Melaksanakan KIE di Ritel c. Melaksanakan KIE bersama Tokoh Masyarakat pada TW II sd TW IV	a. KIE medsos telah dilaksanakan selama TW1 dan akan dilanjutkan pada TW 2 b. KIE Ritel belum terlaksana pada TW 2, direncanakan akan terlaksana pada TW3 c. KIE bersama Tokoh Masyarakat baru akan dilaksanakan pada TW 3 setelah pengadaan gimmick selesai diadakan	a. Masih belum banyaknya peserta KIE yang peduli terhadap pengisian efektivitas KIE b. Belum meluasnya sistem dan media penyebaran informasi di BBPOM di Padang Karena keterbatasan anggaran c. Tidak semua peserta KIE mempunyai HP android untuk mengisi link efektivitas KIE	a. Mencari inovasi untuk media dan sistem penyebaran informasi/KIE kepada masyarakat b. Mengingatkan dan mendampingi masyarakat dalam mengisi form efektivitas KIE	INFOKOM DAN LOKA

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Target TW II	REALISASI TW I			Capaian	Kesimpulan	RENCANA TINDAK LANJUT PERIODE SEBELUMNYA (TW I)	PERBAIKAN/TINDAK LANJUT TW II TERHADAP REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT SEBELUMNYA	HAMBATAN TW II	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNGJAWAB	
					Pembilang	Penyebut	Realisasi								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40.00	40%			50.00%	125.00%	Target tercapai	a. Akan melaksanakan sosialisasi PJAS secara daring dan Bimtek Keamanan PJAS secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan b. BBPOM di Padang akan membuat surat kepada Bupati/Walikota terkait pembuatan SK Tim Terpadu dan OPD yang mengawal kegiatan bersama-samadengan BPOM di Padang.	a. Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi keamanan pangan sekolah secara daring dan Bimtek Keamanan PJAS secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan b. BBPOM di Padang akan membuat surat kepada Bupati/Walikota terkait pembuatan SK Tim Terpadu dan OPD yang mengawal kegiatan bersama-samadengan BPOM di Padang.	Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan yang dilaksanakan secara daring, terkendala oleh sulitnya sinyal di daerah sehingga peserta tidak mencukupi target. Kegiatan kemudian dilaksanakan sekali lagi untuk mencukupi target peserta dan dengan menambahkan peserta dari Kabupaten lain yaitu Kab. Agam dan Kab. Solok	a. Dinas Pendidikan diharapkan dapat melanjutkan kegiatan PJAS di daerahnya dengan memasukkan materi-materi Keamanan Pangan pada pelajaran sekolah b. Memonitor pembentukan Tim Keamanan Sekolah dan kegiatan pemberdayaan Komunitas sekolah oleh kader keamanan pangan sekolah c. Memonitor terlaksananya penyusunan dokumen rencana aksi keamanan pangan sekolah d. Melaksanakan sertifikasi Sekolah dengan PJAS aman level 1 dan 2	INFOKOM
		17	Jumlah desa pangan aman	18.00	40%	0.00%	0.00%	65.00%	162.50%	Target tercapai	a. BBPOM di Padang akan membuat surat kepada Bupati/Walikota terkait pembuatan SK Tim Terpadu dan OPD yang mengawal kegiatan bersama-sama dengan BPOM di Padang. b. Setelah advokasi lintas sektor terlaksana, pada triwulan 2 akan dilaksanakan pelatihan korlap dan KKPD, dilanjutkan dengan bimtek komunitas, fasilitasi tahap 1 dan intensifikasi pre intervensi secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan	a. Memfollow up Bupati/Walikota terkait pembuatan SK Tim Terpadu dan OPD yang mengawal kegiatan bersama-sama dengan BPOM di Padang. b. Telak dilaksanakan kegiatan pelatihan korlap dan KKPD, dilanjutkan dengan bimtek komunitas, fasilitasi tahap 1 dan intensifikasi pre intervensi secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan	a. Komunitas yang dipilih oleh kader tidak tepat sasaran b. Banyak peserta yang datang pada kegiatan Bimtek Komunitas tidak tepat waktu sehingga kegiatan terlambat dimulai c. Masih ditemukan sampel TMS pada kegiatan Pre-Intervensi Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan d. Ada kader yang tidak kompeten dalam memberikan materi/mengajar kepada komunitas desa e. Data komunitas yang diperoleh tidak sesuai	a. Kedepannya akan dibuat batasan usia dan jenjang pendidikan untuk masyarakat yang akan dihip sebagai kader keamanan pangan b. Membuat surat kepada dinas terkait di Kab/Kota yang diintervensi untuk menindaklanjuti sampel TMS c. Pada TW 3, akan melanjutkan kegiatan tahap selanjutnya yaitu Movev, Intensifikasi post intervensi dan Pengawasan Desa Madya	INFOKOM
		18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6.00	40%	0.00%	0.00%	65.00%	162.50%	Target tercapai	a. b. Kegiatan baru dapat terlaksana setelah Kick Off Meeting dilaksanakan di Pusat b. Mengatur jadwal untuk melaksanakan Bimtek petugas pasar dan Movev pasar tahap 1 secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan	a. Kegiatan pasar telah diklaksanakan setelah kick off meeting, yaitu survei pasar, Bimtek petugas pengelola pasar, pelatihan fasilitator dan Movev tahap 1 b. Membuat jadwal unyuk yahapan selanjutnya yaitu Penyuluhan pasar, Kampanye pasar dan Movev Tahap 2	a. Sulit untuk memperoleh pasar yang dikategorikan sebagai pasar sehat di Sumatera Barat b. Pasar yang telah diintervensi pada tahun-tahun sebelumnya, sering tidak dilakukan pembinaan lanjutan sehingga masih ditemukan sampel TMS di pasar tersebut c. Pada kegiatan penyuluhan kepada komunitas pasar, jumlah peserta yg hadir tidak sesuai dengan target karena peserta konfirmasi berhalangan hadir di kegiatan pada saat hari H kegiatan dan tidak ada yg dapat mewakili untuk peserta pengganti d. Beberapa materi yang disampaikan oleh Dinas terkait yang diundang sebagai narasumber , tidak sesuai dengan yang diharapkan e. Sebagian besar pedagang yang berjualan di pasar yang diintervensi berasal dari luar kota yang hanya datang pada saat hari pasar	a. Pedagang yang diundang kedepannya adalah pedagang yang berdomisili di wilayah tersebut b. Mengarahkan kepada Dinas Perdagangan atau pasar yang diintervensi tahun sebelumnya untuk mengadakan test kit c. Pada TW III akan dilaksanakan kegiatan Movev Pasar tahap 2 dan kegiatan Kampanye Pasar	INFOKOM

NO	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2021	Target TW II	REALISASI TW I			Capaian	Kesimpulan	RENCANA TINDAK LANJUT PERIODE SEBELUMNYA (TW I)	PERBAIKAN/TINDAK LANJUT TW II TERHADAP REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT SEBELUMNYA	HAMBATAN TW II	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNGJAWAB
						Pembilang	Penyebut	Realisasi							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91.00%	40.00%	-	-	51.04%	127.60%	Target tercapai	1. Percepatan pengadaan reagensia dan penambahan anggran 2. Monitoring manajemen sampling dan pengujian,	1. Percepatan pengadaan reagensia, baku pembanding, dan suku cadang yang belum tersedia 2. Monitoring dan evaluasi terhadap manajemen pengujian(PUK dan Timeline)	1. Anggaran untuk reagensia, baku pembanding masih belum memadai	1. Menambah anggaran untuk pengadaan reagensia dan baku pembanding	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
		20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	87.00%	35.00%	-	-	52.61%	150.31%	Target tercapai	1. Percepatan pengadaan reagensia dan penambahan anggran 2. Monitoring manajemen sampling dan pengujian,	1. Percepatan pengadaan reagensia, baku pembanding, dan suku cadang yang belum tersedia 2. Monitoring dan evaluasi terhadap manajemen pengujian(PUK dan Timeline)	1. Anggaran untuk reagensia, baku pembanding masih belum memadai 2. Alat Laboratorium yang rusak	1. Menambah anggaran untuk pengadaan reagensia dan baku pembanding 2. Memperbaiki Alat Laboratorium dan menambah anggran pemeliharaan Alat Lab	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	89.00%	30.00%	-	-	44.17%	147.23%	Target tercapai	Membuat permohonan ke direktorat kriminal khusus Polda Sumbar untuk menerbitkan pencarian orang (DPO)	Terbitnya DPO oleh Kriminal khusus Polda Sumbang untuk mencari dan melaporkan tersangka ke Polda. Koordinasi dengan BBPOM Aceh tentang informasi suami tersangka yang diduga bertugas di Aceh	Informasi yang diperoleh belum akurat sehingga tidak didapatkan informasi untuk menindak lanjuti DPO. Kondisi pandemi covid-19 mempengaruhi pemantauan obat dan makanan ilegal.	Mendalami informasi terkait data yang berhubungan dengan tersangka. Melakukan pemantauan obat dan makanan ilegal dengan melibatkan informan	PENINDAKAN DAN LOKA
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	22	Indeks RB UPT	92.00	-	-	-	-	#VALUE!						
		23	Nilai AKIP UPT	85.00	-	-	-	-	#VALUE!						
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN UPT	77.00	-	-	-	-	#VALUE!						
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data	25	Persentase pemenuhan laboratorium	82.00%	-	-	-	-	#VALUE!						

NO	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2021	Target TW II	REALISASI TW I			Capaian	Kesimpulan	RENCANA TINDAK LANJUT PERIODE SEBELUMNYA (TW I)	PERBAIKAN/TINDAK LANJUT TW II TERHADAP REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT SEBELUMNYA	HAMBATAN TW II	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGINGJAWAB
						Pembilang	Penyebut	Realisasi							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	dan informasi pengawasan obat dan makanan	26	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.00	2.00	-	-	1.95	97.50%						
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94.00	50.00	-	-	78.68	157.36%	Target tercapai		Pengisian realisasi capaian output secara tepat dan konsisten sesuai kegiatan yang dilaksanakan pada setiap RO dan tertib administrasi pelaksanaan anggaran sesuai pedoman dan peraturan untuk meningkatkan nilai IKPA	Beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan sesuai rencana sehingga pada beberapa output capaiannya masih rendah termasuk serapan anggarannya dan masih ada pelaksanaan anggaran yang belum tertib administrasi	Meningkatkan realiasi capaian output dan selalu tertib dalam pelaporan kinerja anggaran	TATA USAHA
		28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	93.00	93.00			90.00%	96.77%	Target belum tercapai	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan dan melakukan revisi apabila kegiatan tidak jadi dilaksanakan	Telah dilakukan kegiatan sesuai dengan perencanaan pada POA dan melakukan revisi apabila kegiatan tidak dilaksanakan	Beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan sesuai rencana sehingga pada beberapa output capaiannya masih rendah termasuk serapan anggarannya	Mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dan melakukan revisi serta recofusing sesuai arahan pusat	TATA USAHA

Mengetahui
Kepala Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan di Padang

Firdaus Umar, S.Si, Apt

CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI SD TRIWULAN II TAHUN 2021

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6	87.55	104.72	120,074,200	111,239,014	92.64	1.13	0.13	100 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	100.00	7,173,000	4,540,458	63.30	1.58	0.58	92 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	91.74	105.45	120,074,200	111,239,014	92.64	1.14	1.80	75 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68	81.42	119.74	7,173,000	4,540,458	63.30	1.89	0.89	88 %
5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90.5	93.13	102.91	632,538,160	486,589,726	76.93	1.34	0.34	95 %
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	87.87	101.00	220,022,500	152,415,258	69.27	1.46	0.46	92 %
7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	41.87	59.81	220,022,500	152,415,258	69.27	0.86	-0.14	75 %
8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	99.86	117.48	40,584,600	38,184,650	94.09	1.25	0.25	95 %
9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	49	55.07	112.39	43,838,400	24,142,600	55.07	2.04	1.04	86 %
10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62	72.56	117.03	396,206,600	280,687,915	70.84	1.65	0.65	90 %
11	Indeks Pelayanan Publik	3.76	4.42	117.55	160,600,000	148,569,350	92.51	1.27	0.27	95 %
12	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90.64	92.38	101.92	780,000,000	93,267,625	11.96	8.52	7.52	75 %
13	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	50	125.00	275,264,400	332,902,400	120.94	1.03	0.03	100 %
14	Jumlah desa pangan aman	40	65	162.50	223,195,200	58,668,560	26.29	6.18	5.18	75 %
15	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	40	65	162.50	102,720,800	175,146,600	170.51	0.95	-0.05	75 %
16	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40	51.04	127.60	843,704,400	221,544,523	26.26	4.86	3.86	75 %
17	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	35	52.61	150.31	865,740,000	258,617,829	29.87	5.03	4.03	75 %
18	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	30	44.17	147.23	404,230,000	200,587,450	49.62	2.97	1.97	75 %
19	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	2	1.95	97.50	72,000,000	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
20	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	50	78.68	157.36	6,861,236,400	9,560,692,018	139.34	1.13	0.13	100 %
TOTAL				119.50	5,463,161,960	2,855,298,685	52.26	2.29	1.29	84 %

Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Padang



Firdaus Umar, S.Si., Apt.